



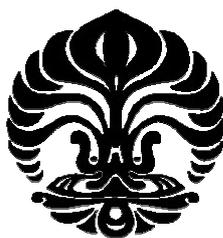
UNIVERSITAS INDONESIA

**WILAYAH PENGEMBANGAN PENDIDIKAN SMA DI KOTA
DEPOK**

TESIS

**MARGARETHA SRI HASTUTI
0806420493**

**FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
PROGRAM PASCA SARJANA ILMU GEOGRAFI
DEPOK
DESEMBER 2010**



UNIVERSITAS INDONESIA

**WILAYAH PENGEMBANGAN PENDIDIKAN SMA DI KOTA
DEPOK**

TESIS

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar magister sains

**MARGARETHA SRI HASTUTI
0806420493**

**FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
PROGRAM PASCA SARJANA ILMU GEOGRAFI
DEPOK
DESEMBER 2010**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.



Nama : Margaretha Sri Hastuti
NPM : 0806420493
Tanda Tangan :
Tanggal : 28 Desember 2010

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :
Nama : Margaretha Sri Hastuti
NPM : 0806420493
Program Studi : Geografi
Judul Tesis : Wilayah Pengembangan Pendidikan SMA
di Kota Depok

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Sains pada Program Studi Ilmu Geografi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Indonesia

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Dr. Djoko Harmantyo ,MS ()
Pembimbing : Dra.MH Dewi Susilowati, MS ()
Penguji : Dr. Tarsoen Waryono, MS ()
Penguji : Dr . Tris Eriyando, MS ()
Penguji : Drs Cholifah Bahaudin, MA ()

Ditetapkan di : Depok
Tanggal : 28 Desember 2010

KATA PENGANTAR/UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan tesis ini. Penulisan tesis ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Science Jurusan Geografi pada Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Indonesia.

Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan tesis ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

- (1) Dr. Djoko Harmantyo, Msi dan Dra. MH Dewi Susilowati MS selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan tesis ini;
- (2) Dra. Sr Ferdinanda Ngao, OSU dan Yayasan Ananta Bhakti yang telah memberikan dorongan moral dan bantuan beasiswa selama pendidikan
- (4) Mas Dwigo suami tercinta dan Orang Tua yang telah banyak memberikan dukungan doa, materil dan moral, Bagas, putraku tersayang yang dengan penuh pengertian menunggu mama selama mengerjakan tesis ;
- (5) Pihak Dinas Pendidikan Kota Depok, khususnya Bapak Syahrul yang telah banyak membantu dalam usaha memperoleh data yang saya perlukan;
- (6) Sahabat-sahabat seperjuangan di Program Pasca Sarjana Ilmu Geografi;
- (7) Sahabat dan teman-teman guru SMA St. Theresia yang telah banyak membantu doa dan dukungan moral dalam menyelesaikan tesis ini;
- (8) Mas Bambang, Alfanza, Mentari ,seluruh staf dan karyawan di Departemen Geografi yang telah banyak memberikan bantuan dalam tesis ini;

Akhir kata, saya berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Penulis

2010

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Margaretha Sri Hastuti
NPM : 0806420493
Program Studi : Pasca Sarjana
Departemen : Geografi
Fakultas : Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
Jenis karya : Tesis

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

WILAYAH PENGEMBANGAN PENDIDIKAN SMA DI KOTA DEPOK

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok
Pada tanggal : 28 Desember 2010
Yang menyatakan

(.....)

ABSTRAK

Nama : Margaretha Sri Hastuti
Program Studi : Geografi
Judul : Wilayah Pengembangan Pendidikan SMA di Kota Depok

Penelitian tugas akhir Program Pasca Sarjana di Departemen Geografi Universitas Indonesia didominasi oleh penelitian terapan. Salah satu tema penelitian, yaitu Pengembangan Pendidikan SMA, rumusan masalah yang diteliti adalah karakteristik wilayah sebaran lokasi SMA berdasarkan parameter kualitas SMA dan Wilayah Pengembangan Pendidikan SMA di Kota Depok. Untuk mengetahui karakteristik wilayah sebaran lokasi SMA berdasarkan parameter kualitas SMA di Kota Depok dianalisis secara spasial dan uji statistik. Variabel yang digunakan adalah Nilai rata-rata Ujian Nasional sebagai parameter kualitas SMA, jumlah penduduk usia SMA, angka partisipasi sekolah, penggunaan tanah permukiman, rasio kelas dan siswa, rasio guru dan siswa, jumlah sarana penunjang dan tingkat kelulusan dari tiap-tiap SMA di Kota Depok. Kemudian dilakukan overlay peta kualitas SMA dengan peta dari variabel-variabel yang digunakan. Membuat analisis dengan tabel matriks antara kualitas SMA dengan variabel yang diteliti. Uji statistik digunakan untuk mendukung analisis spasial. Untuk mengetahui wilayah pengembangan pendidikan SMA digunakan semua variabel dengan membuat wilayah prioritas berdasarkan : Jumlah Penduduk usia SMA yaitu usia 15 – 19 tahun tiap kecamatan, Angka Partisipasi Sekolah, Penggunaan tanah permukiman tiap kecamatan , prosentase peringkat A nilai rata-rata Ujian Nasional dari sekolah-sekolah di setiap Kecamatan, prosentase Rasio Kelas dan Siswa di bawah standar dari tiap Kecamatan , prosentase Rasio Guru dan Siswa di bawah standar dari tiap Kecamatan , prosentase kelengkapan ruang sarana penunjang dari tiap Kecamatan . Berdasarkan hasil pembahasan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : Karakteristik sebaran kualitas SMA tidak sepenuhnya mengikuti sebaran jumlah penduduk Usia sekolah (15-19 tahun), sekolah-sekolah yang berkualitas tinggi persebarannya berada pada wilayah dengan jumlah penduduk usia sekolah sedang, pada wilayah dengan angka partisipasi tinggi, pada wilayah dengan penggunaan tanah permukiman tinggi dan memiliki rasio kelas dan siswa dibawah standar, memiliki rasio guru dan siswa diatas standar, memiliki ruang sarana penunjang lengkap. Wilayah pengembangan pendidikan SMA prioritas utama adalah kecamatan Cimanggis dan kecamatan Sawangan, prioritas kedua adalah kecamatan Sukmajaya dan prioritas ketiga adalah kecamatan Pancoranmas, Beji dan Limo.

Kata Kunci : Kualitas Pendidikan , Pengembangan Pendidikan , Standar Perencanaan Pendidikan, Wilayah Pengembangan
xii+101 halaman ; 21 peta; 34 tabel
Daftar Pustaka : 49 (1968-2009)

ABSTRACT

Name : Margaretha Sri Hastuti
Program Study : Geography
Title : The Area of High School Education Development in the City of Depok

The research thesis of the Graduate Program in the Geography Department, University of Indonesia is dominated by applied research. One of the research themes is Educational Development of High Schools. The formulation of the problems examined are the characteristics of the distribution area of High School locations based on the high-quality parameters and Area Development of High School education in Depok. To analyze and find out the characteristics of the distribution area of High School locations based on the high-quality parameters of High School in Depok, spatial and statistical tests were used. The variables used in the research are average values of National Examination as a parameter of quality High School, the age of High School population, school enrollment, the use of residential land, class - student ratio, student - teacher ratio from each High School in Depok. Then we performed high quality overlay maps with maps of the variables used, made a chart analysis with matrix between the quality of high school with the research variables. The statistical test was used to support spatial analysis. To know the development of high school education all the variables were used by making priority of the region by: Number of school age population, School Enrollment, the use of Residential Land, percentage of rating A for the average marks of the National Examination of the schools in each district (*kecamatan*), percentage of Class - Student Ratio under the standards of each district, and Student -Teacher Ratio percentage below the standard from each district, the percentage of completeness of spaces of supporting facilities of each district. Based on the results of the discussion, it can be concluded that Characteristics of the distribution of school quality does not entirely follow the distribution of school age population. The high quality schools are spreading to areas with a population of *medium* school age category, in areas with a *high* participation rate category, in areas with *high* residential land use category and have a ratio *below* the standard class – student ratio, has a student-teacher ratio *above* the standard, and has a dequate or complete support facilities. The priority of high school education development area is the district of Cimanggis and Sawangan, the second priority is the district of Sukmajaya and the third priority is the district of Pancoranmas, Beji and Limo.

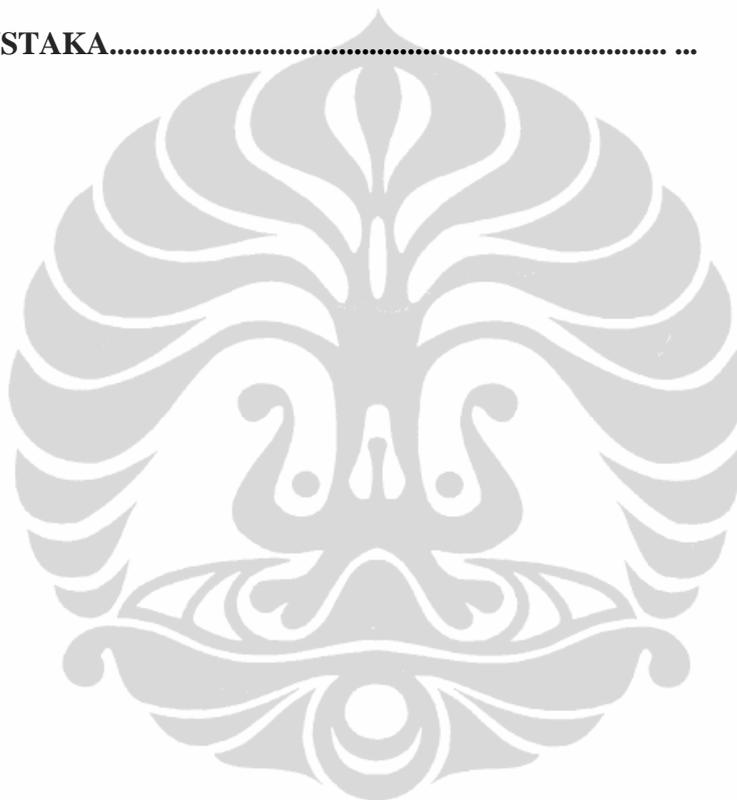
Keywords: Quality Education, Education Development, Education Planning Standards, Area Development
xii + 101 pages, 21 maps, 33 tables
References: 49 (1968-2009)

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ...	i
LEMBAR PENGESAHAN ...	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	iv
ABSTRAK	v
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR PETA.....	ix
DAFTAR TABEL.....	x
1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Perumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian	6
1.5 Batasan Penelitian	7
2. TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 Hakekat Pendidikan	10
2.2 Hakekat Ruang	11
2.3 Standar Lokasi Pendidikan.....	15
2.3.1 Standar dan Pertimbangan Distribusi Pendidikan.....	16
2.3.2 Standar Perencanaan Kebutuhan Sarana Kota Cipta Karya untuk Perumahan Sederhana.....	17
2.3.3 Standar Perencanaan Kebutuhan Sarana Kota..... Departemen Dalam Negri.....	18
2.3.4 Dinas Tata Kota DKI Jakarta.....	19
2.3.5 Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan..... Menengah Departemen Pendidikan Nasional.....	19
2.3.6 Standar dan Ketentuan mengenai Layanan Fasilitas Pendidikan	20
2.3.7 Standar Lokasi Sekolah menurut De Chiara dan Koppelman.....	21
2.4 Nilai Rata-rata Ujian Nasional.....	23
2.5 Faktor Internal Sekolah	26
2.5.1 Rasio Kelas dan Siswa	26
2.5.2 Rasio Guru dan Siswa	27
2.5.3 Ruang Sarana Penunjang	28
2.6 Karakteristik Wilayah	28
2.6.1 Jumlah Penduduk Usia Sekolah	29
2.6.2 Angka Partisipasi Sekolah.....	29
2.6.3 Penggunaan Tanah Permukiman.....	30
2.7 Teori Pengembangan Wilayah.....	31

2.8. Strategi dan Arah Kebijakan Pendidikan tahun 2010-2014.....	33
2.9. Kebijakan dan Strategi Pembangunan Pendidikan Kota Depok....	34
3. METODE PENELITIAN	36
3.1 Alur Pikir Penelitian	36
3.2 Variabel Penelitian.....	37
3.3 Daerah Penelitian.....	38
3.4 Pengumpulan Data.....	38
3.4.1 Pengumpulan Data Sekunder.....	38
3.4.2 Pengumpulan Data Primer.....	39
3.5 Pengolahan Data.....	39
3.5.1 Data Karakteristik Wilayah Sebaran Lokasi SMA Berdasarkan Parameter Kualitas di Kota Depok.....	39
3.5.2 Uji Statistik.....	42
3.5.3 Data Wilayah Pengembangan Pengembangan..... Pendidikan SMA di Kota Depok.....	43
3.6 Metoda Analisis	44
4. DESKRIPSI KOTA DEPOK.....	47
4.1 Sejarah Kota Depok.....	47
4.2 Letak dan Rencana Pengembangan Kota Depok.....	48
4.3 Kondisi Penduduk.....	52
4.4 Penggunaan Tanah.....	53
4.5 Fasilitas Pendidikan.....	54
4.6 Nilai Rata-rata Ujian Nasional di Kota Depok	55
4.7 Faktor Internal.....	57
4.7.1 Rasio Kelas dan Siswa	57
4.7.2 Rasio Guru dan Siswa	58
4.7.3 Ruang Sarana Penunjang SMA di Kota Depok.....	59
4.8. Faktor Eksternal.....	60
4.8.1 Jumlah Penduduk Usia Sekolah (15-19 thn).....	60
4.8.2 Angka Partisipasi Sekolah.....	61
4.8.3 Penggunaan Tanah Permukiman.....	62
5. HASIL DAN PEMBAHASAN.....	65
5.1 Karakteristik Wilayah Sebaran Lokasi SMA Berdasarkan..... Parameter Kualitas di Kota Depok.....	65
5.1.1 Kualitas SMA dengan Jumlah Penduduk Usia Sekolah... ..	65
5.1.2 Kualitas SMA dengan Angka Partisipasi Sekolah.....	67
5.1.3 Kualitas SMA dengan Penggunaan Tanah Permukiman..	70
5.1.4 Kualitas SMA dengan Rasio Kelas dan Siswa.....	72
5.1.5 Kualitas SMA dengan Rasio Guru dan Siswa.....	75
5.1.6 Kualitas SMA dengan Ruang Sarana Penunjang.....	78
5.2 Uji Statistik Kualitas SMA dengan Faktor Internal.....	80
5.3 Wilayah Pengembangan Pendidikan SMA di Kota Depok.....	81

5.3.1 Jumlah Penduduk Usia Sekolah.....	82
5.3.2 Angka Partisipasi Sekolah.....	83
5.3.3 Penggunaan Tanah Permukiman.....	85
5.3.4 Prosentase Nilai Rata-rata Ujian Nasional.....	86
5.3.5 Prosentase Rasio Kelas dan Siswa.....	88
5.3.6 Prosentase Rasio Guru dan Siswa.....	90
5.3.7 Prosentase Tingkat Kelengkapan Ruang Sarana..... Penunjang.....	92
5.4 Wilayah Pengembangan Pendidikan SMA di Kota Depok.....	94
6. KESIMPULAN	97
DAFTAR PUSTAKA.....	98



DAFTAR PETA

Peta 1	Peta Administrasi Kota Depok
Peta 2	Peta Penggunaan Tanah Kota Depok
Peta 3	Peta Persebaran SMA di Kota Depok
Peta 4	Peta Nilai Rata-rata Ujian Nasional di Kota Depok tahun Ajaran 2009/2010
Peta 5	Peta Rasio Kelas dan Siswa SMA di Kota Depok Tahun Ajaran 2009/2010
Peta 6	Peta Rasio Guru dan Siswa SMA di Kota Depok Tahun Ajaran 2009/2010
Peta 7	Peta Ruang Sarana Penunjang SMA di Kota Depok Tahun Ajaran 2009/2010
Peta 8	Peta Overlay Nilai Rata-rata Ujian Nasional dengan Jumlah Penduduk Usia Sekolah
Peta 9	Peta Overlay Nilai Rata-rata Ujian Nasional dengan Angka Partisipasi Sekolah Kota Depok
Peta 10	Peta Overlay Nilai Rata-rata Ujian Nasional dengan Penggunaan Tanah Permukiman Kota Depok
Peta 11	Peta Kaitan Nilai Rata-rata Ujian Nasional dengan Rasio Kelas dan Siswa SMA 2009/2010 Kota Depok
Peta 12	Peta Kaitan Nilai Rata-rata Ujian Nasional dengan Rasio Guru dan Siswa SMA 2009/2010 Kota Depok
Peta 13	Peta Kaitan Nilai Rata-rata Ujian Nasional SMA 2009/2010 dengan Ruang Sarana Penunjang Kota Depok
Peta 14	Peta Jumlah Penduduk Usia SMA (15-19 Tahun) Kota Depok
Peta 15	Peta Angka Partisipasi Sekolah Kota Depok
Peta 16	Peta Prosentase Permukiman terhadap Penggunaan Tanah Kota Depok
Peta 17	Peta Prosentase Perolehan Peringkat A Nilai Rata-rata Ujian Nasional SMA Kota Depok
Peta 18	Peta Prosentase Rasio Kelas dan Siswa SMA Dibawah Standar Kota Depok
Peta 19	Peta Prosentase Rasio Guru dan Siswa SMA Dibawah Standar Kota Depok
Peta 20	Peta Prosentase Kelengkapan Ruang Sarana Penunjang Kota Depok
Peta 21	Peta Pengembangan Wilayah Pendidikan SMA Kota Depok

DAFTAR TABEL

- Tabel 2.1. Standar Perencanaan Kebutuhan Sarana Pendidikan Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum
- Tabel 2.2. Standar Perencanaan Kebutuhan Sarana Kota Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum untuk Perumahan Sederhana
- Tabel 2.3. Standar Perencanaan Kebutuhan Sarana Kota Departemen Dalam Negeri
- Tabel 2.4. Standar Fasilitas Pendidikan Dinas Tata Kota DKI Jakarta
- Tabel 2.5. Kriteria Umum Penetapan Fasilitas Pendidikan Menurut De Chiara dan Koppelman
- Tabel 3.1. Penilaian Variabel untuk Wilayah Pendidikan
- Tabel 4.1. Luas Wilayah Kota Depok 2008
- Tabel 4.2. Nama dan Jumlah Kelurahan di Kota Depok
- Tabel 4.3. Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan
- Tabel 4.4. Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan
- Tabel 4.6. Jumlah SD, SMP dan SMA Kota Depok
- Tabel 4.7. Nilai Rata-Rata Ujian Nasional SMA di Kota Depok Tahun Ajaran 2009/2010
- Tabel 4.8. Rasio Kelas dan Siswa SMA di Kota Depok Tahun Ajaran 2009/2010
- Tabel 4.9. Rasio Guru dan Siswa SMA di Kota Depok Tahun Ajaran 2009/2010
- Tabel 4.10. Jumlah Sarana Penunjang SMA di Kota Depok Tahun Ajaran 2009/2010
- Tabel 4.12. Jumlah Penduduk Usia Sekolah di Kota Depok tahun 2009
- Tabel 4.13. Angka Partisipasi Sekolah di Kota Depok tahun 2009
- Tabel 4.14. Penggunaan Tanah Permukiman Kota Depok tahun 2009
- Tabel 5.1. Kualitas SMA dan Jumlah Penduduk Usia SMA (15-14 thn) di Kota Depok
- Tabel 5.2. Kualitas SMA dan Angka Partisipasi Sekolah di Kota Depok
- Tabel 5.3. Kualitas SMA dan Penggunaan Tanah Permukiman di Kota Depok
- Tabel 5.4. Kualitas SMA dengan Rasio Kelas dan Siswa di Kota Depok
- Tabel 5.5. Kualitas SMA dengan Rasio Guru dan Siswa di Kota Depok
- Tabel 5.6. Kualitas SMA dengan Ruang Sarana Penunjang
- Tabel 5.7. Kualitas SMA dengan Semua Faktor Internal
- Tabel 5.8. Jumlah Penduduk Usia SMA (15-19 tahun) di Kota Depok tahun 2009
- Tabel 5.9. Angka Partisipasi Sekolah di Kota Depok tahun 2009
- Tabel 5.10. Penggunaan Tanah Permukiman di Kota Depok tahun 2009
- Tabel 5.11. Prosentase Nilai Rata-rata Ujian Nasional SMA Peringkat A di Kota Depok Tahun Ajaran 2009/2010
- Tabel 5.12. Prosentase Rasio Kelas dan Siswa SMA Dibawah Standar di Kota Depok Tahun Ajaran 2009/2010

- Tabel 5.13. Prosentase Rasio Guru dan Siswa SMA Dibawah Standar di Kota Depok Tahun Ajaran 2009/2010
- Tabel 5.14. Prosentase Tingkat Kelengkapan Sarana Penunjang SMA di Kota Depok Tahun Ajaran 2009/2010
- Tabel 5.15. Wilayah Pengembangan Pendidikan SMA di Kota Depok



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa tujuan Pendirian Negara Republik Indonesia antara lain adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Sejalan dengan itu pasal 31 UUD 1945 menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran. Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional, yang diatur dengan undang-undang.

Pendidikan adalah suatu proses menumbuh kembangkan eksistensi peserta didik yang memasyarakat, membudaya, dalam tata kehidupan yang berdimensi lokal, nasional, dan global (Tilaar, 1999). Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa misi pertama dari lima Misi Pendidikan Nasional adalah mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan dalam memperoleh pendidikan bermutu bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam Rencana Strategis (Renstra) Departemen Pendidikan Nasional , salah satu arah kebijakan pembangunan pendidikan adalah mengungkapkan perluasan pendidikan yang bermutu dan relevan dengan kebutuhan masyarakat harus ditempatkan pada prioritas tertinggi dalam pembangunan pendidikan. Mutu dan relevansi pendidikan tercermin dari kemampuan membentuk kecakapan (*competencies*) lulusan. Tuntutan atas pemerataan dan perluasan pendidikan sangat terkait dengan kondisi sekarang, yaitu persoalan keterbatasan social, ekonomi, waktu , kesempatan dan kondisi geografis.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005, pasal 63 ayat 1 disebutkan bahwa: Penilaian Pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah terdiri atas penilaian hasil belajar oleh pendidik, penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan, dan penilaian hasil belajar oleh Pemerintah.

Dan pada pasal 68 disebutkan bahwa: hasil ujian nasional digunakan sebagai salah satu pertimbangan untuk pemetaan mutu program dan/atau satuan pendidikan, dasar seleksi masuk jenjang pendidikan berikutnya, penentuan kelulusan peserta didik dari program dan / atau satuan pendidikan, serta untuk pembinaan dan pemberian bantuan kepada satuan pendidikan dalam upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan.

Ujian Nasional (UN) merupakan salah satu bentuk kebijakan pendidikan. Ujian nasional memadai untuk dikategorikan sebagai kebijakan karena: (1) dengan jelas dimaksudkan untuk mencapai seperangkat tujuan, (2) senantiasa menyertakan rencana pelaksanaan, (3) merupakan program pemerintah, (4) merupakan seperangkat keputusan yang dibuat oleh lembaga dan atau pejabat pendidikan, (5) menghadirkan sejumlah pengaruh, akibat, dampak dan atau konsekuensi, (6) dituangkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan dan peraturan lembaga terkait (Rahardjo, Mudjia, 2010).

Permasalahan kualitas mutu pendidikan yang muncul merupakan suatu permasalahan yang bersifat multi sektor yang sangat terkait dengan kondisi daerah masing-masing karena perbedaan lokasi. Analisis spasial merupakan salah satu metode untuk melihat permasalahan pendidikan yang spesifik dalam suatu wilayah tertentu, maka dapat dilihat bagaimana sebaran permasalahannya dan sebaran prioritas perencanaan bagi setiap daerah dalam suatu wilayah.

Setiap daerah mempunyai karakteristik lingkungan yang berbeda-beda dari sisi letak maupun kondisi lingkungan itu sendiri, hal ini tentu akan berpengaruh pada proses belajar mengajar, perbedaan dari proses ini akan mendorong pada hasil ini akan mendorong pada hasil yang diperoleh. Belum lagi jika internal kependidikan maupun raw input berbeda tentu akan lebih mendorong keberbedaan antar daerah dari hasil proses belajar mengajar. Maka setiap daerah akan berbeda-beda kondisi pendidikan dan dan hasil yang diperoleh tentu akan berbeda (Mustikohendro,2007).

Saat ini Ujian Nasional masih menjadi parameter bagi kualitas pendidikan di Indonesia baik untuk Sekolah Dasar, Sekolah Lanjutan Pertama, maupun Sekolah Menengah Atas. Pemetaan mutu pendidikan dengan menggunakan hasil Ujian Nasional oleh pemerintah dianggap tidak jelas. Selama ini pemerintah selalu mengatakan bahwa ujian nasional sebagai alat pemetaan, terutama terhadap daerah-daerah yang dianggap prestasinya kurang. Nyatanya, banyak daerah yang tidak lulus dan sangat parah angka kelulusannya.

Beberapa tahun terakhir ini UN memang menjadi momok tersendiri di negara ini, terutama setelah sistem pendidikan kita menetapkan batas nilai kelulusan yang setiap tahun semakin naik. Di kalangan sebagian siswa UN mungkin terlihat sangat menakutkan. Jauh sebelum UN digelar banyak persiapan telah dilakukan yang tidak hanya berupa persiapan materi pelajaran, bahkan juga persiapan mental dan spiritual. Setelah hasil UN diumumkan kita melihat beberapa siswa yang tidak lulus berusaha bunuh diri. Begitulah UN telah menjadi ketakutan yang begitu menghantui kehidupan anak-anak bangsa ini.

Kalangan orang tua (masyarakat) UN adalah pertarungan harga diri. Jika anggota keluarga mereka lulus UN akan menjadi kebanggaan keluarga. Namun jika ada anggota keluarga yang tidak lulus UN, maka harga diri keluarga rusak dan orang tua menjadi malu bergaul dengan masyarakat di sekitar mereka karena menjadi bahan pembicaraan. Di kalangan pelaksana pendidikan (sekolah dan guru) UN menjadi sulit didefinisikan. Di satu sisi mereka merasa terbebani dan terpacu agar siswa-siswa yang mereka didik dapat lulus semua bahkan dengan nilai yang baik. Di satu sisi mereka sadar bahwa mencapai hal itu bukanlah hal mudah. Mereka sangat sadar dengan berbagai keterbatasan baik dari kemampuan dan motivasi guru-guru mengajar, sistem pengajaran selama ini yang tidak maksimal, sarana yang minim, dan kemampuan siswa-siswi mereka. (Samuel Purba)

Pendidikan yang sejati tidak bersifat instan oleh karena itu UN jangan digunakan untuk menentukan seseorang lulus atau tidak lulus sekolah. Hasil pendidikan seseorang memang tidak boleh direduksi dalam beberapa mata pelajaran yang diujikan secara nasional. UN sangat perlu dilakukan sebagai indikator pemetaan kualitas mutu pendidikan di seluruh wilayah di negeri ini.

Negara ini masih belum memenuhi kewajibannya memberikan pelayanan pendidikan berupa sarana, fasilitas, kesejahteraan guru, dan peningkatan mutu di semua wilayah. Jadi sudah pasti alat ukur yang digunakan untuk menentukan kelulusan seorang siswa di kota besar tidak boleh disamakan dengan siswa di daerah terpencil.

Otonomi daerah memungkinkan kota atau kabupaten memiliki kewenangan untuk menentukan arahan pembangunan sesuai dengan kebutuhan wilayahnya, termasuk juga dalam hal penyelenggaraan pendidikan. Namun demikian dalam pelaksanaannya tentu saja tidak bisa terlepas dari tujuan dan arahan penyelenggaraan pendidikan secara nasional. Meski di era otonomi pengelolaan bidang pendidikan diserahkan kepada pemerintah kabupaten/kota, dalam pelaksanaannya tetap harus mengacu pada empat strategi dasar pendidikan nasional. Keempat strategi dasar itu meliputi pemerataan pendidikan, peningkatan mutu, efisiensi, dan relevansi. Hal ini tentunya berlaku pula pada kota Depok.

Kota Depok juga harus mengacu pada tiga pokok kebijakan pendidikan nasional : 1) pemerataan dan perluasan akses pendidikan; 2) peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing lulusan; 3) penguatan tata kelola, akuntabilitas, dan citra publik. Kebijakan pertama diarahkan pada ketersediaan dan kecukupan sarana prasarana pendidikan, pendidik dan tenaga kependidikan sehingga semua anak sekolah dapat memperoleh layanan pendidikan baik formal maupun nonformal. Kebijakan kedua diarahkan agar lulusan mempunyai kompetensi sesuai dengan standar kompetensi lulusan, memiliki skill yang sesuai dengan kebutuhan dunia dan pasar kerja, dan memiliki daya saing lulusan yang tinggi sehingga mampu menghadapi dan

mengatasi tantangan kehidupan yang makin berat. Kebijakan ketiga diarahkan agar penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan mulai dari pusat, daerah, dan satuan pendidikan dikelola dengan manajemen yang rasional, efektif, efisien, akuntabel, dan menampilkan citra positif terhadap publik.

Depok merupakan salah satu kota yang ada di Propinsi Jawa Barat yang tumbuh berkembang dengan pesat. Diawali dari bentuk pemerintahan kecamatan, dan kini tumbuh menjadi kota dimana terdapat beberapa Universitas seperti Universitas Indonesia, Gunadarma, Bina Sarana Informatika (BSI) dan masih banyak lagi kampus yang berdiri di Kota Depok

BPS Kota Depok mencatat jumlah penduduk usia sekolah cukup tinggi baik tingkat SD, SMP, maupun tingkat SMA. Sekolah Menengah Atas (SMA) secara umum adalah sekolah yang sebagian lulusannya akan melanjutkan ke jenjang Perguruan Tinggi, kelulusan dan nilai rata-rata Ujian Nasional (UN) SMA juga menjadi salah satu acuan untuk dapat melanjutkan ke jenjang Perguruan Tinggi.

Kota Depok terdapat banyak Sekolah Menengah Atas dengan angka rata-rata Nilai Ujian Nasional tiap-tiap sekolah cukup bervariasi. Tidak semua sekolah dapat meluluskan siswanya 100 %. Dalam menentukan keberhasilan siswa dalam belajar banyak faktor yang mempengaruhi seperti sarana, fasilitas dan juga guru sebagai pendidik dalam proses belajar mengajar serta kondisi lingkungan sekolah. Terjadinya perbedaan dan persamaan kualitas SMA secara faktor internal di tiap sekolah serta karakteristik wilayah yang berkaitan dengan pendidikan SMA sangat menarik untuk diteliti sehingga dapat diketahui karakteristik wilayah sebaran lokasi sekolah berdasarkan parameter kualitas dan wilayah yang menjadi prioritas pengembangan pendidikan khususnya pada tingkat Sekolah Menengah Atas.

1.2. Rumusan Masalah

Berkembangnya suatu kota yang memiliki berbagai fungsi terutama fungsi sebagai kota pendidikan dan juga visi sebagai kota jasa maka peranan

sumber daya manusia yang ada di Kota Depok menjadi sangat dominan. Ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas tentunya sangat dibutuhkan dalam mewujudkan fungsinya sebagai kota pendidikan dan mendukung terlaksananya visi sebagai kota jasa. Salah satu faktor yang menentukan kualitas pendidikan adalah penyediaan pelayanan pendidikan, baik berupa sarana prasarana sekolah maupun pelayanan para pendidik. Apabila penyediaan pelayanan pendidikan baik maka akan dihasilkan pula sumber daya manusia yang baik.

Salah satu indikator pelayanan pendidikan yang baik adalah tersedianya fasilitas pendidikan berkualitas yang bisa menjangkau dan melayani seluruh penduduk. Untuk bisa menjangkau dan melayani seluruh penduduk maka fasilitas pendidikan haruslah tersebar dengan merata, artinya sesuai dengan kebutuhan penduduk setempat yang menggunakannya.

Berdasarkan uraian tersebut, rumusan pertanyaan yang akan diteliti adalah :

1. Bagaimanakah karakteristik wilayah sebaran lokasi SMA berdasarkan parameter kualitas di Kota Depok ?
2. Sehubungan dengan butir (1) diatas, bagaimana wilayah pengembangan pendidikan SMA di Kota Depok?

I.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi karakteristik wilayah sebaran lokasi SMA berdasarkan parameter kualitas di Kota Depok, serta untuk mengetahui wilayah pengembangan pendidikan SMA di Kota Depok.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah :

1. Bagi peneliti meningkatkan keilmuan serta memperluas wawasan dalam bidang keilmuan geografi khususnya mengenai perencanaan pengembangan wilayah dari aspek lokasi pendidikan SMA.

2. Bagi Pemerintah, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai persebaran lokasi SMA eksisting di Kota Depok dan pengembangan wilayah pendidikan khususnya lokasi SMA dikaitkan dengan fakta dan karakteristik wilayah sehingga dapat dijadikan sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam peningkatan pelayanan pendidikan SMA yang lebih merata di masa yang akan datang
3. Bagi masyarakat diharapkan dapat memberikan informasi mengenai kualitas pendidikan menengah khususnya SMA di Kota Depok sehingga dapat meningkatkan semangat untuk berpartisipasi dalam pembangunan dan pengembangan pendidikan khususnya dalam hal peningkatan pelayanan pendidikan menengah atas (SMA) di Kota Depok.
4. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan salah satu bahan acuan dan dasar pertimbangan maupun pertimbangan bagi penelitian lain, khususnya mengenai kondisi pendidikan SMA.

1.5 . Batasan Penelitian

Adapun batasan dalam penelitian ini adalah :

1. Pendidikan menengah atas adalah Sarana Pendidikan menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 pasal 18 dijelaskan bahwa Pendidikan menengah terdiri adalah lanjutan dari pendidikan dasar .Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan pendidikan menengah atas adalah pendidikan menengah secara umum. Pendidikan menengah atas berbentuk Sekolah Menengah Atas (SMA) dibawah Departemen Pendidikan Nasional dan telah mengikuti Ujian Nasional tahun ajaran 2009/2010, ada 49 SMA yang terdiri dari 6 SMA Negeri dan 43 SMA Swasta.

2. Kualitas SMA ditentukan berdasarkan peringkat nilai rata-rata Ujian nasional tahun ajaran 2009/2010. Peringkat A dengan Nilai Rata-rata Ujian Nasional lebih besar dari 7,5, peringkat B dengan Nilai Rata-rata Ujian Nasional 6,5-7,5 dan peringkat C dengan Nilai rata-rata Ujian Nasional kurang dari 6,5.
3. Faktor internal adalah hal-hal yang mempengaruhi secara langsung terhadap kualitas pendidikan di SMA, yaitu faktor yang berupa rasio kelas dan siswa, rasio guru dan siswa dan jumlah ruang sarana penunjang kegiatan sekolah (laboratorium, perpustakaan, aula, uks, dll)
4. Faktor eksternal adalah hal yang berkaitan dengan karakteristik wilayah yaitu berkaitan secara tidak langsung terhadap pendidikan yaitu fakta wilayah berupa jumlah penduduk usia sekolah menengah (15-19 tahun), angka partisipasi sekolah (APS) SMA, prosentase penggunaan tanah permukiman tiap kecamatan.
5. Karakteristik wilayah sebaran lokasi SMA berdasarkan parameter kualitas adalah wilayah yang telah dianalisis berdasarkan kualitas yang dikaitkan dengan jumlah penduduk usia sekolah, angka partisipasi sekolah, penggunaan tanah permukiman, rasio kelas dan siswa, rasio guru dan siswa dan ruang sarana penunjang.
6. Wilayah pengembangan pendidikan adalah wilayah yang diupayakan dalam pembangunan di bidang sektor pendidikan SMA sesuai dengan bobot dari variabel-variabel yang diteliti, makin tinggi bobot dari semua variabel makin utama tingkat prioritasnya. Ditentukan menurut prioritas utama, kedua dan ketiga.

7. Unit analisis untuk mengetahui wilayah pengembangan pendidikan SMA unit analisisnya adalah Kecamatan ,sesuai dengan standar sarana dan prasarana Sekolah Menengah Atas (SMA) yang tercantum dalam Peraturan Menteri Pendidikan No 24 tahun 2007 Tentang Standar Sarana Prasarana untuk Sekolah Menengah Atas Bab IV minimum satu SMA disediakan untuk satu Kecamatan.



BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Hakekat Pendidikan

Pendidikan harus dibangun dalam keterkaitannya secara fungsional dengan berbagai bidang kehidupan, yang masing-masing memiliki persoalan dan tantangan yang semakin kompleks. Dalam dimensi sektoral tersebut, pembangunan pendidikan tidak cukup hanya berorientasi pada pembangunan SDM dalam rangka menyiapkan tenaga kerja. Beberapa tahun kedepan, pembangunan pendidikan nasional harus lebih dilihat dalam perspektif pembangunan manusia seutuhnya. Dalam perspektif tersebut, pendidikan harus lebih berperan dalam membangun seluruh potensi manusia agar menjadi subyek yang berkembang secara optimal dan bermanfaat bagi masyarakat dan pembangunan nasional.

Sejalan dengan visi pendidikan nasional guna mewujudkan cita-cita menciptakan "Insan Indonesia Cerdas dan Kompetitif" pada tahun 2025, terdapat tiga permasalahan inti pembangunan pendidikan nasional :

1. Pemerataan dan perluasan akses pendidikan.
2. Peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing keluaran pendidikan
3. Peningkatan tata kelola, akuntabilitas, dan citra publik pengelolaan pendidikan.

Undang-undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional merupakan dasar hukum penyelenggaraan dan reformasi sistem pendidikan nasional. Undang-undang tersebut memuat visi, misi, fungsi dan tujuan pendidikan nasional, serta strategi pembangunan pendidikan nasional untuk mewujudkan pendidikan yang bermutu, relevan dengan kebutuhan masyarakat dan berdaya saing dalam kehidupan global. Untuk itu diperlukan adanya perencanaan dan manajemen pembangunan pendidikan secara baik bagi setiap pengelola dan pelaksana pendidikan.

Tantangan yang dihadapi oleh sekolah sebagai salah satu bagian ruang kota semakin berat. Pada satu sisi, secara kuantitas sekolah harus menjawab kebutuhan masyarakat yang senantiasa tumbuh dan secara kualitas sekolah dituntut mampu memfasilitasi kegiatan belajar dengan standar yang terus meningkat. Pada sisi lain, sekolah harus "bersaing" dengan berbagai kepentingan dan aktivitas lain dalam penggunaan lahan. Sebagai konsekuensi pertumbuhan dan perkembangan penduduk dan kota, demografi mengalami perubahan dan kebutuhan ruang terus meningkat. Hal ini memicu terjadinya pelanggaran master plan dan perubahan tata guna lahan sehingga sedikit banyak mempengaruhi lingkungan sekolah. Setidaknya ada tiga permasalahan yang dihadapi sekolah terkait dengan lokasi dan ruang:

1. Jangkauan pelayanan: di satu sisi, terdapat wilayah yang belum "terjangkau" oleh sekolah, tapi di sisi lain terdapat juga wilayah yang mengalami overlap pelayanan sekolah. Lokasi sekolah dan jarak yang jauh menambah beban transportasi baik bagi kota maupun bagi warga sekolah.
2. Pola distribusi: kesenjangan (yang besar) antarwilayah dalam rasio jumlah penduduk usia sekolah dengan jumlah unit sekolah, ketidakseimbangan antara kapasitas dan kebutuhan, serta keterbatasan lahan untuk pengembangan dan pembangunan sekolah.
3. Kondisi lingkungan sekolah menjadi kurang kondusif dan memberi pengaruh sosial yang tidak mendukung proses belajar. Intensitas penggunaan lahan yang tinggi dan beragam dapat menimbulkan konflik antar aktivitas dalam penggunaan lahan.

2.2 Hakekat Ruang

Geografi adalah ilmu yang menggunakan pendekatan holistik melalui kajian keruangan, kewilayahan, ekologi dan sistem, serta historis untuk mendeskripsikan dan menganalisis struktur pola, fungsi dan proses interelasi,

interaksi , interdependensi dan hubungan timbal balik dari serangkaian gejala kenampakan atau kejadian dari kehidupan manusia (penduduk) , kegiatan atau budidaya dengan keadaan lingkungan di permukaan bumi, sehingga dari kajian adanya persamaan dan perbedaan wilayah dalam potensi, masalah, informasi geografi lainnya, serta dapat meramalkan informasi baru atas gejala geografi untuk masa mendatang dan menyusun dalil-dalil geografi baru, serta selanjutnya dimanfaatkan untuk kesejahteraan kehidupan manusia (Alfandi 2001).

Fellmann (2006) menjelaskan bahwa tiga konsep dasar untuk memahami regions/wilayah , adalah memiliki lokasi yang bersifat relatif, memiliki sifat yang sama misalnya fisik, budaya atau organisasi, dan ketiga adalah dibatasi oleh batas wilayah yang sesuai dengan ruang lingkup pembahasan.

Hagget (2001) juga menjelaskan bahwa Region adalah satu cara stenografi untuk mendeskripsikan karakter suatu variabel dari suatu area dengan satu cara yang efisien. Salah satu jalan paling sederhana untuk membentuk suatu wilayah adalah dengan membagi satu area ke dalam beberapa zona, masing-masing yang mempunyai karakteristik tertentu yang sesuai dengan karakternya.

Hagget dalam bukunya *Geography a Global Synthesis* dikatakan bahwa terdapat tiga kata yang selalu digunakan oleh seorang geografer, yaitu 'ruang', 'lokasi' dan 'tempat', perlu dipastikan bagaimana kata-kata tersebut digunakan. Ruang berarti luas atau daerah, biasanya dinyatakan dalam jangka waktu permukaan bumi. Lokasi berarti posisi tertentu dalam ruang, biasanya posisi di permukaan bumi. Tempat juga berarti posisi tertentu pada permukaan bumi, tetapi berbeda dengan lokasi, tidak digunakan dalam pengertian abstrak tetapi terbatas pada lokasi yang diidentifikasi yang kita memberikan nilai-nilai tertentu. Jadi lokasi menjadi tempat setelah diidentifikasi dengan informasi tertentu. Kadang-kadang menunjukkan fakta

fisik. Misalnya lintang dan bujur adalah lokasi abstrak yang kita hanya mengakui sebagai tempat setelah kita tahu itu menggambarkan posisi.

Analisis keruangan (*spatial analysis*) adalah salah satu pendekatan yang dikenal dalam melakukan telaah persebaran berbagai fenomena yang berkaitan dengan aspek ruang. Ada dua konsep yang dikenal dalam analisis keruangan, yaitu konsepsi yang berkaitan dengan teori matematik dari proses keruangan, dan pola keruangan (*spatial pattern*). Secara matematik proses keruangan lazim digambarkan dalam suatu struktur, yang menggambarkan variable serta hubungan antar variable. Sedangkan pola keruangan adalah gambaran persebaran suatu gejala diatas permukaan bumi yang lazim disajikan dalam bentuk peta. Analisis keruangan yang menampilkan pola keruangan di dalam peta, dapat disajikan baik dalam bentuk geometrik, maupun non geometrik. Gagasan yang dituangkan pada peta dalam penelitian non-metrik merupakan informasi ruang yang menjelaskan lokasi relatif seperti persebaran sumber daya alam (SDA), dinamika persebaran penyakit, kegiatan ekonomi, kejadian kriminalitas, pencemaran lingkungan, kesesuaian wilayah dan lain-lain (Rahardjo 2006).

Lokasi akan memberikan penjelasan lebih jauh tentang tempat atau daerah yang bersangkutan. Pada studi geografi, lokasi merupakan variabel yang dapat mengungkapkan berbagai hal tentang gejala yang kita pelajari. Tidak akan dapat mengabstrasikan lebih jauh bagaimana karakteristik ruang sebelum dideskripsikan tentang lokasi. Lokasi suatu benda atau suatu gejala dalam ruang dapat menjelaskan dan dapat memberikan kejelasan pada benda atau gejala geografi yang bersangkutan secara lebih jauh lagi. Masalah atau persoalan yang berkenaan dengan asosiasi gejala dengan gejala lain, dengan ditunjukkan lokasinya, sudah memberikan prespektif sebelum analisis lebih lanjut. Lokasi dalam ruang dapat di bedakan antara lokasi absolut dengan lokasi relatif (Hagget, 1968). Lokasi absolut suatu tempat atau suatu wilayah, yaitu lokasi yang berkenaan dengan posisinya menurut garis lintang dan garis bujur atau berdasarkan atau berdasarkan jaring-jaring derajat. Lokasi absolut

suatu tempat atau suatu wilayah dapat dibaca pada peta. Dengan dinyatakan lokasi absolut suatu tempat atau suatu wilayah, karakteristik tempat yang bersangkutan sudah dapat diabstraksikan lebih jauh. Sekurang – kurangnya posisi dan iklimnya sudah dapat kita perhitungkan. Untuk memperhitungkan karakteristiknya lebih jauh lagi, harus diketahui tentang lokasi relatifnya.

Lokasi relatif suatu tempat atau wilayah yang bersangkutan berkenaan dengan hubungan tempat berkenaan dengan hubungan tempat atau wilayah itu dengan faktor alam atau faktor budaya yang ada disekitarnya. Jadi, lokasi relatif ini ditinjau dari posisi suatu tempat atau terhadap kondisi wilayah – wilayah yang ada disekitarnya. Lokasi relatif ini dapat mengungkapkan dinamika wilayah yang bersangkutan (Fellman, 2006).

Lokasi relatif suatu tempat memberikan gambaran tentang keterbelakangan, perkembangan, dan kemajuan wilayah yang bersangkutan bila dibandingkan dengan wilayah lain yang ada di sekitarnya, dan dapat mengungkapkan pula mengapa kondisinya demikian. Selanjutnya lokasi ini dapat pula ditinjau dari situasi dan sitenya. Yang dimaksud dengan site adalah semua sifat atau karakter internal dari suatu daerah tertentu. Kota yang berlokasi di dataran tinggi, sifat dataran tinggi atau dataran tinggi itu sendiri adalah site dari kota yang bersangkutan. Sedangkan yang dimaksud dengan situasi adalah lokasi relatif dari tempat atau wilayah yang bersangkutan (Sumaadmadja,1988).

Berkenaan dengan lokasi suatu gejala, suatu masalah atau suatu tempat, kedua variabel diatas yaitu site dan situasi, dapat memberikan deskripsi dan penjelasan tentang gejala, masalah dan tempat yang bersangkutan. Interalasi keruangan variabel tadi terhadap suatu lokasi, dapat mengungkapkan karakter benda atau gejala yang berlokasi pada ruang yang bersangkutan. Penentuan pendistribusian pusat pelayanan dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu (Agustin, 2006)

1. Faktor manusia yang akan menggunakan pusat-pusat pelayanan tersebut. Faktor manusia ini menyangkut pertimbangan-pertimbangan mengenai jumlah penduduk yang akan menggunakan pelayanan tersebut, kepadatan penduduk, status sosial ekonomi masyarakat, nilai-nilai potensi masyarakat, pola kebudayaan, dan antropologi.
2. Faktor lingkungan dimana manusia tersebut melaksanakan kegiatan kehidupannya. Ini menyangkut pertimbangan skala lingkungan dalam arti fungsi dan peranan sosial ekonominya, jaringan pergerakan, letak dan kondisi geografis lingkungan serta letak keterpusatan lingkungan. Dalam hal ini dapat pula ditinjau dari karakteristik fisik wilayah .

2.3 Standar Lokasi Pendidikan

UU No 20 tahun 2003 meninjau dari faktor usia, membagi 3 tahapan pendidikan dalam 3 jenjang yaitu pendidikan dasar, menengah dan tinggi. Pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah. Pendidikan menengah merupakan lanjutan pendidikan dasar. Pendidikan tinggi merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah.

Untuk memenuhi kebutuhan akan fasilitas pendidikan sesuai dengan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional harus memperhatikan fasilitas yang dibutuhkan dan disesuaikan dengan keadaan masyarakat yang menjadi targetnya. Menurut Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No. 378/KPTS/ 1987, yaitu :

1. Taman Kanak-kanak yaitu fasilitas yang paling dasar yang diperuntukkan bagi anak-anak usia 5-6 tahun.
2. Sekolah Dasar, yaitu fasilitas pendidikan yang disesuaikan untuk anak-anak usia antara 5 – 6 tahun
3. Sekolah Menengah Pertama, yaitu fasilitas pendidikan yang berfungsi sebagai sarana untuk melayani anak-anak lulusan Sekolah Dasar

4. Sekolah Menengah Umum , yaitu fasilitas pendidikan yang berfungsi sebagai sarana untuk melayani anak-anak lulusan Sekolah Menengah Pertama.

Standar yang sering digunakan sebagai acuan untuk perencanaan fasilitas pendidikan diantaranya adalah Standar Cipta Karya dari Departemen Pekerjaan Umum, Standar Departemen Dalam Negri, Standar DTK DKI Jakarta dan Standar Departemen Pendidikan Nasional. Dalam standar-standar tersebut sebagian hanya menggunakan jumlah penduduk dan luasan lahan tiap unit sebagai indikator dalam menentukan kebutuhan sekolah. Namun demikian Chappin (1995), menyatakan bahwa standar umum seperti yang disebutkan tersebut dalam dijadikan titik awal dalam menentukan standar yang lebih bersifat lokal. Sehingga standar ini dalam penerapannya harus disesuaikan dengan kondisi, situasi dan karakteristik khusus dari daerah dimana fasilitas itu diadakan. Selain standar-standar tersebut ada juga standar yang memberikan kriteria selain jumlah penduduk yang dilayani, contohnya pada standar lokasi sekolah yang dinyatakan oleh De Chiara dan Koppelman (1975).

2.3.1. Standar dan Pertimbangan Distribusi Fasilitas Pendidikan

Menurut Agustin (2006) ada beberapa standar yang dapat dijadikan acuan dalam perencanaan fasilitas pendidikan, antara lain adalah

Tabel. 2.1 Standar Perencanaan Kebutuhan Sarana Pendidikan Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum.

Jenis Sarana	Jumlah Penduduk Pendukung (jiwa)	Jarak	Luas Lahan
Sekolah Dasar (SD)	1600	Mudah dicapai dengan radius pencapaian maksimum 1000 m, dihitung dari unit terjauh	2000 m ²
Sekolah Menengah Pertama (SMP)	4800	Radius maksimum 1000 m	9000 m ²
Sekolah Menengah Atas (SMA)	48000	Radius maksimum 3 km dari unit yang dilayani	a. 1 lantai 12.500 m ² b. 2 lantai 8000 m ² c. 3 lantai 5000 m ²

Sumber : Penyempurnaan terhadap standar Perencanaan Kebutuhan Sarana Pendidikan Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum, Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan Sederhana Tidak Bersusun di Daerah Perkotaan tahun 1979

2.3.2. Standar Perencanaan Kebutuhan Sarana Kota Cipta Karya Untuk Perumahan Sederhana

Pada standar ini struktur pemerintahan yang dipergunakan berdasarkan pada jumlah penduduk kelurahan (30.000 jiwa), kecamatan (120.000 jiwa). Sedangkan pola persebaran penduduknya adalah RT (250 jiwa), RW (2500 jiwa).

Tabel 2.2 Standar Perencanaan Kebutuhan Sarana Kota Cipta Karya untuk Perumahan Sederhana

Jenis Sarana Kota	Jumlah Penduduk	Luas tiap Unit (m ²)
TK	1000	800
SD	1600	1800
SMP	6000	2400
SMA	6000	2400

Sumber : Keputusan Menteri PU no.20 /KPTS/ 1986 tentang Pedoman Tehnik Pembangunan Perumahan Sederhana Tidak Bersusun.

2.3.3 Standar Perencanaan Kebutuhan Sarana Kota Departemen Dalam Negri

Struktur pemerintahan yang digunakan dalam standar ini didasarkan pada jumlah penduduk kelurahan (30.000 jiwa), kecamatan (200.000 jiwa) dan pola persebaran penduduknya adalah Rt (250 jiwa) dan Rw (3000 jiwa).

Tabel 2.3 Standar Perencanaan Kebutuhan Sarana Kota Departemen Dalam Negri

Jenis Sarana Kota	Jumlah Penduduk Pendukung (jiwa)	Luas Tiap Unit (m ²)
TK	750	500
SD	3000	4000
SMP	30.000	9600
SMTA	30.000	9600

Sumber : Direktorat Tata Guna Tanah Ditjen Agraria Depdagri Atlas DKI Jakarta Raya Tanah dan kegiatan Pembangunan PUBI No 214 tahun 1982 dalam LPPWK (1993)

2.3.4 Standar Dinas Tata Kota (DTK) DKI Jakarta

Standar ini menggunakan struktur pemerintahan berdasarkan jumlah penduduk kelurahan (30.000 jiwa), kecamatan (200.000), wilayah (1,5 juta jiwa), dengan persebaran penduduk yang menjadi acuan adalah Rt (250 jiwa), Rw (2500 jiwa), sub distrik (5000 jiwa), kelurahan (30.000 jiwa), distrik (50.000 jiwa), kecamatan (200.000 jiwa), sub wilayah (480.000 jiwa), wilayah (1 juta jiwa)

Tabel 2.4. Standar Fasilitas Pendidikan Dinas Tata Kota DKI Jakarta

Jenis Sarana Kota	Jumlah Penduduk Pendukung (jiwa)	Luas tiap unit < 200 jiwa/ha	Luas tiap unit 200 – 400 jiwa/ha	Luas tiap unit > 400 jiwa/ha
TK	750	500	425	350
SD	1500	3000	2550	2100
SMTp	4000	4000	3400	2800
SMTA	4000	4000	3400	2800

Sumber : *Buku Data dan Analisis RBWK Kecamatan-kecamatan DKI 1985-2005 dalam buku Penelitian / Penyempurnaan Standar Sarana Kota*

2.3.5 Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan Menengah Departemen Pendidikan Menengah Departemen Pendidikan Nasional

Standar Sarana dan prasarana Pendidikan Dasar dan menengah Departemen Pendidikan nasional yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.24 tahun 2007, untuk standar satuan pendidikan SMA/MA adlah sebagai berikut :

1. Satu SMA/MA memiliki minimum 3 rombongan belajar dan maksimum 27 rombongan belajar.
2. Satu SMA/MA dengan 3 rombongan belajar melayani maksimum 6000 jiwa untuk pelayanan penduduk lebih dari 6000 jiwa dapat

dilakukan penambahan rombongan belajar di sekolah yang telah ada atau pembangunan sekolah baru.

Dalam hal pendistribusian fasilitas pendidikan Departemen Pekerjaan Umum dalam standar yang dikeluarkan telah menentukan pertimbangan dalam perencanaan fasilitas pendidikan yaitu (Iskandar 2009) :

1. Jumlah penduduk pendukung yang akan dilayani
2. Struktur penduduk menurut kelompok umur dan jenis kelamin untuk menentukan jenis dan tipe sekolah
3. Pertumbuhan dan perkembangan penduduk
4. Keadaan Sosial ekonomi penduduk

2.3.6. Standar dan Ketentuan mengenai Daerah Layanan Fasilitas Pendidikan SMA

Dalam standar dan prasarana menurut Departemen Pendidikan Nasional hanya memberikan batasan jarak sebagai kriteria layanan untuk daerah terpencil saja, sedangkan untuk kondisi umum tidak dijelaskan. Oleh karena itu standar sarana dan prasarana fasilitas pendidikan dari Departemen Pendidikan Nasional sebelumnya masih layak digunakan (Iskandar,2009). Dalam standar Fasilitas Pendidikan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan ini dijelaskan kriteria lokasi fasilitas pendidikan untuk Sekolah Menengah Atas sebagai berikut :

1. Mudah dicapai dari setiap bagian kecamatan
2. Dapat dicapai oleh murid selama kurang dari 45 menit berjalan kaki
3. Jauh dari pusat keramaian (pertokoan, perkantoran, perindustrian)

Selain dari Departemen Pendidikan Nasional, standar dalam penentuan lokasi sekolah juga terdapat pada Pedoman Perencanaan Gedung Sekolah dari Departemen Pekerjaan Umum. Berdasarkan standar ini, lokasi bangunan sekolah perlu mempertimbangkan aspek-aspek :

1. Peraturan Perkotaan

Fasilitas Sekolah Menengah Umum direncanakan dengan kecenderungan perkembangan kota, Rencana Induk Kota, dan harus disetujui oleh Pemerintah Daerah setempat. Selain itu juga harus diberikan kemudahan izin dari Pemerintah Daerah setempat dalam hal kemungkinan suatu perkembangan dari kegiatan pendidikan atau penambahan luas bangunan.

2. Penduduk

Kepadatan dan potensi penduduk (prosentase penduduk usia sekolah) harus mendukung kegiatan pendidikan sehingga hal ini selain akan menentukan lokasi sekolah juga dapat menentukan jenis dan tipe sekolah.

3. Radius Pencapaian

Radius Pencapaian ditentukan oleh jarak apai/ tempuh , faktor usia, kemampuan fisik siswa dan sarana transportasi. Radius pencapaian dari sekolah menengah umum ditentukan maksimum 5 km atau 1 jam berjalan kaki. Lokasi harus dihindarkan dari lalu lintas kepadatan tinggi untuk menghindari kecelakaan dan kemacetan.

4. Keadaan Lingkungan

Keadaan lingkungan sangat menentukan lokasi pembangunan fisik sekolah, lingkungan dibedakan dalam lingkungan alami, yaitu geografi/ topografi, klimatologi, serta flora dan fauna, serta lingkungan buatan seperti prasarana, bangunan dan lingkungan masyarakat (sosial budaya dan sosial ekonomi) syarat lokasi bangunan sekolah terhadap lingkungan akan tercapainya kenyamanan, ketenangan dan keamanan.

2.3.7 Standar Lokasi Sekolah menurut De Chiara dan Koppelman

Dalam bukunya yang berjudul *Urban Planning and Design Criteria*, dikemukakan kriteria umum penempatan fasilitas pendidikan yaitu meliputi daerah jangkauan, karakteristik disain, dan lokasi yang dianjurkan pada tiap tingkat pendidikan (Tabel 2.5)

Agar fasilitas pendidikan dapat dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat maka faktor lokasi dimana fasilitas itu berada menjadi sangatlah penting. Penentuan lokasi fasilitas pendidikan menurut Golany (1976) perlu memperhatikan beberapa faktor, diantaranya adalah usia siswa dan jarak dari tempat tinggal, dimana semakin muda usia siswa semakin dekat jarak dari sekolah ke tempat tinggalnya.

Kemudian menurut De Chiara dan Koppelman (1975) suatu sekolah menengah yang merupakan kombinasi antara sekolah dan taman komunitas sebaiknya diletakkan di tengah-tengah lingkungan perumahan untuk memudahkan akses. Lebih lanjut De Chiara mengungkapkan standar aksesibilitas untuk sekolah menengah yaitu masih dapat ditempuh dengan berjalan kaki dengan jarak maksimum antara 1 – 1,5 mile (1,6 – 2,4 km) sedangkan bila menggunakan kendaraan bermotor maksimum 2,5 mile (4 km).

Tabel 2.5 Kriteria Umum Penempatan Fasilitas Pendidikan Menurut De Chiara dan Koppelman

Jenis	Daerah Jangkauan	Karakteristik Desain	Lokasi
Elementery School (SD)	$\frac{1}{4}$ - $\frac{1}{2}$ mile (400 – 800 m)	Harus dapat diakses dengan berjalan kaki dari perumahan tanpa menyeberangi jalan. Jika ada jalan yang harus diseberangi, jalan tersebut harus jalan lokal	Dekat dengan kawasan permukiman dan fasilitas umum lainnya
Junior High School (SMP)	$\frac{1}{2}$ - $\frac{3}{4}$ mile (800 – 1200 m)	Harus jauh dari jalan arteri primer, dan harus tersedia jalan setapak dari area lain	Dekat dengan konsentrasi perumahan atau dekat dengan pusat permukiman
Senior High Shool (SMA)	$\frac{3}{4}$ - 1 mile (1200-1600 m)	Harus dekat dengan kawasan taman dan jauh dari kebisingan	Terletak di pusat untuk memudahkan akses dan dekat dengan fasilitas umum lainnya.

Sumber : Chiara, 1975

2.4 Nilai Rata-rata Ujian Nasional (UN)

Salah satu hal yang harus mendapat perhatian oleh seluruh komponen bangsa adalah bagaimana meningkatkan mutu atau kualitas pendidikan dalam menghadapi era globalisasi. Kita sadar bahwa dalam era globalisasi terjadi yang namanya dunia tanpa batas, yang akan berlangsung persaingan yang sangat ketat dalam berbagai segi kehidupan. Sumber daya manusia yang tidak bermutu akan tergilas, dan akan tersisih dari dunia kerja. Berbagai usaha telah

dilakukan oleh pemerintah, dalam hal ini Departemen Pendidikan Nasional, untuk dapat meningkatkan mutu pendidikan, misal dengan mengusahakan terbentuknya standar nasional pendidikan, mengadakan akreditasi terhadap penyelenggaraan pendidikan, mengadakan sertifikasi pada guru dan tenaga kependidikan dan mengadakan Ujian Akhir Nasional (Soeprapto,LPPKB,2009)

Ujian Nasional (UN) sesungguhnya hanya salah satu sarana untuk melakukan penilaian serta untuk mengetahui apakah rumusan tujuan pendidikan yang diterjemahkan ke dalam kurikulum dapat dicapai atau tidak. Ibarat sebuah produk, UN dapat dikategorikan sebagai *tools* untuk mengukur mutu produk (*standard of quality assurance*). Ukuran tersebut harus bisa berlaku umum. Jadi, ujian merupakan penerapan *quality control management* dalam dunia pendidikan. Dalam konteks ini UN tidak hanya berfungsi untuk menentukan standar kelulusan, tetapi juga untuk mengukur mutu pendidikan secara merata di tingkat nasional. Selain itu, UN juga dapat menjadi instrumen evaluasi dalam penyelenggaraan pendidikan secara menyeluruh terhadap sekolah, guru, siswa, serta sarana/prasarana, termasuk rancang bangun kurikulum. Dengan cara tersebut, sekolah, guru, orang tua murid, dan komite sekolah dapat secara bersama-sama menyusun strategi tindak lanjut untuk perbaikan dan penyempurnaan program pendidikan dan pengajaran serta strategi pelaksanaannya. Tentunya kegagalan para siswa dalam mencapai hasil belajar tak dapat dipandang sebagai kegagalan siswa semata, tetapi lebih komprehensif dari segi pengajaran yang diberikan atau mungkin kesalahan strategi dalam melaksanakan program, terbatasnya fasilitas yang dimiliki, serta mungkin kinerja tenaga pendidik berkualitas rendah (AM Masyhuri, MP3A, 2004).

Dua faktor yang dapat menjelaskan mengapa upaya perbaikan mutu pendidikan selama ini kurang atau tidak berhasil. Pertama strategi pembangunan pendidikan selama ini lebih bersifat *input oriented*. Strategi

yang demikian lebih bersandar kepada asumsi bahwa bilamana semua input pendidikan telah dipenuhi, seperti penyediaan buku-buku (materi ajar) dan alat belajar lainnya, penyediaan sarana pendidikan, pelatihan guru dan tenaga kependidikan lainnya, maka secara otomatis lembaga pendidikan (sekolah) akan dapat menghasilkan output (keluaran) yang bermutu sebagai mana yang diharapkan. Ternyata strategi input-output yang diperkenalkan oleh teori *education production function* (Hanushek, 2006) tidak berfungsi sepenuhnya di lembaga pendidikan (sekolah), melainkan hanya terjadi dalam institusi ekonomi dan industri. Kedua, pengelolaan pendidikan selama ini lebih bersifat *macro-oriented*, diatur oleh jajaran birokrasi di tingkat pusat. Akibatnya, banyak faktor yang diproyeksikan di tingkat makro (pusat) tidak terjadi atau tidak berjalan sebagaimana mestinya di tingkat mikro (sekolah). Atau dengan singkat dapat dikatakan bahwa kompleksitasnya cakupan permasalahan pendidikan, seringkali tidak dapat terpikirkan secara utuh dan akurat oleh birokrasi pusat (Umaedi, M.Ed,1999)

Peraturan Pemerintah RI No 19 tahun 2005 Tentang Standar Pendidikan Nasional dalam babV Pasal 25 disebutkan bahwa standar kompetensi lulusan digunakan sebagai pedoman penilaian dalam penentuan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan. Pasal 26 menyebutkan bahwa standar kompetensi pada satuan pendidikan menengah umum bertujuan untuk meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, ahlak mulia,serta ketrampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. Standar nasional pendidikan (SNP) berfungsi sebagai dasar dalam perencanaan dan pengawasan pendidikan dalam rangka mewujudkan Pendidikan Nasional yang bermutu. Untuk penjaminan dan pengendalian mutu pendidikan telah diterbitkan antara lain Peraturan Menteri Pendidikan No. 23 tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

Tantangan yang dihadapi oleh sekolah sebagai salah satu bagian ruang kota semakin berat. Pada satu sisi, secara kuantitas sekolah harus menjawab kebutuhan masyarakat yang senantiasa tumbuh dan secara kualitas sekolah dituntut mampu memfasilitasi kegiatan belajar dengan standar yang terus meningkat. Pada sisi lain, sekolah harus "bersaing" dengan berbagai kepentingan dan aktivitas lain dalam penggunaan lahan.

2.5 Faktor Internal Sekolah

Kondisi Internal Sekolah adalah hal-hal yang berkaitan dengan kondisi di tiap-tiap sekolah yang berkaitan dengan kualitas pendidikan, yaitu rasio kelas dan siswa, rasio guru dan siswa, jumlah ruang sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan belajar mengajar dan persentase kelulusan dari tiap-tiap SMA di Kota Depok.

2.5.1 Rasio Kelas dan Siswa

Berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan Nasional no. 24 tahun 2007 tentang standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Menengah Atas dijelaskan yang dimaksud dengan ruang kelas adalah :

- b. Fungsi ruang kelas adalah tempat kegiatan pembelajaran teori, praktek yang tidak memerlukan peralatan khusus, atau praktek dengan alat khusus yang mudah dihadirkan.
- c. Banyak minimum ruang kelas sama dengan banyak rombongan belajar
- d. Kapasitas maksimum ruang kelas adalah 32 peserta didik
- e. Rasio minimum luas ruang kelas 2 m²/ peserta didik untuk rombongan belajar dengan peserta didik kurang dari 15 orang, luas minimum ruang kelas 30 m², lebar minimum ruang kelas 5 m

- f. Ruang kelas memiliki fasilitas yang memungkinkan pencahayaan yang memadai untuk membaca buku dan untuk memberikan pandangan ke luar ruangan
- g. Ruang kelas memiliki pintu yang memadai agar peserta didik dan guru dapat segera keluar ruangan jika terjadi bahaya dan dapat dikunci dengan baik saat tidak digunakan.

2.5.2 Rasio Guru dan Siswa

Menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 7 tahun 2010, disebutkan bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Rasio murid per guru didefinisikan sebagai perbandingan antara jumlah murid dengan jumlah guru pada jenjang pendidikan tertentu. Untuk mengetahui rata-rata jumlah guru yang dapat melayani murid di suatu sekolah atau daerah tertentu. Jika rasio tinggi, ini berarti satu orang tenaga pengajar harus melayani banyak murid. Banyaknya murid yang diajarkan akan mengurangi daya tangkap murid pada pelajaran yang diberikan atau mengurangi efektivitas pengajaran.

Secara nasional Indonesia tidak kekurangan guru. Rasio guru dengan siswa yang ada 1: 20. Angka tersebut lebih baik dari rasio luar negeri seperti Korea Selatan (Korsel) 1:35. Hanya saja, penyebaran tenaga guru di sejumlah daerah yang tidak merata. Hal ini disebabkan karena distribusi yang tidak pas. Guru menumpuk di sekolah atau di daerah-daerah tertentu. Kesulitan distribusi pemerataan itu karena kendala di lapangan seperti infrastruktur yang belum terbangun dengan baik dan geografis suatu wilayah yang sulit dijangkau (Menteri Pendidikan Nasional, 2005).

2.5.3 Ruang Sarana Penunjang

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam pengadaan sarana dan prasarana pendidikan sesuai dengan Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 24 tahun 2007 tentang Standar Sarana Prasarana untuk Sekolah Menengah Atas /Madrasah Aliyah (SMA/MA).

1. Satu SMA/MA memiliki minimum 3 rombongan belajar dan maksimum 27 rombongan belajar.
2. Bangunan gedung menyediakan fasilitas dan aksesibilitas yang mudah, aman dan nyaman .
3. Sebuah SMA sekurang-kurangnya memiliki prasarana sebagai berikut : ruang kelas, perpustakaan , laboratorium biologi, laboratorium fisika, laboratorium kimia, laboratorium komputer, laboratorium bahasa, ruang pimpinan, ruang guru, ruang tata usaha, tempat ibadah, ruang konseling, ruang UKS, ruang OSIS , ruang sirkulasi, jamban, gudang , tempat olah raga.

2.6. Karakteristik Wilayah

Karakteristik adalah sifat yang khas membedakan sesuatu dengan yang lain, sifat khas yang menyebabkan sesuatu yang tidak menentu menjadi unik, sifat khas ini bisa dibedakan, determinasi riil dan determinasi konsep, dan ini tergantung apakah sesuatu hal itu khusus atau tidak dalam tekanan ekstra mental atau dalam pikiran, berbicara mengenai karakteristik bilamana determinasi konseptual mengandalkan sesuatu dalam arti tertentu, determinasi lokasional (Dagun ,2000) .

Kondisi wilayah yang mendukung kualitas pendidikan dapat ditinjau dari kondisi lingkungan yang ada disekitar sekolah. Tertuang dalam peraturan Menteri Pendidikan No 24 tahun 2007 Tentang Standar Sarana Prasarana untuk Sekolah Menengah Atas . Berdasarkan standar sarana dan prasarana

Sekolah Menengah Atas (SMA) yang tercantum dalam Peraturan Menteri Pendidikan no 24 tahun 2007 Bab IV minimum satu SMA disediakan untuk satu Kecamatan.

2. 6. 1. Jumlah Penduduk Usia Sekolah

Jumlah dan persebaran penduduk usia sekolah merupakan faktor yang sangat penting sebagai dasar pertimbangan di dalam memperkirakan kebutuhan sekolah, guru, ruang kelas maupun fasilitas penunjang lainnya, di masa sekarang maupun yang akan datang. Perubahan penggunaan tanah pada suatu wilayah dapat menimbulkan perubahan jumlah penduduk, termasuk penduduk usia sekolah maupun murid pada wilayah tersebut. Apabila jumlah penduduk usia sekolah maupun jumlah murid berubah, dapat berarti pula akan terjadi perubahan pada kebutuhan jumlah sekolah, guru, ruang kelas dan fasilitas penunjang lainnya.

Wilayah pengembangan pendidikan SMA ditinjau dari jumlah penduduk usia SMA yaitu 15 – 19 tahun di tiap kecamatan , dalam mengevaluasi bidang pendidikan perlu mengetahui kondisi penduduk karena hal ini memberikan informasi betapa pentingnya kebijakan kependudukan harus terintegrasi dengan kebijakan pendidikan sehingga diperoleh sumber daya manusia yang berkualitas yang merupakan asset bagi suatu wilayah.

2.6.2 Angka Partisipasi Sekolah

Angka Partisipasi Sekolah (APS), secara umum merupakan proporsi jumlah penduduk yang sedang bersekolah pada satu jenjang pendidikan terhadap jumlah penduduk usia sekolah yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut. Angka partisipasi sekolah digunakan untuk mengukur keberhasilan program pembangunan penduduk yang diselenggarakan dalam rangka memperluas kesempatan bagi penduduk untuk mengenyam pendidikan (Mustika, 2009). Tujuan dari Angka Partisipasi Sekolah adalah untuk mengukur penyerapan penduduk usia sekolah oleh sektor pendidikan. Angka

partisipasi sekolah merupakan ukuran daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. Angka tersebut memperhitungkan adanya perubahan penduduk terutama usia muda. Ukuran yang banyak digunakan di sektor pendidikan seperti pertumbuhan jumlah murid lebih menunjukkan perubahan jumlah murid yang mampu ditampung di setiap jenjang sekolah. Sehingga, naiknya persentase jumlah murid tidak dapat diartikan sebagai semakin meningkatnya partisipasi sekolah. Kenaikan tersebut dapat pula dipengaruhi oleh semakin besarnya jumlah penduduk usia sekolah yang tidak diimbangi dengan ditambahnya infrastruktur sekolah serta peningkatan akses masuk sekolah sehingga partisipasi sekolah seharusnya tidak berubah atau malah semakin rendah .

2.6.3 Penggunaan Tanah Permukiman

Pertumbuhan permukiman merupakan dampak semakin padatnya aktivitas yang terjadi di pusat kota. Kecenderungan perkembangan kota membawa konsekuensi meningkatnya aktivitas penduduk (*demand*) yang membutuhkan pelayanan (*supply*) berupa fasilitas sebagai pendukung. Fasilitas merupakan aspek vital dalam kehidupan suatu kota, karena tanpa ketersediaan fasilitas yang cukup atau seimbang antara kebutuhan dengan pemenuhan, dapat mengakibatkan terganggunya aktivitas kota, atau bahkan dapat mempengaruhi perkembangan kota itu sendiri. Fasilitas menjadi sangat penting karena keberadaannya dapat mempengaruhi pembangunan kembali suatu kota dari keadaan yang terburuk (Yeates dan Garner, 1980).

Terdapat dua alasan yang menyebabkan perencanaan fasilitas sosial menjadi penting dilakukan, yaitu dilihat dari perspektif penggunaan sosial dan perspektif pasar. Dilihat dari sisi perspektif penggunaan sosial, fasilitas sosial direncanakan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sebagai pelengkap kegiatan/ aktivitas masyarakat.

Sedangkan dari sisi perspektif pasar, fasilitas umum direncanakan untuk meningkatkan kualitas area/ wilayah. Hal ini disadari bahwa tanpa

adanya penyediaan fasilitas sosial pada suatu wilayah, maka mengakibatkan wilayah tersebut mempunyai nilai lahan yang rendah sehingga tidak menarik para investor untuk menggunakan kawasan tersebut bagi kegiatan usahanya, begitu pula sebaliknya (Chapin, 1957).

2. 7. Teori Pengembangan Wilayah

Konsep pengembangan wilayah dikembangkan dari kebutuhan suatu daerah untuk meningkatkan fungsi dan perannya dalam menata kehidupan sosial, ekonomi, budaya, pendidikan dan kesehateraan masyarakat. Pengaruh globalisasi, pasar bebas dan regionalisasi menyebabkan terjadinya perubahan dan dinamika spasial, sosial, dan ekonomi antar negara, antar daerah (kota/kabupaten), kecamatan hingga perdesaan (Putra, 2009).

Ada banyak teori pengembangan wilayah yang dapat dijadikan acuan dalam rangka penataan ruang. Kelompok pertama adalah teori yang memberi penekanan kepada kemakmuran wilayah (*local prosperity*). Kelompok kedua menekankan pada sumberdaya lingkungan dan faktor alam yang dinilai sangat mempengaruhi keberlanjutan sistem kegiatan produksi di suatu daerah (*sustainable production activity*). Kelompok ini sering disebut sebagai sangat peduli dengan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*). Kelompok ketiga memberikan perhatian kepada kelembagaan dan proses pengambilan keputusan di tingkat lokal sehingga kajian terfokus kepada *governance* yang bisa bertanggung jawab dan berkinerja bagus . Kelompok keempat perhatiannya tertuju kepada kesejahteraan masyarakat yang tinggal di suatu lokasi .

Kelompok teori tersebut tidak seluruhnya bertentangan satu dengan yang lainnya, namun dalam penggunaannya dapat dijadikan suatu sinergi. Hal ini sejalan dengan prinsip dasar yang terkandung dalam Undang-Undang Penataan Ruang yang menyatakan bahwa penataan ruang merupakan suatu

proses yang didalamnya terkandung muatan proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, serta pengendaliannya. Konsep dasar penataan ruang wilayah dan kota dengan pendekatan pengembangan wilayah pada dasarnya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjamin lingkungan hidup yang berkelanjutan dengan memperhatikan keunggulan komparatif di suatu wilayah, dan mengurangi kesenjangan pembangunan dengan mengurangi kawasan-kawasan yang miskin, kumuh dan tertinggal. Salah satu kegiatannya adalah peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap faktor-faktor produksi, pengolahan dan pemasaran, serta mendorong dan memfasilitasi masyarakat dengan sarannya. Pengembangan wilayah dilakukan menitikberatkan pada aspek ruang atau lokasi untuk mengoptimalkan sumber daya alam yang ada dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakatnya (Yunial, 2006).

Konsepsi pembangunan wilayah pada dasarnya adalah pembangunan proyek proyek berdasarkan hasil analisa data spasial (Kartono, 1989). Karena yang disajikan adalah fakta spasial maka ketersediaan peta menjadi mutlak diperlukan. Karena keseluruhan proyek berada di tingkat kabupaten/kota maka pemerintah kabupaten/kota mutlak perlu menyiapkan peta fakta wilayah dalam tema tema yang lengkap. Dalam lingkup pekerjaan inilah antara lain dituntut peran aktif para ahli geografi. Pengwilayahan data spasial untuk menetapkan proyek pembangunan disebut wilayah subyektif, sedang wilayah yang ditetapkan untuk suatu bidang kehidupan sebagai tujuan pembangunan (penetapan wilayah pembangunan) disebut wilayah obyektif. Implementasi wilayah pembangunan pada umumnya tidak sesuai dengan aspirasi masyarakat. Produk akhir dari analisis data spasial disebut “wilayah geografik” sedang cakupan ruang muka bumi yang dianalisis disebut “area/geomer/daerah”.

Pendekatan geografi dalam pengembangan wilayah paling tidak menggabungkan dua hal yang berbeda dalam substansi analisis yaitu domain

akademik dan domain birokratik. Pendekatan geografi yang telah diuraikan di atas adalah suatu pendekatan akademis yang bersifat logis dan rasional karena obyek terapananya dalam konteks ruang muka bumi yang karena sifatnya disebut wilayah. Oleh karena itu peta menjadi instrument dasar, baik pada tahap awal maupun akhir dari kegiatan pengembangan wilayah (Harmantyo, 2007).

Pembangunan wilayah dan perkotaan mempunyai prinsip dasar pembangunan dari masyarakat untuk masyarakat dan oleh masyarakat. Hal ini dapat tercapai bila proses pembangunan berakar pada kemampuan sumber daya alamnya dan kreativitas seluruh pelaku pembangunan. Terkait dengan prinsip dasar di atas, pemerintah harus mengupayakan bentuk-bentuk partisipasi yang efektif dan produktif. Pemerintah pusat dalam hal ini adalah fasilitator untuk pencapaian *community driven planning* tersebut. Dengan demikian proses pelaksanaan pengembangan wilayah dan kota diharapkan akan mencapai hasil secara efektif dengan memanfaatkan memanfaatkan sumber daya secara efisien dan ditangani melalui kegiatan penataan ruang.

2.8 Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Pendidikan Nasional tahun 2010 – 2014

Menurut Rencana Strategis pendidikan nasional strategi dan arah kebijakan pembangunan pendidikan tahun 2010 – 2014 dirumuskan berdasarkan pada RPJMN 2010 - 2014 dan evaluasi capaian pembangunan pendidikan 2009 serta komitmen pemerintah pada Konvensi Internasional untuk Semua (*Education for all*), Konvensi Hak Anak (*Convention on the Right of Child*), *Milenium Development Goal (MDGS)*, dan *World Summit on Sustainable Development*.

Strategi Pembangunan pendidikan tahun 2010-2014, adalah strategi yang merupakan upaya yang sistematis melalui pengintegrasian dari tujuan,

sasaran, kebijakan, program dan kegiatan untuk mencapai misi Departemen Pendidikan Nasional pada periode lima tahun mendatang. Strategi untuk pendidikan menengah adalah perluasan dan pemerataan pendidikan menengah bermutu, berkesetaraan gender, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat di semua Provinsi, Kabupaten dan kota dilakukan melalui :

- a. penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan menengah bermutu, yang merata antara provinsi, kabupaten dan kota yang meliputi penyediaan guru SMA yang bermutu
- b. Perluasan dan pemerataan akses pendidikan SMA bermutu, berkesetaraan gender dan relevan dengan kebutuhan masyarakat di semua provinsi, kabupaten dan kota
- c. Perluasan dan pemerataan akses pendidikan Paket C bermutu, berkesetaraan gender dan relevan dengan kebutuhan masyarakat di semua provinsi, kabupaten dan kota

2.9. Kebijakan dan Strategi Pembangunan Pendidikan Kota Depok

Kebijakan pembangunan pendidikan Kota Depok juga tidak bisa dilepaskan dari arah kebijakan pembangunan pendidikan nasional seperti tertuang di dalam Rencana Strategis Departemen Pendidikan Nasional yang menempatkan tiga tema besar yakni: perluasan dan pemerataan, peningkatan mutu dan relevansi, serta akuntabilitas, di mana ketiga tema tersebut harus tercermin di dalam program, kegiatan, sasaran, sampai kepada sistem penganggarannya.

Maka untuk perencanaan lima tahun ke depan merujuk kepada RPJMD Kota Depok dengan arah kebijakan : *meningkatkan perluasan kesempatan memperoleh pendidikan dan peningkatan kualitas pendidikan serta peranserta masyarakat dalam pendidikan*, ditetapkan kebijakan strategis sebagai berikut:

1. Kebijakan untuk mencapai visi pertama *Mengembangkan kelembagaan pendidikan*, yakni:

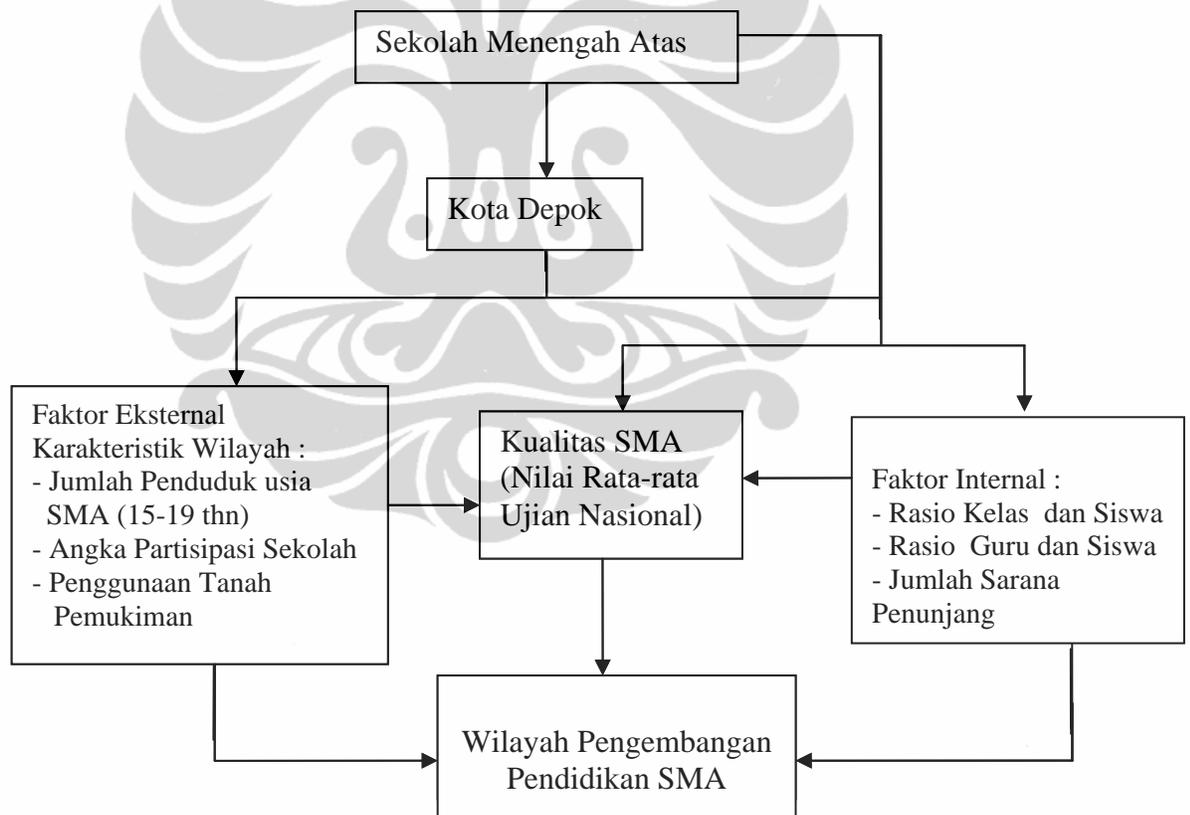
- a. Kebijakan : peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pendidikan serta peningkatan mutu lembaga pendidikan
 - b. Strategi : pembiayaan untuk operasional pendidikan dan rehabilitasi sarana/prasarana pendidikan dengan meningkatkan peran serta masyarakat.
2. Kebijakan strategis untuk mencapai visi kedua *Meningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga pendidik dan kependidikan, yakni:*
- a. Kebijakan : meningkatkan kompetensi dan profesionalitas tenaga pendidik dan kependidikan
 - b. Strategi : standarisasi kualifikasi akademis dan sertifikasi profesi bagi tenaga pendidik dan kependidikan
3. Kebijakan strategis untuk mencapai visi ketiga *Menciptakan regulasi guna terciptanya iklim pembelajaran yang bermutu, yakni:*
- a. Kebijakan : peningkatan mutu hasil pendidikan
 - b. Strategi : menciptakan regulasi bagi terlaksananya proses belajar mengajar yang kondusif dan bermutu

BAB 3

METODE PENELITIAN

3.1. Alur Pikir Penelitian

Dalam bab ini akan dibahas metode yang dilakukan dalam penelitian untuk mengetahui karakteristik wilayah sebaran lokasi SMA berdasarkan parameter kualitas dan wilayah pengembangan pendidikan SMA di Kota Depok. Secara garis besar pelaksanaan penelitian dapat dilihat pada alur penelitian di bawah ini :



Gambar 1 : Diagram Alur Pikir Penelitian

3.2. Variabel Penelitian

Variabel dalam penelitian ini adalah karakteristik wilayah yang berkaitan dengan pendidikan, kualitas pendidikan, kondisi internal tiap-tiap SMA untuk mengetahui kondisi pendidikan SMA, berikut ini adalah penjabaran dari tiap-tiap variabel :

Kualitas Pendidikan

Pencapaian hasil dari proses belajar mengajar, yang diukur dari nilai rata-rata Ujian Nasional tiap-tiap sekolah SMA di Kota Depok.

Faktor Eksternal

Faktor eksternal berkaitan dengan karakteristik wilayah yaitu fakta wilayah yang digunakan juga untuk menentukan Wilayah Pengembangan Pendidikan SMA selain kondisi internal yaitu :

- a) Jumlah penduduk usia SMA yaitu 15-19 tahun di tiap Kecamatan
- b) Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA di tiap Kecamatan
- c) Persentase penggunaan tanah pemukiman di tiap Kecamatan

Faktor Internal Sekolah

Faktor internal sekolah ditinjau dari status sekolah, jumlah siswa, tenaga pendidik (guru) dan sarana prasarana yang mendukung proses belajar mengajar, yang diukur dari :

- a) Ruang kelas : ruang kelas yang dapat menampung siswa
- b) Pelayanan guru : guru yang melayani proses belajar mengajar
- c) Ketersediaan Sarana penunjang di sekolah (laboratorium, perpustakaan, UKS, Ruang Serba Guna, Lab. Komputer)

3.3. Daerah Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kota Depok yang terdiri dari 6 Kecamatan yaitu : Sawangan, Pancoranmas, Sukmajaya, Cimanggis, Beji, Limo.

3.4. Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data dan informasi yang dibutuhkan, perlu dilakukan pengumpulan data dan informasi yang meliputi :

3.4.1. Pengumpulan Data Sekunder

Dalam penelitian ini diperlukan data SMA yang meliputi lokasi sekolah, jumlah fasilitas pendidikan eksisting, jumlah siswa SMA, jumlah ruang kelas, jumlah guru, jumlah ruang sarana penunjang, dan tingkat kelulusan di tiap-tiap SMA, Renstra Dinas Pendidikan Kota Depok. Data tersebut diperoleh dengan cara melakukan survai sekunder ke instansi-instansi terkait, yaitu Dinas Pendidikan Kota Depok.

Data jumlah penduduk usia SMA (15-19 tahun) dari Badan Pusat Statistik, data Penggunaan tanah dari Badan Pertanahan Nasional, data jaringan jalan dari Dinas Pekerjaan Umum dan data penunjang lainnya dari Bapeda Kota Depok dan Dinas Tata Kota. Data sekunder ini digunakan untuk menganalisis kondisi pendidikan SMA di Kota Depok dan menganalisis wilayah pengembangan pendidikan SMA di Kota Depok.

Data sekunder didapatkan dari hasil pendataan , registrasi, sensus dan penelitian instansi terkait, data yang diperlukan antara lain :

- a. Peta administrasi dan peta kondisi fisik Kota Depok dari Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Depok
- b. Data jumlah sekolah SMA, nilai rata-rata Ujian Nasional, jumlah siswa, jumlah ruang kelas dan jumlah guru tiap sekolah dari Suku Dinas Pendidikan Kota Depok.
- c. Data Kependudukan dari Dinas Kependudukan Kota Depok, untuk mengetahui jumlah penduduk usia SMA (15-19 thn) dan angka partisipasi sekolah di tiap Kecamatan di Kota Depok

- d. Data Penggunaan Tanah dari Badan Pertanahan Nasional Kota Depok untuk mengetahui persentase penggunaan tanah pemukiman di tiap kecamatan.

3.4.2. Pengumpulan Data Primer

Selain data sekunder tersebut diperlukan pula data primer. Data primer ini diperoleh dengan menggunakan metode survey lapang dengan menggunakan Global Position System (GPS) untuk mengidentifikasi keberadaan SMA yang berada di Kota Depok.

3.5. Pengolahan Data

Data-data yang didapat akan diolah menjadi peta-peta untuk dapat dideskripsikan sesuai dengan tujuan penelitian. Pengolahan data yang akan dilakukan antara lain :

Membuat klasifikasi data, baik data yang digunakan untuk mengetahui karakteristik wilayah sebaran lokasi SMA berdasarkan parameter kualitas SMA dan data yang digunakan untuk mengetahui wilayah pengembangan pendidikan SMA di kota Depok .

3.5.1. Data Karakteristik Wilayah Sebaran Lokasi SMA Berdasarkan Parameter Kualitas di Kota Depok

Untuk mengetahui karakteristik wilayah sebaran lokasi SMA berdasarkan parameter kualitas SMA di Kota Depok dianalisis secara spasial dan uji statistik. Variabel yang digunakan adalah Nilai rata-rata Ujian Nasional, Jumlah Penduduk Usia SMA, Angka Partisipasi SMA, Penggunaan Tanah Permukiman, Rasio Kelas dan Siswa, Rasio Guru dan Siswa, Jumlah Sarana Penunjang dan Tingkat kelulusan dari tiap-tiap SMA di Kota Depok. Kemudian dilakukan overlay peta kualitas SMA dengan peta jumlah penduduk usia sekolah, angka partisipasi sekolah, penggunaan tanah permukiman, rasio kelas dan siswa, rasio guru dan siswa, ruang sarana penunjang dan tingkat kelulusan. Membuat analisis dengan tabel matriks antara kualitas SMA dengan faktor eksternal dan internal variabel yang diteliti. Uji statistik

digunakan untuk mendukung analisis spasial , dan untuk mengetahui hubungan kualitas SMA yang dilihat dari Nilai Rata-rata Ujian Nasional dengan faktor eksternal dan faktor internal sekolah. Uji statistik antara kualitas SMA dengan jumlah penduduk usia SMA, angka partisipasi sekolah, penggunaan tanah permukiman menggunakan uji anova satu arah dan untuk mengetahui keterkaitan antara kualitas SMA dengan faktor internal yang berupa rasio kelas dan siswa, rasio guru dan siswa , ruang sarana penunjang dan tingkat kelulusan menggunakan regresi linier sederhana dan regresi berganda. Klasifikasi data yang diolah adalah data :

- a. Nilai rata-rata Ujian Nasional diklasifikasikan menjadi 3 peringkat, yaitu klasifikasi peringkat A, B, dan C. Peringkat A dengan nilai rata-rata lebih dari 7,5 . Peringkat B jika nilai rata-rata Ujian Nasional 6,5 – 7,5 dan Peringkat C jika nilai rata-rata Ujian Nasional kurang dari 6,5.
- b. Jumlah Penduduk usia SMA yaitu usia 15 – 19 tahun tiap kecamatan diklasifikasikan menjadi 3, yaitu jumlah penduduk tinggi jika lebih dari 26.000 jumlah penduduk sedang 18.000 – 26.0000, jumlah penduduk rendah jika kurang dari 18.000 jiwa per kecamatan.
- c. Angka Partisipasi Sekolah tiap kecamatan

Indikator : - Jumlah Siswa SMA di Kecamatan

- Jumlah Penduduk usia SMA (15-19 tahun)

$$APS = \frac{\text{Jumlah Siswa SMA di tiap Kecamatan}}{\text{Penduduk usia SMA (15-19) di tiap Kecamatan}} \times 100\%$$

Angka Partisipasi Sekolah diklasifikasikan menjadi 3 yaitu APS tinggi jika lebih dari 40 %, APS sedang 25%-40% dan APS rendah kurang dari 25%.

d. Penggunaan tanah dengan menghitung prosentase penggunaan tanah permukiman pada setiap kecamatan. Penggunaan Tanah Permukiman diklasifikasikan menjadi 3 yaitu Penggunaan tanah permukiman tinggi jika dalam satu kecamatan memiliki penggunaan tanah permukiman lebih dari 55 %, penggunaan tanah permukiman sedang jika dalam satu kecamatan memiliki penggunaan tanah permukiman 36% - 55% dan penggunaan tanah permukiman rendah jika dalam satu kecamatan memiliki penggunaan tanah permukiman 17% - 35%.

e. Rasio Kelas dan Siswa : Jumlah ruang kelas yang dapat ditampung siswa

Jenis data :

- Jumlah Ruang Kelas SMA
- Jumlah siswa SMA

Indikator :

Rasio Siswa dengan Ruang Kelas (RSK)

$$RSK = \frac{\text{Jumlah Siswa SMA}}{\text{Jumlah Ruang Kelas SMA}}$$

Jumlah Ruang Kelas SMA

Rasio Kelas dan Siswa diklasifikasikan menjadi 3, yaitu Rasio kelas dan siswa diatas standar jika dalam satu kelas terdapat 7 - 19 siswa, Rasio Kelas dan Siswa sesuai standar jika dalam satu kelas terdapat 20 – 32 siswa, dan Rasio kelas dan siswa dibawah standar jika dalam satu kelas terdapat lebih dari 32 siswa.

f. Rasio Guru dan Siswa :Perbandingan jumlah guru dengan jumlah siswa di setiap SMA di Kota Depok

Jenis data :

- Jumlah Siswa SMA
- Jumlah Guru SMA

Indikator :

Rasio Siswa dengan guru (RSG)

$$RSG = \frac{\text{Jumlah Siswa SMA}}{\text{Jumlah Guru SMA}}$$

Jumlah Guru SMA

Rasio Kelas dan Siswa diklasifikasikan menjadi 3, yaitu Rasio guru dan siswa diatas standar jika satu orang guru melayani 2 - 14 siswa, Rasio guru dan siswa sesuai standar jika satu orang guru melayani 15 – 20 siswa, dan Rasio guru dan siswa dibawah standar jika satu orang guru melayani lebih dari 20 siswa.

d. Kelengkapan Ruang Sarana Penunjang

Jenis data : Jumlah ruang prasarana tiap SMA yang berupa laboratorium IPA yang terdiri dari ketersediaan laboratorium biologi, fisika, kimia, bahasa, komputer, unit kesehatan sekolah (UKS), ruang ketrampilan, ruang serbaguna dan laboratorium bidang studi IPS.

Jumlah sarana penunjang diklasifikasikan menjadi 3 yaitu Ruang Sarana Penunjang lengkap jika satu sekolah memiliki lebih dari 8 ruang sarana penunjang, kurang lengkap jika satu sekolah memiliki 5 – 8 ruang sarana penunjang dan tidak lengkap jika dalam satu sekolah terdapat kurang dari 5 ruang sarana penunjang kegiatan belajar mengajar.

3.5.2 Uji Statistik

Untuk mencari keterkaitan antara kualitas SMA dengan faktor eksternal dan faktor internal dari tiap-tiap sekolah digunakan uji anova satu arah untuk menganalisis varian kualitas SMA dari karakter wilayah yang berbeda-beda. Dan untuk mengetahui hubungan kualitas SMA dengan faktor internal setiap sekolah digunakan korelasi bivariat dan multivariat. Rumus statistik yang digunakan adalah :

1. Uji Anova Satu Arah

Analisis variansi adalah suatu prosedur untuk uji perbedaan mean beberapa populasi (lebih dari dua).

Hipotesis Anova satu arah

$H_0 : \mu_1 = \mu_2 = \mu_3 = \dots = \mu_k$

H_a : Paling sedikit ada satu rata-rata yang berbeda

2. Uji Hipotesis

a. Uji Keberartian Regresi

Uji keberartian regresi ini dilakukan untuk memperkirakan hubungan yang terjadi antara variabel X dan variabel Y dengan kriteria pengujian bahwa regresi sangat berarti apabila F_{hitung} lebih besar dari F_{tabel} .

Dengan hipotesis statistika :

$H_i : \beta \neq 0$

$H_o : \beta = 0$

Kriteria pengujian keberartian regresi adalah :

Tolak H_o jika $F_{hitung} > F_{tabel}$, maka regresi berarti ada hubungan linier.

5. Regresi Berganda

Untuk mengetahui kaitan kualitas sekolah dengan semua variabel internal digunakan metode regresi berganda dengan menggunakan rumus :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3$$

3.5.3 Wilayah Pengembangan Pendidikan SMA di Kota Depok

Untuk mengetahui wilayah pengembangan pendidikan SMA digunakan 7 variabel yaitu :

- Jumlah Penduduk usia SMA yaitu usia 15 – 19 tahun tiap kecamatan, wilayah yang memiliki jumlah penduduk SMA tinggi menjadi prioritas utama dalam pengembangan pendidikan
- Angka Partisipasi Sekolah tiap kecamatan, wilayah yang memiliki angka partisipasi rendah menjadi prioritas utama dalam pengembangan pendidikan.

- c. Penggunaan tanah permukiman tiap kecamatan , wilayah yang memiliki penggunaan tanah permukiman tinggi menjadi prioritas utama dalam pengembangan pendidikan.
- d. Membuat prosentase peringkat A Nilai rata-rata Ujian Nasional dari tiap-tiap SMA di setiap Kecamatan untuk melihat kecamatan mana yang memiliki prosentase terendah dalam perolehan peringkat A . Wilayah yang memiliki prosentase terendah dalam perolehan peringkat A menjadi prioritas utama dalam pengembangan pendidikan.
- e. Membuat prosentase Rasio Kelas dan Siswa dari tiap Kecamatan dengan menggunakan data dari tiap-tiap SMA yang ada untuk melihat kecamatan mana yang memiliki prosentase tertinggi Rasio Kelas dan Siswa dibawah standar . Wilayah yang memiliki prosentase tertinggi Rasio Kelas dan Siswa dibawah standar menjadi prioritas utama dalam pengembangan pendidikan.
- f. Membuat prosentase Rasio Guru dan Siswa dari tiap Kecamatan dengan menggunakan data dari tiap-tiap SMA yang ada untuk melihat kecamatan mana yang memiliki prosentase terbanyak Rasio Guru dan Siswa dibawah standar . Wilayah yang memiliki prosentase tertinggi Rasio Guru dan Siswa dibawah standar menjadi prioritas utama dalam pengembangan pendidikan.
- g. Membuat prosentase Jumlah Sarana Penunjang dari tiap Kecamatan dengan menggunakan data dari tiap-tiap SMA yang ada untuk melihat kecamatan mana yang memiliki Kelengkapan Sarana Penunjang rendah . Wilayah yang memiliki prosentase tertinggi dalam ketidaklengkapan ruang sarana penunjang menjadi prioritas utama dalam pengembangan pendidikan.

3.6. Metoda Analisis

Analisis yang digunakan adalah analisis keruangan dan statistik, hal ini disesuaikan dengan sasaran telah diuraikan sebelumnya yang dijabarkan menjadi indikator-indikator yang digunakan dalam analisis penelitian . Pada bagian awal dianalisis karakteristik wilayah sebaran lokasi SMA berdasarkan parameter kualitas di Kota Depok baik dinilai dari faktor eksternal dan faktor internal, dengan analisis

spasial dan uji statistik. Untuk menentukan wilayah pengembangan pendidikan SMA dengan melakukan pembobotan variabel dan overlay peta untuk menentukan wilayah pengembangan pendidikan baik dengan data yang berkaitan dengan faktor eksternal yaitu karakteristik wilayah maupun data internal dari tiap sekolah. Dalam menentukan wilayah pengembangan SMA digunakan beberapa variabel penentu prioritas wilayah pendidikan. Kemudian membuat pembobotan yang berkaitan dengan prioritas dari tiap-tiap data wilayah untuk menentukan Wilayah pengembangan pendidikan SMA.

Penentuan wilayah penelitian dengan prioritas utama, kedua dan ketiga terdapat tujuh variabel penentu, yaitu :

1. Jumlah penduduk usia sekolah
2. Angka Partisipasi Sekolah
3. Penggunaan Tanah Pemukiman
4. Nilai Rata-rata Ujian Nasional
5. Rasio Kelas dan Siswa
6. Rasio Guru dan Siswa
7. Jumlah Sarana Penunjang

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 3.1 Pada tabel tersebut menjelaskan pemberian bobot nilai pada variabel prioritas wilayah, pemberian nilai bobot didapatkan dari sebaran data variabel. Dari penentuan tersebut dapat dilihat bagian mana dari wilayah penelitian sebagai wilayah prioritas utama, kedua dan ketiga dengan wilayah satuan analisis kecamatan, yaitu sebanyak 6 kecamatan. Wilayah dengan prioritas 1 diberi bobot 3, wilayah dengan prioritas 2 diberi bobot 2 dan wilayah dengan prioritas 3 diberi bobot 1. Wilayah-wilayah yang memiliki bobot tertinggi menjadi prioritas utama, selanjutnya prioritas kedua dan ketiga. Sehingga dapat diketahui Wilayah Pengembangan Pendidikan SMA di Kota Depok.

Tabel 3.1 Penilaian Variabel untuk Wilayah Pengembangan Pendidikan

No	Variabel	Prioritas 1 (Bobot 3)	Prioritas 2 (Bobot 2)	Prioritas 3 (Bobot 1)
1	Jumlah Penduduk Usia SMA (15-19)	Tinggi	Sedang	Rendah
2	Angka Parisipasi Sekolah	Rendah	Sedang	Tinggi
3	Persentase Penggunaan Tanah Permukiman	Tinggi	Sedang	Rendah
4	Kecamatan dengan persentase Sekolah yang memperoleh peringkat A	Rendah	Sedang	Tinggi
5	Kecamatan dengan persentase Sekolah yang memiliki rasio kelas dan siswa dibawah standar	Tinggi	Sedang	Rendah
6	Kecamatan dengan persentase Sekolah yang memiliki rasio guru dan siswa dibawah standar	Tinggi	Sedang	Rendah
7	Kecamatan dengan persentase SMA yang memiliki kelengkapan ruang sarana prasarana	Rendah	Sedang	Tinggi

Sumber : Pengolahan Data

BAB 4

DESKRIPSI KOTA DEPOK

Pada bab ini akan dibahas kondisi Kota Depok meliputi sejarah Kota Depok, letak dan rencana pengembangan kota Depok, kondisi penduduk, fasilitas pendidikan, kualitas SMA, kondisi internal sekolah dan fakta wilayah yang berkaitan dengan wilayah pengembangan pendidikan SMA di Kota Depok yang digunakan sebagai bahan analisis.

4.1 Sejarah Kota Depok

Awalnya Depok merupakan sebuah dusun terpencil ditengah hutan belantara dan semak belukar. Pada tanggal 18 Mei 1696 seorang pejabat tinggi VOC, **Cornelis Chastelein**, membeli tanah yang meliputi daerah Depok serta sedikit wilayah Jakarta Selatan, Ratujuaya dan Bojonggede. Chastelein mempekerjakan sekitar seratusan pekerja. Mereka didatangkan dari Bali, Makassar, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Jawa, Pulau Rote serta Filipina. Selain mengelola perkebunan, Cornelis juga menyebarkan agama Kristen kepada para pekerjanya, lewat sebuah Padepokan Kristiani. Padepokan ini bernama *De Eerste Protestante Organisatie van Christenen*, disingkat DEPOK. Dari sinilah rupanya nama kota ini berasal.

Cornelis wafat pada tanggal 28 Juni 1714, sebelum wafat Cornelis menulis surat wasiat mewariskan hak milik tanah kepada karyawan atau buruh yang bekerja dengannya serta memerdekakan sebagai budak. Setelah pelepasan hak tanah tersebut, banyak warga Depok keturunan Belanda yang pulang kembali ke Belanda.

Tahun 1871 Pemerintah Belanda mengizinkan daerah Depok membentuk Pemerintahan dan Presiden sendiri setingkat *Gemeente* (Desa Otonom). Keputusan tersebut berlaku sampai tahun 1942. *Gemeente* Depok diperintah oleh seorang Presiden sebagai badan Pemerintahan tertinggi. Di bawah kekuasaannya terdapat kecamatan yang membawahi mandat (9 mandor) dan dibantu oleh para Pencialang Polisi Desa serta Kunitir atau Menteri Lumbung. Daerah teritorial *Gemeente* Depok

meliputi 1.244 Ha, namun dihapus pada tahun 1952 setelah terjadi perjanjian pelepasan hak antara Pemerintah RI dengan pimpinan *Gemeente* Depok, tapi tidak termasuk tanah-tanah *Eigendom* dan beberapa hak lainnya.

Sejak saat itu, dimulailah pemerintahan kecamatan Depok yang berada dalam lingkungan Kewedanaan (Pembantu Bupati) wilayah Parung, yang meliputi 21 Desa. Pada tahun 1976 melalui proyek perumahan nasional di era Orde Baru, dibangunlah Perumnas Depok I dan Perumnas Depok II. Pembangunan tersebut memicu perkembangan Depok yang lebih pesat sehingga akhirnya pada tahun 1981 Pemerintah membentuk kota Administratif Depok yang peresmian dilakukan tanggal 18 Maret 1982 oleh Menteri Dalam Negeri (H. Amir Machmud). Sejak tahun 1999, melalui UU nomor 15 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon, Depok meningkat statusnya menjadi Kotamadya atau Kota. Depok bermula dari sebuah Kecamatan yang berada di lingkungan Kewedanaan (Pembantu Bupati) wilayah Parung Kabupaten Bogor, kemudian pada tahun 1976 perumahan mulai dibangun baik oleh Perum Perumnas maupun pengembang yang kemudian diikuti dengan dibangunnya kampus Universitas Indonesia (UI), serta meningkatnya perdagangan dan Jasa yang semakin pesat sehingga diperlukan kecepatan pelayanan.

4.2 Letak dan Rencana Pengembangan

Secara geografis Kota Depok terletak pada koordinat 6° 19' 00" - 6° 28' 00" LS dan 106° 43' 00" - 106° 55' 30" BT. Letak Depok secara administratif adalah : Sebelah Utara berbatasan dengan : Kecamatan Pasar Minggu, Kecamatan Pasar Rebo, Kecamatan Cilandak, DKI Jakarta, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang Selatan. Sebelah Selatan berbatasan dengan : Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Pondokgede Kota Bekasi dan Kecamatan Gunungsindur Kabupaten Bogor. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Parung dan Kecamatan Gunungsindur Kabupaten Bogor.

Luas keseluruhan Kota Depok 20.504,54 ha atau 200,29 km². Kota Depok terdiri dari 6 (enam) Kecamatan, 63 Kelurahan, 828 RW dan 453 RT. Pusat Kota

Depok sebagai pusat pemerintahan terdapat di Kecamatan Pancoran Mas. Kecamatan yang terdapat di Kota Depok yaitu ; Sawangan, Cimanggis, Pancoran Mas. Limo, Beji, Sukmajaya. (lihat Peta 1)

Tabel 4.1 Luas Wilayah Kota Depok, 2008

No	Kecamatan	Luas (Ha)
1.	Pancoran Mas	2.963
2.	Beji	1.430
3.	Sukmajaya	3.433
4.	Cimanggis	5.354
5.	Sawangan	4.569
6.	Limo	2,280
	Luas Kota Depok	20,029

Sumber : Bakosurtanal, 2000

Kota Depok berkembang pesat baik dibidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan. Khususnya bidang Pemerintahan semua Desa berganti menjadi Kelurahan dan adanya pemekaran Kelurahan, sehingga pada akhirnya Depok terdiri dari 6 (Kecamatan) dan 63 (enam puluh tiga) Kelurahan. Kecamatan Sawangan terdiri dari 14 kelurahan, Kecamatan Pancoranmas terdiri dari 11 kelurahan, kecamatan Sukmajaya terdiri dari 11 kelurahan, Kecamatan Cimanggis terdiri dari 13 kelurahan , Kecamatan Beji terdiri dari 6 kelurahan, dan Kecamatan Limo terdiri dari 8 kelurahan (Tabel 4.2).

Tabel 4.2. Nama dan Jumlah Kelurahan di Kota Depok

No	Kecamatan	Kelurahan	Jumlah
1	Sawangan	Duren Mekar, Duren Seribu, Pengasinan, Bedahan, Pasir Putih, Sawangan Baru, Sawangan, Bojongsari, Bojongsari Baru, Curug, Pondok Petir, Serua, Kedaung, Cinangka	14 kelurahan
2	Pancoran Mas	Cipayung Jaya, Pondok Terong, pondok jaya, Ratujuaya, Cipayung, Rangkapan Jaya Baru, Rangkapan Jaya, Mampang, Pancoran mas, Depok Jaya, Depok	11 kelurahan
3	Sukmajaya	Kalimulya, jatimulya, Kalibaru, Cilodong, Sukmajaya, Tirtajaya, Mekarjaya, Abadijaya, Baktijaya, Cisolak	11 kelurahan
4	Cimanggis	Cilangkap, Cimpaeun, Tapos, Leunangung, Jatijajar, Sukamaju Baru, Curug, Sukatani, Harjamukti, Sukamaju Baru, Curug, Sukatani, Harjamukti, Cisolak Pasar, Mekarsari, Tugu, Pasirgunung Selatan	13 kelurahan
5	Beji	Beji, Beji Timur, Kemiri Muka, Pondok Cina, Kukusan, Tanah Baru	6 kelurahan
6	Limo	Meruyung, Grogol, Krukut, Limo, Cinere, Gandul, Pangkalanjati Baru, Pangkalanjati Lama	8 kelurahan

Sumber : BPS kota Depok, 2009

Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Depok tahun 2000 – 2010 struktur tata ruang Kota Depok diwujudkan berdasarkan persebaran penduduk, arahan pengembangan komponen utama pembentuk ruang dan arahan intensitas ruang yang diarahkan untuk membentuk sistem pelayanan dan interaksi sistem kegiatan kota agar dapat berdayaguna. Konsep struktur ruang Kota Depok 2000-2010 datang dikembangkan melalui pengenalan potensi pengembangan infrastruktur, luasan wilayah dan jenis kegiatan yang akan berkembang sesuai dengan fungsi kota yang dituju.

Berdasarkan potensi dan permasalahan yang dihadapi, struktur pelayanan Kota Depok diarahkan untuk membentuk satu pusat utama kota/pusat primer dan beberapa sub pusat kota/pusat sekunder, yang diharapkan mampu berkembang secara terintegrasi untuk melayani pelayanannya masing-masing. Hal ini mengingat Depok memiliki 3 akses utama yang mempengaruhi orientasi perkembangannya, yaitu Jalan Margonda Raya, Cimanggis dan Parung. Dalam Rencana Sistem Pusat Pelayanan Kegiatan Kota ditetapkan bahwa Struktur pelayanan kegiatan Kota Depok dikembangkan dengan membentuk pusat dan sub pusat kota, yang diharapkan akan berkembang sesuai dengan wilayah pelayanannya masing-masing. Pengembangan ini diasumsikan adanya perbaikan dan pembangunan struktur jaringan jalan baru mengikuti potensi pusat-pusat yang ada dan sekaligus mengembangkan pusat baru dengan skala tidak terlalu besar. Pusat dan sub pusat tersebut adalah sebagai berikut : Pusat Utama Kota di Jalan Margonda Raya (Kecamatan Pancoran Mas), saat ini berada dalam keadaan berkembang yang melayani hampir seluruh kota

- a. Sub Pusat Cinere di Cinere (Kecamatan Limo), relatif sudah berkembang dengan melayani Cinere dan sekitarnya.
- b. Sub Pusat Cisalak (Kecamatan Cimanggis), relatif sedang berkembang namun masih memerlukan penataan kembali yang melayani kegiatan grosir dan eceran
- c. Sub Pusat Citayam (Kecamatan Pancoran Mas) yang berdekatan dengan Stasiun KRL dan dalam taraf sedang berkembang yang memiliki kegiatan grosir terbatas dan eceran.
- d. Sub Pusat Sawangan di Rangkapan Jaya Baru dan Sawangan Baru (Kecamatan Sawangan)
- e. Sub Pusat Cimanggis di Jatijajar (Kecamatan Cimanggis).

Berdasarkan pertimbangan pola sebaran kegiatan dan fungsi, secara makro konsep wilayah pengembangan Kota Depok memiliki ciri

1. Wilayah Barat : fungsi jasa perdagangan / agribisnis dan pergudangan, wisata, permukiman kepadatan rendah sampai sedang

2. Wilayah Tengah : fungsi pusat perdagangan dan jasa perkantoran, pergudangan, pendidikan, wisata dan permukiman kepadatan sedang-tinggi.
3. Wilayah Timur : fungsi permukiman kepadatan rendah, sedang dan tinggi perdagangan dan jasa pergudangan, perkantoran, wisata dan industri yang ramah lingkungan.

4.3 Kondisi Penduduk

Jumlah penduduk Kota Depok pada tahun 2009 adalah 1.536.980 jiwa dengan jumlah penduduk pria 798.802 jiwa dan penduduk wanita 738.178 jiwa. Laju pertumbuhan penduduk tahun 2009 sebesar 2,21 % dengan sex rasio 108. Kecamatan Cimanggis memiliki jumlah penduduk paling banyak yaitu 421.630 jiwa, dan terendah jumlah penduduk di Kecamatan Beji yaitu 146.441 jiwa (Tabel 4.3)

Tabel 4.3. Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan

No	Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	Pancoranmas	146.506	134.499	281.005
2.	Beji	77.129	69.312	146.441
3.	Sukmajaya	183.682	174.428	358.110
4.	Cimanggis	219.419	202.211	421.630
5.	Sawangan	90.752	82.610	173.362
6.	Limo	81.802	75.118	156.432
	Jumlah	798.802	738.178	1.536.980

Sumber : BPS, Depok dalam Angka 2009

Kepadatan penduduk kota Depok pada tahun 2009 adalah 7.673,77 jiwa/km². Kecamatan Sukmajaya merupakan kecamatan terpadat yaitu 10.492,52 jiwa/km², kecamatan Beji dengan tingkat kepadatan 10.240,63 jiwa/km², sedangkan kepadatan terendah terdapat di kecamatan Sawangan yaitu 3.794,31 jiwa/km² (Tabel 4.4)

Tabel 4.4 . Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Luas wilayah (km ²)	Kepadatan (jiwa/km ²)
1.	Pancoranmas	281.005	29,83	9.420,21
2.	Beji	146.441	14,30	10.240,63
3.	Sukmajaya	358.110	34,13	10.492,53
4.	Cimanggis	421.630	53,54	7.875,05
5.	Sawangan	173.362	45,69	3.794,31
6.	Limo	156.432	22,80	6.861,05

Sumber : BPS, Depok Dalam Angka 2009

4.4. Penggunaan Tanah

Penggunaan tanah di Kota Depok dapat dibedakan menjadi beberapa bagian diantaranya sawah, pekarangan, permukiman, ladang, empang, kuburan dan lain-lain. Penggunaan tanah terbesar digunakan untuk permukiman, kemudian pekarangan, ladang, dan lain-lain (Tabel 4.5). Dari sebaran penggunaan lahan permukiman tampak terkonsentrasi di bagian utara yang berbatasan dengan DKI Jakarta yaitu Kecamatan Limo, Beji dan Cimanggis dan bagian tengah yaitu kecamatan Pancoranmas. Dan penggunaan tanah kebun dan sawah tampak di bagian barat seperti di kecamatan Sawangan, bagian selatan kecamatan Pancoranmas dan Sukmajaya dan bagian timur kecamatan Cimanggis (Peta 2)

Tabel 4.5 Penggunaan Tanah Kota Depok

Kecamatan	Sawah	Pekarangan	Permukiman	Ladang	Empang	Kuburan	Lain-lain	Jumlah
Pancoranmas	189	768,1	2100,8	1608	10,1	10,1	254	3436
Beji	14	188,6	748	340	23,1	7,5	187,6	1509,7
Sukmajaya	82	46,1	1845,8	4,1	22,8	30,1	444,2	2475,8
Cimanggis	82,8	2974,6	948,6	209,7	8,2	39,7	1081,3	5344,9
Sawangan	344,5	706,2	2369,7	1040,2	148,3	40,3	22	4671,2
Limo	134	310	1789	16	30	25	90	2394

Sumber : BPS Kota Depok 2009

4.5.Fasilitas Pendidikan

Menurut Rencana Tata Ruang Wilayah tahun 2000 – 2010 Kawasan Pendidikan Kota Depok ditetapkan sejalan dengan visi kota sebagai Kota Pendidikan, maka upaya pengembangan Kawasan Pendidikan diarahkan pengembangannya di Kecamatan Pancoranmas yaitu di daerah Citayam, sebagai Kawasan Pendidikan Terpadu. Diperkirakan kampus-kampus dengan luas lahan kecil dapat menempati area dan memanfaatkan fasilitas secara bersama. Adanya Kawasan Pendidikan Terpadu diharapkan akan dapat mendorong terciptanya persaingan kualitas pendidikan, khususnya pendidikan tinggi disamping mengarahkan perkembangan ruang Kota Depok.

Fasilitas Pendidikan di Kota Depok mulai dari Kelompok Bermain hingga perguruan Tinggi, yaitu Universitas Indonesia, Universitas Gunadarma, Sekolah Tinggi Bina Sarana Informatika. Adapun jumlah dan penyebaran fasilitas pendidikan dapat dilihat pada Tabel 8. Pada tabel tersebut terlihat bahwa jumlah SD lebih besar jika dibandingkan dengan jumlah SMP dan SMA, SD sebanyak 384 buah, SMP sebanyak 143 buah sedangkan SMA hanya sebanyak 59 buah. Dari tabel tersebut dapat diketahui fasilitas pendidikan terbanyak adalah pada tingkat Sekolah Dasar, jumlahnya semakin menurun sesuai dengan jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Tampak fasilitas pendidikan terpusat di Kecamatan Pancoranmas baik dari Sekolah Dasar sampai dengan dengan SMA. Kecamatan Beji memiliki 34 SD, 10 SMP dan 5 SMA. Di kecamatan Cimanggis terdapat jumlah Sekolah Dasar terbanyak yaitu 101

SD, tetapi jumlah SMA hanya 9 sekolah. Di Kecamatan Limo terdapat jumlah fasilitas pendidikan terendah di semua jenjang, yaitu 30 SD, 13 SMP dan 8 SMA.

Tabel 4.6. Jumlah SD,SMP dan SMA Kota Depok

No	Kecamatan	SD Negeri	SD Swasta	SMP Negeri	SMP Swasta	SMA Negeri	SMA Swasta
1	Pancoran Mas	60	32	7	37	1	15
2	Beji	25	9	1	9	-	5
3	Sukmajaya	71	7	4	17	2	9
4	Cimanggis	73	28	4	25	1	8
5	Sawangan	33	16	1	25	2	8
6	Limo	17	13	1	12	1	7
	Jumlah	279	105	18	125	7	52

Sumber BPS kota Depok, 2009

4.6. Nilai Rata-Rata Ujian Nasional di Kota Depok

Jumlah SMA yang telah mengikuti Ujian Nasional pada tahun ajaran 2009/2010 di Kota Depok ada 50 sekolah, terdiri dari 7 SMA Negeri dan 43 Sekolah Swasta. Tidak semua sekolah memiliki gedung sendiri seperti pada SMA terbuka yang menginduk pada salah satu SMA Negeri di Kota Depok. Dalam penelitian ini sekolah terbuka tidak diikutsertakan dalam penelitian karena tidak memiliki sarana penunjang untuk pendidikan, dan menginduk pada sekolah lain, sehingga dalam penelitian ini ada 49 SMA yang dianalisis. Seperti dapat dilihat pada Peta 3 memperlihatkan sebaran spasial SMA yang polanya dapat dikatakan mengelompok di bagian kota dekat dengan pusat pemerintahan dan perdagangan. Dari segi kelembagaan kecamatan Pancoranmas memiliki jumlah sekolah terbanyak 15 unit dan yang terendah terdapat di kecamatan Beji memiliki 5 unit. Jumlah SMA tiap Kecamatan dapat dilihat pada tabel 4.7.

Jika sebaran lokasi SMA dikaitkan dengan sebaran jumlah penduduk usia SMA ada ketidakserasian di kecamatan tertentu. Kecamatan yang memiliki jumlah penduduk usia sekolah SMA (15-19 tahun) besar tidak selalu mempunyai banyak sekolah, seperti di Kecamatan Cimanggis yang memiliki jumlah penduduk usia sekolah tertinggi yaitu 34.636 jiwa hanya memiliki 7 unit SMA.

Nilai rata-rata Ujian Nasional diperoleh dari hasil rata-rata nilai Ujian Nasional program IPA dan IPS. Mata pelajaran yang diujikan untuk program IPA adalah Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, Fisika, Kimia dan Biologi. Sedangkan untuk program IPS mata pelajaran yang diujikan adalah Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, Ekonomi, Sosiologi dan Geografi. Setiap program mengujikan 6 mata pelajaran. Tidak semua SMA di Kota Depok memiliki program IPA, hanya 35 SMA yang memiliki program IPA dan IPS, dan semua SMA memiliki program IPS.

Dalam penelitian ini dibuat 3 (tiga) klasifikasi menurut Departemen Pendidikan Nasional yaitu

1. Nilai rata-rata Ujian Nasional peringkat A dengan nilai rata-rata UN lebih dari 7,5 tergolong tinggi
2. Nilai rata-rata Ujian Nasional peringkat B yaitu dengan nilai 6,5 – 7,5 tergolong sedang
3. Nilai rata-rata Ujian Nasional peringkat C yaitu dengan nilai kurang dari 6,5 tergolong rendah.

Nilai rata-rata Ujian nasional di Kota Depok bervariasi antara 5,53 – 8,22. Nilai rata-rata UN tertinggi terdapat di SMA Negeri 1 Kota Depok di Kecamatan Pancoranmas, dan nilai rata-rata UN terendah terdapat di SMA Cakra Nusantara di Kecamatan Limo. Di Kecamatan Pancoranmas dan Beji Nilai rata-rata UN yang diperoleh oleh sekolah-sekolah berkisar peringkat A dan B oleh peringkat, sedangkan untuk 4 kecamatan lainnya yaitu Sukmajaya, Cimanggis, Sawangan dan Limo masih ada sekolah-sekolah yang memperoleh peringkat C. Dapat dilihat peringkat A

terkonsentrasi di bagian tengah dan Peringkat B tersebar merata di seluruh kota Depok (Peta 4).

4.7 Faktor Internal

Faktor internal dilihat dari hal yang berkaitan langsung dengan kondisi sekolah dengan melihat dari tiap-tiap sekolah yaitu rasio kelas dan siswa, rasio guru dan siswa, ruang sarana penunjang, dan tingkat kelulusan. Data ini juga digunakan untuk menentukan karakteristik wilayah sebaran lokasi berdasarkan parameter kualitas dan wilayah pengembangan pendidikan SMA di Kota Depok.

4.7.1 Rasio Kelas dan Siswa SMA di Kota Depok

Untuk mengetahui daya tampung siswa dalam kelas di setiap sekolah digunakan rasio kelas dan siswa dengan membandingkan banyaknya siswa dengan jumlah kelas yang ada di tiap SMA yang ada di Kota Depok. Makin banyak jumlah siswa di dalam kelas makin rendah tingkat pelayanan pendidikan terhadap siswa. Berdasarkan Standar Pendidikan Nasional yang tertuang dalam Undang-undang Pendidikan Nasional no 24 tahun 2007 tentang standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Menengah Atas, dalam satu ruang kelas jumlah siswa maksimum adalah 32 orang. Berdasarkan acuan tersebut maka dalam penelitian ini dibuat 3 klasifikasi rasio kelas dan siswa yaitu :

1. Dalam satu kelas terdapat 7 – 19 siswa = diatas standar
2. Dalam satu kelas terdapat 20 – 32 siswa = sesuai standar
3. Dalam satu kelas terdapat lebih dari 32 siswa = di bawah standar

Rasio kelas dan siswa SMA tahun ajaran 2009/2010 yang ada menunjukkan kondisi yang bervariasi (Tabel 4.8). Sekolah yang paling banyak memiliki jumlah siswa dalam satu kelas adalah SMA YAPPAN Indonesia dengan rasio satu kelas

untuk 69 siswa dan paling sedikit menampung siswa adalah SMA Al-Manar dengan rasio satu kelas menampung 7 siswa. Umumnya tiap kecamatan memiliki sekolah-sekolah dengan rasio kelas dan siswa bervariasi dari yang dibawah standar, sesuai standar, dan diatas standar. Pada sekolah Negeri menunjukkan daya tampung siswa dalam satu kelas dibawah standar yaitu jumlah siswa lebih dari 32 siswa. Dengan kata lain sekolah-sekolah yang memiliki rasio kelas dan siswa dibawah standar masih membutuhkan jumlah kelas untuk menampung siswa. Dibagian tengah terkonsentrasi sekolah-sekolah yang berada dibawah standar (1 kelas terdiri dari lebih dari 32 siswa), sedangkan ke arah timur tersebar sekolah-sekolah dengan rasio kelas dan siswa sesuai standar (1 kelas terdiri dari 20 – 32 siswa), dan kearah barat tampak tersebar sekolah-sekolah yang berada diatas standar (1 kelas terdiri dari 7 – 19 siswa). Untuk lebih jelas dapat dilihat pada peta 5

4.7.2. Rasio Guru dan Siswa SMA di Kota Depok

Rasio guru dan siswa didefinisikan sebagai perbandingan antara jumlah siswa dengan jumlah guru pada jenjang pendidikan tertentu, untuk mengetahui rata-rata jumlah guru yang dapat melayani murid di suatu sekolah atau daerah tertentu. Jika rasio tinggi, ini berarti satu orang tenaga pengajar harus melayani banyak murid. Banyaknya murid yang diajar dalam kelas akan mengurangi daya tangkap murid pada pelajaran yang diberikan atau mengurangi efektivitas pengajaran. Sesuai dengan Standar Pendidikan Nasional, rasio guru dan siswa adalah 1 : 20. Dalam penelitian ini dibagi menjadi 3 klasifikasi yaitu :

1. Jika guru melayani 3 – 14 siswa dalam kelas = diatas standar
2. Jika guru melayani 15 – 20 siswa dalam kelas = sesuai standar
3. Jika guru melayani lebih dari 20 siswa dalam kelas = dibawah standar

Pada tahun ajaran 2009/2010 di Kota Depok terdapat 1230 guru. Jumlah guru terbanyak ada di Kecamatan Pancoranmas, sesuai dengan jumlah sekolah yang

terbanyak ada di kecamatan tersebut, dan jumlah guru terendah ada di kecamatan Beji yaitu 82 guru.

Secara umum jumlah guru SMA di kota Depok sudah mencukupi mengingat standar rasio standar guru dan siswa adalah 1 : 20. Hampir semua sekolah memiliki rasio sesuai standar atau diatas standar (Tabel 4.9). Rasio guru dan siswa diatas standar tersebar merata di seluruh kota Depok. Hanya ada 1 SMA yang memiliki rasio dibawah standar yaitu 1 : 38, terdapat di SMA Negeri 5 , Kecamatan Sawangan (Peta 6).

4.7.3. Ruang Sarana Penunjang SMA di Kota Depok

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional sebuah SMA sekurang-kurangnya memiliki prasarana sebagai berikut : ruang kelas, perpustakaan , laboratorium biologi, laboratorium fisika, laboratorium kimia, laboratorium komputer, laboratorium bahasa, ruang pimpinan, ruang guru, ruang tata usaha, tempat ibadah, ruang konseling, ruang UKS, ruang OSIS , ruang sirkulasi, jamban, gudang , tempat olah raga.

Dalam penelitian ini yang dimaksud ruang sarana penunjang adalah ruangan selain ruang kelas yang digunakan sebagai ruang praktikum dan ruangan yang menunjang kegiatan belajar dan mengajar berdasarkan data yang ada yang termasuk ruang sarana prasarana yaitu laboratorium IPA, fisika, biologi, kimia, bahasa, komputer, ruang multimedia, perpustakaan, ruang serba guna, UKS, ruang ketrampilan, ruang konseling.

Dari data kelengkapan ruang sarana penunjang yang dimiliki sekolah, tidak setiap gedung sekolah memiliki sarana penunjang secara lengkap. Jumlah ruang sarana dan prasarana SMA di Kota Depok bervariasi (Tabel 4.10), dalam penelitian ini dibuat 3 kualifikasi jumlah ruang sarana dan prasarana, yaitu:

1. Jumlah ruang sarana prasaranan 1 – 4 = tidak lengkap
2. Jumlah ruang sarana prasarana 5 – 8 = kurang lengkap
3. Jumlah ruang sarana prasarana lebih dari 8 = lengkap

Dari data yang diperoleh dari Dinas Pendidikan Kota Depok, maka di kecamatan Pancoranmas merupakan kecamatan yang memiliki sekolah-sekolah dengan ruang sarana penunjang lengkap, dan di Kecamatan Sawangan tidak ada SMA yang memiliki ruang sarana penunjang yang lengkap yang menunjang kegiatan belajar mengajar. Tampak sekolah-sekolah dengan ruang sarana lengkap berada di bagian tengah kearah utara, dan sekolah dengan ruang sarana penunjang kurang lengkap tersebar merata di seluruh kota Depok, Sekolah-sekolah dengan ruang sarana lengkap tampak terkonsentrasi di bagian tengah dari kota Depok (Peta 7).

4.8.Faktor Eksternal

Faktor eksternal dilihat dari hal yang berkaitan dengan karakteristik wilayah yang terdapat di lingkungan sekolah yang tidak berkaitan langsung dengan kondisi sekolah, tetapi berkaitan dengan kondisi penduduk dan penggunaan tanah yaitu jumlah penduduk usia SMA yaitu 15 – 19 tahun, angka partisipasi sekolah, prosentase penggunaan tanah permukiman yang digunakan untuk menentukan karakteristik wilayah sebaran lokasi berdasarkan parameter kualitas dan wilayah pengembangan pendidikan SMA di Kota Depok.

4.8.1.Jumlah Penduduk Usia Sekolah (15-19 tahun)

Jumlah penduduk usia SMA (15 – 19 tahun) dapat digunakan untuk menentukan kebutuhan pengembangan fasilitas pendidikan khususnya tingkat SMA. Dengan jumlah usia penduduk pendukung sekolah maka kebijakan dalam pembangunan pendidikan harus memperhatikan variabel tersebut. Di Kota Depok jumlah penduduk usia SMA pada tahun 2009 adalah 124.136 jiwa. Tiap kecamatan memiliki jumlah penduduk usia 15-19 bervariasi (Tabel 4.12) dengan antara 9761 –

34636 jiwa. Berdasarkan data tersebut maka dalam penelitian ini dibuat 3 klasifikasi yaitu :1. Jumlah penduduk kurang dari 18.000 tergolong rendah

2. Jumlah penduduk 18.000 – 26.000 tergolong sedang

3. Jumlah penduduk lebih dari 26.000 tergolong tinggi

Kecamatan yang paling banyak memiliki jumlah penduduk usia 15 – 19 tahun adalah kecamatan Cimanggis yaitu 34.636 jiwa atau 27,90 % dan kecamatan yang paling sedikit jumlah penduduk usia 15-19 tahun adalah kecamatan Beji yaitu 9761 atau 7,86 % Sebaran penduduk kelompok ini pada tingkat kecamatan, secara spasial umumnya terkonsentrasi di bagian tengah dan timur yaitu kecamatan Sukmajaya dan Cimanggis. Hal ini dapat dimengerti mengingat pusat kota merupakan daerah yang banyak menyediakan lapangan pekerjaan dan ke bagian timur yaitu kecamatan Cimanggis merupakan pemusatan industri di Kota Depok. Disamping itu jumlah penduduk usia SMA (15-19 tahun) tidak saja dipengaruhi oleh pertumbuhan penduduk alami, tetapi juga oleh adanya migrasi masuk penduduk kelompok ini dari luar Kota Depok. Sebaran penduduk usia 15-19 tahun tampak tinggi di bagian timur dan semakin ke barat semakin rendah dapat dilihat pada peta 14.

Tabel 4.12 Jumlah Penduduk Usia Sekolah di Kota Depok tahun 2009

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk Usia 15-19 tahun	Keterangan
1	Pancoranmas	23104	Sedang
2	Beji	9761	Rendah
3	Sukmajaya	28433	Tinggi
4	Cimanggis	34636	Tinggi
5	Sawangan	15928	Rendah
6	Limo	12274	Rendah

Sumber : BPS Kota Depok 2009

Keterangan: Kurang dari 18.000 = Rendah
 18.000 – 26.000 = Sedang
 Lebih dari 26.000 = Tinggi

4.8.2. Angka Partisipasi Sekolah

Angka Partisipasi Sekolah (APS), secara umum merupakan proporsi jumlah penduduk yang sedang bersekolah pada satu jenjang pendidikan terhadap jumlah penduduk usia sekolah yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut. Semakin tinggi angka partisipasi sekolah menunjukkan semakin banyak penduduk usia 15-19 tahun di kecamatan tersebut yang bersekolah di kecamatan tersebut. Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA tiap Kecamatan di Kota Depok bervariasi (Tabel 4.13) . Angka Partisipasi Sekolah SMA di Kota Depok berkisar antara 7,74% – 60,81%. Berdasarkan jumlah tersebut maka dalam penelitian ini dibagi menjadi 3 klasifikasi, yaitu :

1. Angka Partisipasi Sekolah kurang dari 25 % = rendah
2. Angka Partisipasi Sekolah 25% - 40% = sedang
3. Angka Partisipasi Sekolah lebih dari 40 % = tinggi

Angka partisipasi sekolah tertinggi ada di Kecamatan Pancoranmas yaitu 60,81 % dan angka partisipasi sekolah terendah ada di kecamatan Cimanggis yaitu 7,74% (Peta 10). Dari data jumlah penduduk usia SMA yaitu 15-19 tahun kecamatan Cimanggis memiliki jumlah usia kelompok tersebut terbesar, tetapi memiliki angka partisipasi terendah hal ini menunjukkan bahwa penduduk usia 15-19 tahun di kecamatan tersebut banyak yang tidak terserap di sekolah-sekolah yang ada di Kecamatan Cimanggis . Di wilayah yang berbatasan dengan DKI Jakarta menunjukkan Angka partisipasi sekolah yang rendah seperti di kecamatan Cimanggis dan Limo (Peta 15)

Tabel 4.13. Angka Partisipasi Sekolah SMA di Kota Depok tahun 2009

No	Kecamatan	Angka Partisipasi Sekolah (%)	Keterangan
1	Pancoranmas	61,81	Tinggi
2	Beji	50,57	Tinggi
3	Sukmajaya	50,78	Tinggi
4	Cimanggis	7,74	Rendah
5	Sawangan	25,83	Sedang
6	Limo	15,84	Rendah

Sumber : Pengolahan Data

Keterangan : Kurang dari 25% = Rendah
 25% - 40% = Sedang
 Lebih dari 40 % = Tinggi

4.8.3. Penggunaan Tanah Permukiman

Penggunaan tanah di kota Depok beraneka ragam yaitu penggunaan tanah untuk sawah, pekarangan, perumahan, ladang, empang, kuburan dan lain-lain (Tabel 4.14) dan Peta 2. Dalam lingkungan perumahan harus menyediakan fasilitas sosial diantaranya adalah fasilitas pendidikan. Pertumbuhan permukiman merupakan dampak semakin padatnya aktivitas yang terjadi di pusat kota. Kecenderungan perkembangan kota membawa konsekuensi meningkatnya aktivitas penduduk (demand) yang membutuhkan pelayanan (supply) berupa fasilitas sebagai pendukung.

Prosentase penggunaan tanah permukiman di kota Depok berkisar antara 17,74% – 74,72 % (Tabel 14.14) Berdasarkan data tersebut dalam penelitian ini dibuat 3 klasifikasi yaitu :

1. Persentase penggunaan tanah perumahan 17% – 35 % = rendah
2. Persentase penggunaan tanah perumahan 36 – 55% = sedang
3. Persentase penggunaan tanah perumahan lebih dari 55% = tinggi

Persentase penggunaan tanah untuk perumahan terendah ada di Kecamatan Cimanggis yaitu 17,74 % dan tertinggi ada di Kecamatan Limo yaitu 74,72% . Penggunaan tanah permukiman yang tinggi tampak terkonsentrasi di bagian tengah kota Depok, dan penggunaan tanah permukiman yang rendah tampak di bagian timur yaitu di kecamatan Cimanggis, Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Peta 16.

Tabel 4.14. Penggunaan Tanah Permukiman Kota Depok tahun 2009

No	Kecamatan	Penggunaan Tanah Perumahan(%)	Keterangan
1	Pancoranmas	61,14	Tinggi
2	Beji	49,54	Sedang
3	Sukmajaya	74,55	Tinggi
4	Cimanggis	17,74	Rendah
5	Sawangan	50,7	Sedang
6	Limo	74,72	Tinggi

Sumber : Pengolahan Data

Keterangan : 17% - 35% = Rendah
 36% - 55% = Sedang
 Lebih dari 55 % = Tinggi

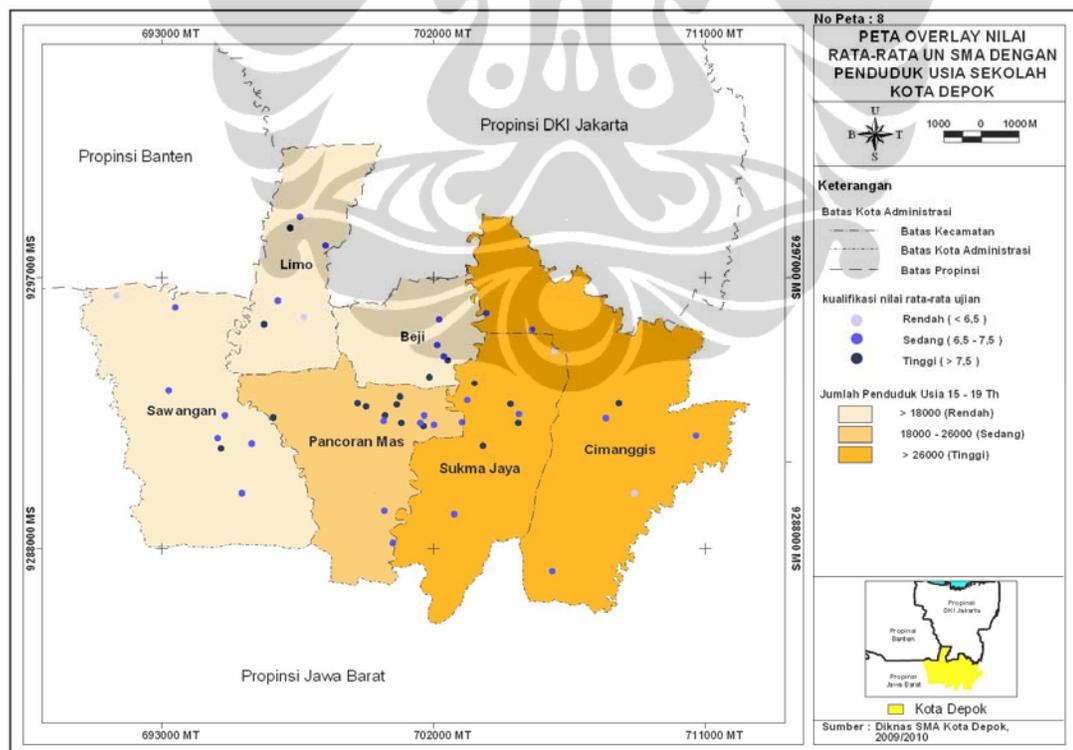
BAB 5

HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1 Karakteristik Wilayah Sebaran Lokasi SMA berdasarkan Parameter Kualitas di Kota Depok

5.1.1 Kualitas SMA dengan Jumlah Penduduk Usia Sekolah

Berdasarkan overlay peta Nilai Rata-rata Ujian Nasional (peta 4) dengan peta Jumlah Penduduk Usia Sekolah (peta 14) didapat peta overlay Nilai Rata-rata Ujian Nasional dengan Penduduk Usia Sekolah (Peta 8). Berdasarkan Peta 8 dapat ditunjukkan sebaran kualitas SMA tidak sepenuhnya mengikuti sebaran Jumlah Penduduk Usia Sekolah. Sekolah-sekolah yang berkualitas tinggi persebarannya berada pada wilayah dengan jumlah penduduk sedang.



Hasil analisis ini didukung oleh tabel matriks sebagai berikut (Tabel 5.1) yang dapat dijelaskan sebagai berikut : Kualitas SMA dengan jumlah penduduk usia SMA (Tabel 5.1) didominasi dengan karakteristik kualitas Ujian Nasional peringkat B di wilayah dengan jumlah penduduk usia SMA rendah (kurang dari 18000), terdapat 12 SMA yaitu SMA Muhammadiyah 2, Putra Bangsa, Tarbiyah yang terdapat di kecamatan Beji, SMA Al-Hasra, Islamiyah, Kharismmawita, Muhammadiyah 7, Yappan, Bina Sejahtera yang terdapat di kecamatan Sawangan, dan SMA Al-Manar, Dian Didaktika, Tadika Pertiwi yang berada di kecamatan Limo ,tampak tersebar ke arah timur. Terdapat 8 SMA dengan kualitas Ujian Nasional peringkat A di wilayah dengan jumlah penduduk usia SMA sedang (18.000 – 26.000) yaitu SMA Bintara, Cakra Buana, Mardi Yuana, Muhammadiyah 1, Negri 1, Pelita, Sejahtera, Lazuardi kecamatan Pancoranmas tampak terkonsentrasi di bagian pusat. Terdapat 8 SMA dengan Ujian Nasional peringkat B di wilayah dengan jumlah penduduk usia SMA tinggi yaitu SMA Budi Utomo, An-Nizomiyah, Pemuka di kecamatan Sukmajaya, SMA Darusalam, Nurul Fikri, Raflesia, Pondok Daun, Tritura di kecamatan Cimanggis. Terdapat 7 SMA dengan kualitas Ujian Nasional peringkat B di wilayah dengan jumlah penduduk usia SMA sedang (18.000 – 26.000) yaitu SMA Arahman, Budi Bakti, Kasih, Mawadah, PSKD VII, YPPD, Perintis di kecamatan Pancoranmas tampak terkonsentrasi di bagian tengah. Terdapat 5 SMA dengan kualitas Ujian Nasional peringkat A di wilayah dengan jumlah penduduk usia SMA tinggi (lebih dari 26000) yaitu SMA Negri 2, Negri 3, Yapemri, Tugu Ibu di kecamatan Sukmajaya, dan SMA Negri 4 di kecamatan Cimanggis. Terdapat 5 SMA dengan kualitas Ujian Nasional peringkat A di wilayah dengan jumlah penduduk usia SMA rendah (kurang dari 18.000) yaitu SMA PGRI, Pribadi di kecamatan Beji, SMA Negri 5 di kecamatan Sawangan, SMA Labschool Cinere, Negri 6 di kecamatan Limo .Terdapat 2 SMA dengan nilai rata-rata Ujian Nasional peringkat C di wilayah dengan jumlah penduduk usia SMA tinggi (lebih dari 26000) yaitu SMA Bina Taqwa di kecamatan Sukmajaya dan SMA Tubagus Pangeling di Kecamatan Cimanggis. Terdapat 2 SMA dengan kualitas Ujian Nasional peringkat C di wilayah

dengan jumlah penduduk usia SMA rendah (kurang dari 18.000) yaitu SMA Eka Prasetya di kecamatan Sawangan dan SMA Cakra Nusantara di kecamatan Limo.

Tabel 5.1. Kualitas SMA dan Jumlah Penduduk SMA (15-19 tahun) di Kota Depok

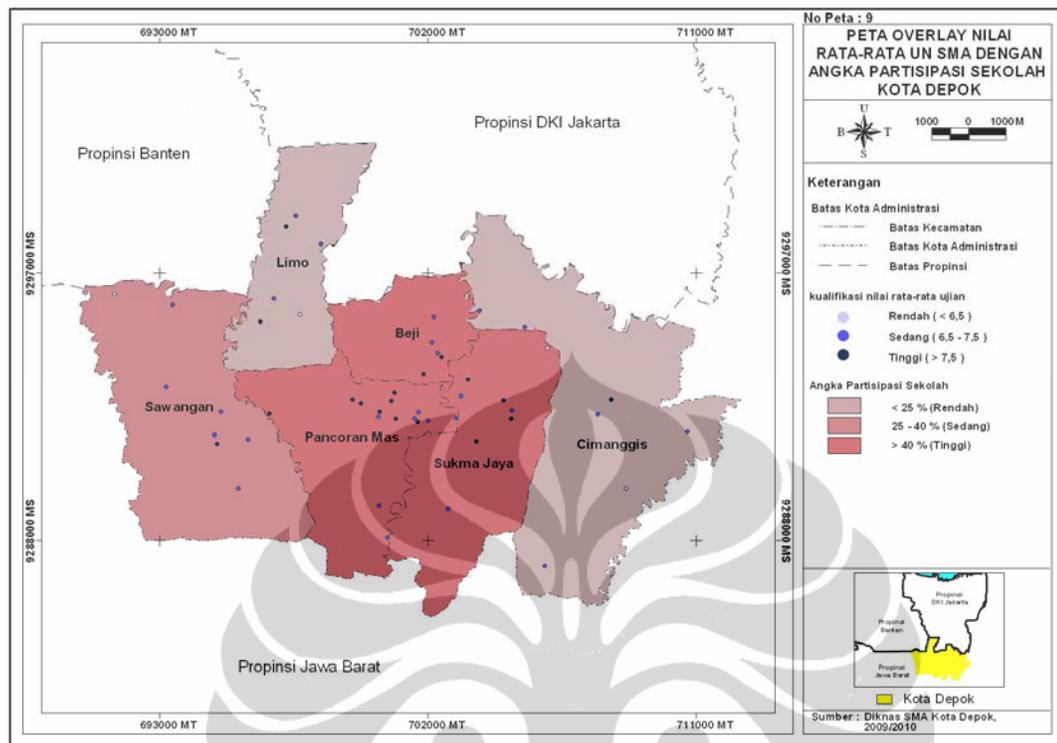
Kualitas (Peringkat UN)	Tinggi (lebih dari 26.000 jiwa)	Sedang (18.000 – 26.000 jiwa)	Rendah (kurang dari 18.000 jiwa)	Jumlah
A	5	8	5	18
B	8	7	12	27
C	2	-	2	4
Total	15	15	19	49

Sumber : Pengolahan Data

Untuk analisis statistik dengan menggunakan Anova satu arah dari tabel Anova didapat probabilitasnya $(0,202) > 0,05$ maka H_0 diterima, artinya Peringkat Ujian Nasional dari wilayah Jumlah Penduduk Usia Sekolah sama.

5.1. 2 Kualitas SMA dengan Angka Partisipasi Sekolah

Berdasarkan overlay peta Nilai Rata-rata Ujian Nasional (peta 4) dengan peta Angka Partisipasi Sekolah (peta 15) didapat peta overlay Nilai Rata-rata Ujian Nasional dengan Angka Partisipasi Sekolah (Peta 9). Berdasarkan Peta 9 dapat ditunjukkan sebaran kualitas SMA mengikuti sebaran Angka Partisipasi Sekolah. Sebaran Sekolah yang berkualitas tinggi persebarannya berada pada wilayah dengan Angka Partisipasi Sekolah tinggi.



Hasil analisis ini didukung oleh tabel matriks (Tabel 5.2) yang dapat dijelaskan sebagai berikut : Kualitas SMA dengan Angka Partisipasi Sekolah di kota Depok didominasi dengan karakteristik kualitas Ujian Nasional peringkat A di wilayah yang memiliki angka partisipasi sekolah tinggi terdapat 14 SMA yaitu terdapat di SMA Bintara, Cakra Buana, Mardi Yuana, Muhamadyah 1, Negri 1, Pelita, Sejahtera, Lazuardi terdapat di kecamatan Pancoranmas, SMA PGRI dan Pribadi di kecamatan Beji, SMA Negri 2, Negri 3, Yapemri, Tugu Ibu yang terdapat di Kecamatan Sukmajaya atau terkonsentrasi di bagian tengah dari Kota Depok. Terdapat 13 SMA dengan kualitas Ujian Nasional peringkat B di wilayah dengan angka partisipasi sekolah tinggi yaitu SMA Arahman, Budi Bakti, Kasih, Mawadah, PSKD VII, YPPD, Perintis yang terdapat di kecamatan Pancoranmas, SMA Muhamadyah 2, Putra Bangsa, Tarbiyah terdapat di kecamatan Beji, SMA Budi Utomo, An-Nizomiyah, Pemuka yang terdapat di kecamatan Sukmajaya juga tampak terkonsentrasi di bagian tengah. Terdapat 8 SMA dengan kualitas Ujian Nasional B di wilayah dengan angka partisipasi sekolah rendah yaitu SMA

Darusalam, Nurul Fikri, Raflesia, Pondok Daun, Tritura yang terdapat di kecamatan Cimanggis, SMA Al-Manar, Dian Didaktika, Tadika Pertiwi yang terdapat di kecamatan Limo, tampak tersebar di bagian timur dan utara . Terdapat 6 SMA dengan kualitas Ujian Nasional B di wilayah dengan angka partisipasi sekolah sedang yaitu SMA Al-Hasra, Islamiyah, Kharismawita, Muhamadyah 7, Yappan, Bina Sejahtera, yang terdapat di kecamatan Sawangan , tampak di bagian barat. Terdapat 3 SMA dengan kualitas Ujian Nasional A di wilayah dengan angka partisipasi sekolah rendah, yaitu SMA Negri 4 di kecamatan Cimanggis, SMA Labschool Cinere dan Negri 6 yang terdapat di kecamatan Limo. Terdapat 2 SMA dengan kualitas Ujian Nasional C di wilayah dengan angka partisipasi sekolah rendah yaitu SMA Tubagus Pangeling di kecamatan Cimanggis dan SMA Cakra Nusantara di kecamatan Limo. Terdapat 1 SMA dengan kualitas Ujian Nasional A di wilayah dengan angka partisipasi sekolah sedang yaitu SMA Negri 5 di kecamatan Sawangan. Terdapat 1 SMA dengan kualitas Ujian Nasional C di wilayah dengan angka partisipasi sekolah tinggi yaitu SMA Bina Taqwa, terdapat 1 SMA dengan kualitas Ujian Nasional C di wilayah dengan angka partisipasi sekolah sedang yaitu SMA Eka Prasetya di kecamatan Sawangan.

Tabel 5.2. Kualitas SMA dan Angka Partisipasi Sekolah di Kota Depok

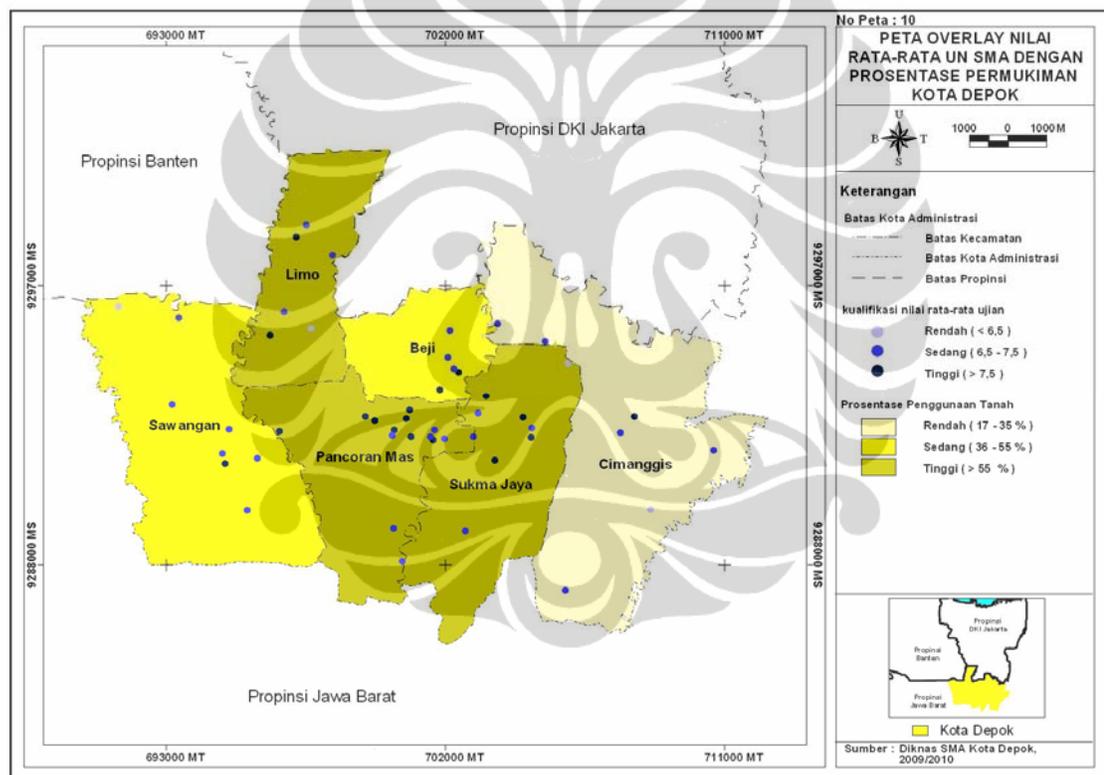
Kualitas (Peringkat UN)	Tinggi (lebih dari 40 %)	Sedang) (25% - 40%)	Rendah (kurang dari 25%)	Jumlah
A	14	1	3	18
B	13	6	8	27
C	1	1	2	4
Total	28	8	13	49

Sumber : Pengolahan Data

Untuk analisis statistik dengan menggunakan Anova satu arah dari tabel Anova didapat probabilitasnya $(0,023) < 0,05$ maka H_0 ditolak, artinya Peringkat Ujian Nasional dari wilayah Angka Partisipasi Sekolah berbeda.

5.1.3 Kualitas SMA dengan Penggunaan Tanah Permukiman

Berdasarkan overlay peta Nilai Rata-rata Ujian Nasional (peta 4) dengan peta Prosentase Permukiman terhadap Penggunaan Tanah (peta 16) didapat peta overlay Nilai Rata-rata Ujian Nasional SMA dengan Prosentase Permukiman terhadap Penggunaan Tanah (Peta 10). Berdasarkan Peta 11 dapat ditunjukkan bahwa sebaran kualitas SMA dengan kualitas tinggi mengikuti wilayah dengan Penggunaan Tanah Permukiman tinggi (lebih dari 55%).



Hasil analisis ini didukung oleh tabel matriks (Tabel 5.3) yang dapat dijelaskan sebagai berikut : Kualitas SMA dengan Penggunaan Tanah Pemukiman (Tabel 5.3) di kota Depok didominasi dengan karakteristik kualitas Ujian Nasional peringkat A di wilayah yang memiliki persentase permukiman tinggi terdapat 14 sekolah yaitu SMA Bintara, Cakra Buana, Mardi Yuana, Muhamadyah 1, Negri 1,

Pelita, Sejahtera dan Lazuardi Global Islamic yang terdapat di kecamatan Pancoranmas, SMANegri 2, Negri 3, Yapemri, Tugu Ibu di kecamatan Sukmajaya, dan SMA Labschool Cinere dan Negri 6 di kecamatan Limo , tampak terkonsentrasi di bagian tengah. Terdapat 13 SMA dengan kualitas Ujian Nasional peringkat B di wilayah yang memiliki prosentase penggunaan tanah permukiman tinggi yaitu SMA Arahman, Budi Bakti, Kasih, Mawadah, PSKD VII, YPPD, Perintis di kecamatan Pancoranmas, SMA Budi Utomo, An-Nizomiyah, Pemuka, di kecamatan Sukmajaya dan SMA Al-Manar, Dian Didaktika, Tadika Pertiwi di kecamatan Limo , tampak terkonsentrasi di bagian tengah dan ke utara. Terdapat 9 SMA dengan kualitas Ujian Nasional peringkat B di wilayah yang memiliki persentase penggunaan tanah sedang yaitu SMA Muhamadyah 2, Putra Bangsa, Tarbiyah di Kecamatan Beji, SMA Al-Hasra, Islamiyah, Kharismawita, Muhamadyah 7, Yappan, Bina Sejahtera di kecamatan Sawangan tampak menyebar dari bagian tengah ke arah barat. Terdapat 5 SMA dengan kualitas Ujian Nasional peringkat B di wilayah yang memiliki persentase permukiman rendah yaitu SMA Darusalam, Nurul Fikri, Raflesia, Paondok Daun, Tritura di kecamatan Cimanggis, tampak tersebar di bagian timur. Terdapat 3 SMA kualitas Ujian Nasional peringkat A di wilayah yang memiliki persentase permukiman sedang yaitu SMA PGRI dan Pribadi di kecamatan Beji, dan SMA Negri 5 di kecamatan Sawangan. Terdapat 1 SMA dengan kualitas Ujian Nasional peringkat A di wilayah yang memiliki persentase permukiman rendah yaitu SMA Negri 4 di kecamatan Cimanggis. Terdapat 1 SMA dengan kualitas Ujian Nasional peringkat C di wilayah yang memiliki persentase permukiman sedang yaitu SMA Eka Prasetya di Kecamatan Sawangan dan 1 SMA kualitas Ujian Nasional peringkat C di wilayah yang memiliki persentase permukiman rendah yaitu SMA Tubagus Pangeling di Kecamatan Cimanggis

Tabel 5.3. Kualitas SMA dan Penggunaan Tanah Permukiman di Kota Depok.

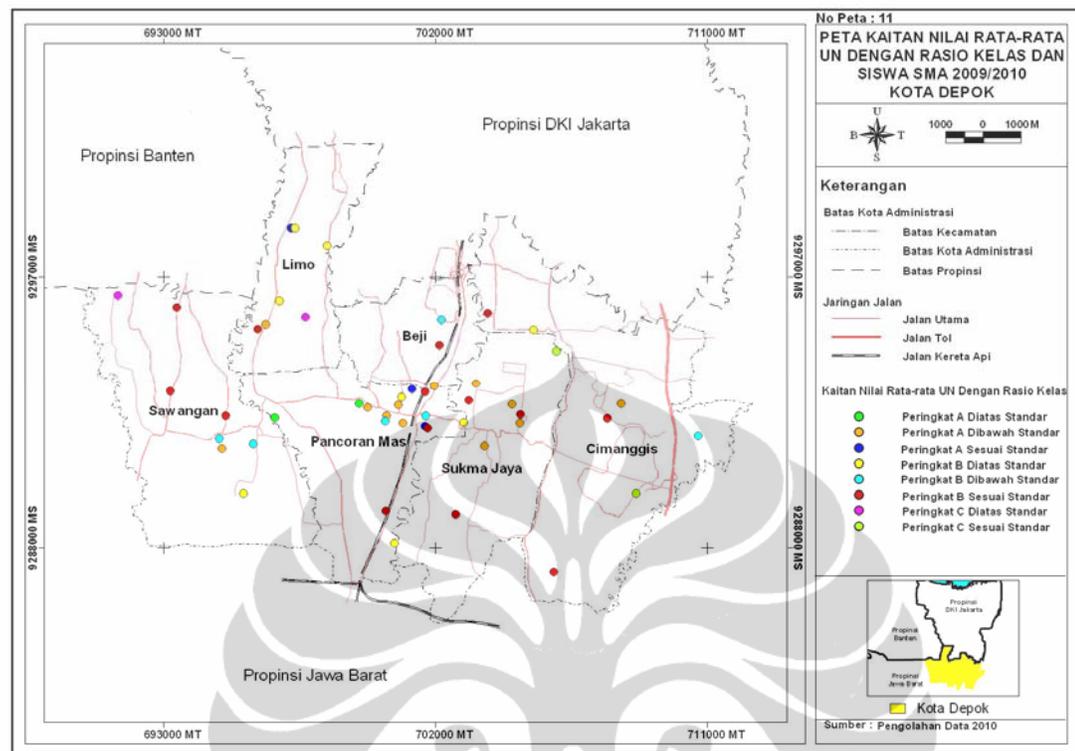
Kualitas (Peringkat UN)	Penggunaan Tanah Permukiman Tinggi (> 55%)	Penggunaan Tanah Permukiman Sedang (36% - 55%)	Penggunaan Tanah Permukiman Rendah (17% - 35%)	Jumlah
A	14	3	1	18
B	13	9	5	27
C	2	1	1	4
Total	29	13	7	49

Sumber : Pengolahan Data

Untuk analisis statistik dengan menggunakan Anova satu arah, dari tabel Anova didapat probabilitasnya $(0,241) > 0,05$ maka H_0 diterima, artinya Peringkat Ujian Nasional dari wilayah Penggunaan Tanah Permukiman sama.

5.1. 4 Kualitas SMA dengan Rasio Kelas dan Siswa

Berdasarkan overlay peta Nilai Rata-rata Ujian Nasional (peta 4) dengan peta Rasio Kelas dan Siswa (peta 5) didapat peta Kaitan Nilai Rata-rata UN dengan Rasio Kelas dan Siswa SMA (Peta 11). Berdasarkan Peta 11 dapat ditunjukkan bahwa sebaran SMA dengan kualitas tinggi memiliki Rasio Kelas dan Siswa dibawah Standar (1 kelas menampung lebih dari 32 siswa) tampak terkonsentrasi di bagian tengah Kota Depok .



Hasil analisis ini didukung oleh tabel matriks (Tabel 5.4) yang dapat dijelaskan sebagai berikut : Kualitas SMA dengan rasio kelas dan siswa di Kota Depok didominasi dengan karakteristik sekolah-sekolah dengan kualitas Ujian Nasional peringkat B memiliki rasio kelas dan siswa sesuai standar yaitu ada 14 sekolah yang tersebar di seluruh kecamatan di Kota Depok kecuali kecamatan Limo yaitu SMA Arahman, Kasih, YPPD di kecamatan Pancoranmas, SMA Muhamadiyah 2, Putra Bangsa di kecamatan Beji, SMA Budi Utomo, An-Nizomiyah, Pemuka di kecamatan Sukmajaya, SMA Nurul Fikri, Pondok Daun, Tritura di kecamatan Cimanggis, SMA Al-Hasra, Kharismawita, Muhamadiyah 7 di kecamatan Sawangan. Terdapat 13 sekolah dengan kualitas Ujian Nasional peringkat A memiliki rasio Kelas dan siswa dibawah standar tampak terkonsentrasi di bagian tengah kota Depok yaitu SMA Bintara, Mardi Yuana, Muhamadiyah 1, Negri 1, Sejahtera di kecamatan Pancoranmas, SMA Pribadi di kecamatan Beji, SMA Negri 2, Negri 3, Yapemri, Tugu Ibu di kecamatan Sukmajaya, SMA Negri 4 di kecamatan Cimanggis, SMA

Negri 5 di kecamatan Sawangan , dan SMA Negri 6 di kecamatan Limo, semua SMA Negri di kota Depok berada pada karakteristik ini yaitu peringkat A dan daya tampung siswa dalam satu kelas lebih dari 32 siswa. Terdapat 7 sekolah dengan kualitas Ujian Nasional peringkat B memiliki rasio kelas dan siswa diatas standar yaitu SMA Budi Bakti, Mawadah di kecamatan Pancoranmas, SMA Raflesia di kecamatan Cimanggis, SMA Bina Sejahtera di kecamatan Sawangan, SMA Al-Manar, Dian Didaktika, Tadika Pertiwi di kecamatan Limo. Terdapat 6 sekolah yang dengan kualitas Ujian Nasional peringkat B memiliki rasio kelas dan siswa dibawah standar yaitu SMA PSKD VII, Perintis di kecamatan Pancoranmas, SMA Tarbiyah di kecamatan Beji, SMA Darusalam di kecamatan Cimanggis, SMA Islamiyah, Yappan di kecamatan Sawangan. Terdapat 3 sekolah yang dengan kualitas Ujian Nasional peringkat A memiliki rasio kelas dan siswa sesuai standar yaitu SMA Pelita di kecamatan Pancoranmas, SMA PGRI di kecamatan Beji, SMA Labschool Cinere di kecamatan Limo. Terdapat 2 sekolah dengan kualitas Ujian Nasional peringkat A memiliki rasio kelas dan siswa diatas standar yaitu SMA Cakra Buana, dan Lazurdi Islamic School di kecamatan Pancoranmas . Terdapat 2 sekolah dengan kualitas Ujian Nasional peringkat C memiliki rasio Kelas dan siswa diatas standar yaitu SMA Eka Prasetya di kecamatan Sawangan dan SMA Cakra Nusantara di kecamatan Limo . Terdapat 2 sekolah dengan kualitas Ujian Nasional peringkat C memiliki rasio Kelas dan siswa sesuai standar yaitu SMA Bina Taqwa di kecamatan Sukmajaya dan SMA Tubagus Pangeling di kecamatan Cimanggis. Secara spasial tampak sekolah-sekolah dengan peringkat A dan rasio kelas dan siswa di bawah standar terkonsentrasi di bagian tengah (Peta 11) .

Tabel 5.4. Kualitas SMA dengan Rasio Kelas dan Siswa di Kota Depok

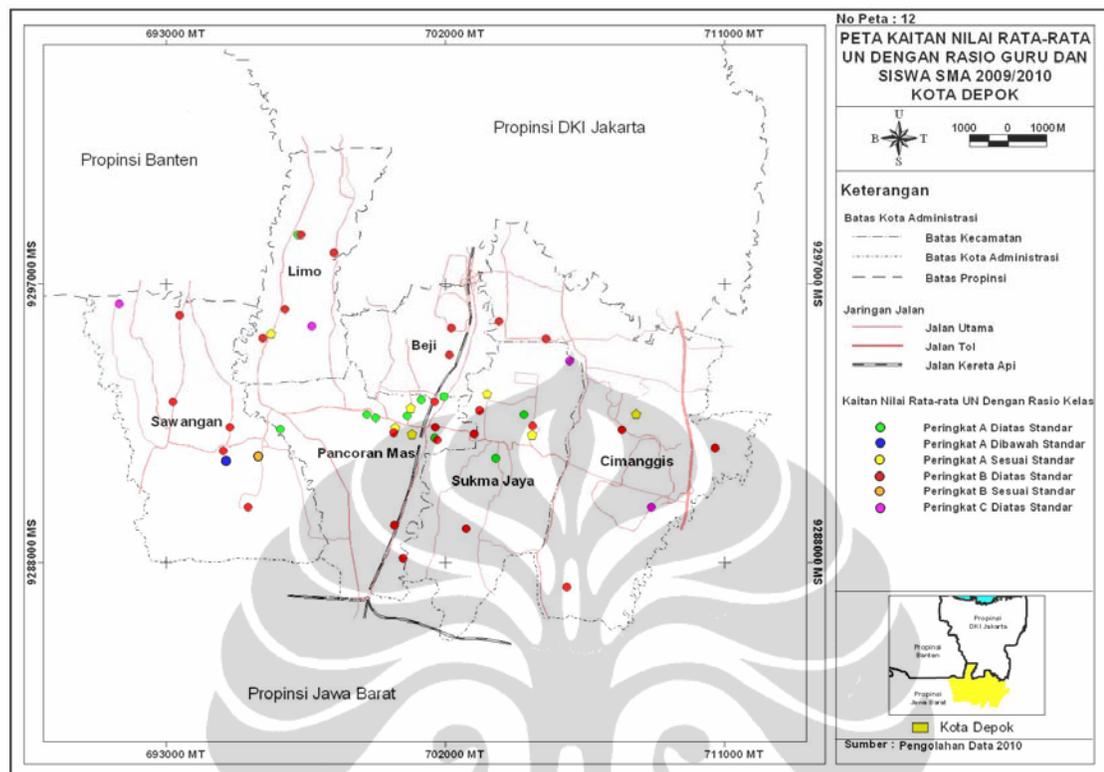
Kualitas (Peringkat UN)	Diatas Standar (7 – 19 Siswa)	Sesuai Standar (20 – 32 Siswa)	Dibawah Standar (> 32 Siswa)	Jumlah
A	2	3	13	18
B	7	14	6	27
C	2	2	-	4
Total	11	19	19	49

Sumber : Pengolahan Data

Untuk analisis statistik diperoleh Korelasi Pearson (Pearson Correlation) = 0,345. Nilai 0,345 merupakan nilai r hitung. Angka ini menunjukkan korelasi atau hubungan yang cukup kuat antara Rasio Kelas dan Siswa dan Nilai Rata-Rata Ujian Nasional.

5.1.5. Kualitas SMA dengan Rasio Guru dan Siswa

Berdasarkan overlay peta Nilai Rata-rata Ujian Nasional (peta 4) dengan peta Rasio Guru dan Siswa (peta 6) didapat peta Kaitan Nilai Rata-rata UN dengan Rasio Guru dan Siswa SMA (Peta 12). Berdasarkan Peta 12 dapat ditunjukkan bahwa sebaran SMA dengan kualitas tinggi memiliki Rasio Guru dan Siswa diatas Standar tampak terkonsentrasi di bagian tengah Kota Depok .



Hasil analisis ini didukung oleh tabel matriks (Tabel 5.5) yang dapat dijelaskan sebagai berikut : Kualitas SMA dengan rasio guru dan siswa di Kota Depok didominasi dengan karakteristik sekolah-sekolah dengan kualitas Ujian Nasional peringkat B memiliki rasio guru dan siswa diatas standar yaitu ada 26 sekolah yaitu SMA Arahman, Budi Bakti, Kasih, Mawadah, PSKD VII, YPPD, Perintis di kecamatan Pancoranmas, SMA Muhamadyah 2, Putra Bangsa, Tarbiyah di kecamatan Beji, SMA Budi Utomo, An-Nizomiyah, Pemuka di kecamatan Sukmajaya, SMA Darusalam, Nurul Fikri, Raflesia, Pondok Daun, Tritura di kecamatan Cimanggis, SMA Al-Hasra, Islamiyah, Kharismawita, Muhamadyah 7, Bina Sejahtera di kecamatan Sawangan, SMA Al-Manar, Dian Didaktika, Tadika Pertiwi di kecamatan Limo, tampak tersebar di seluruh kota Depok. Terdapat 10 sekolah dengan kualitas Ujian Nasional peringkat A memiliki kondisi rasio Guru dan siswa diatas standar yaitu SMA Cakra Buana, Muhamadyah 1 Pancoranmas, Negri 1, Pelita, Lazuardi Global Islamic di kecamatan Pancoranmas, SMA PGRI, Pribadi di

kecamatan Beji, SMA Negri 2, Negri 3 di kecamatan Sukmajaya, SMA Labschool Cinere di kecamatan Limo, tampak terkonsentrasi di bagian tengah. Terdapat 7 sekolah dengan kualitas Ujian Nasional peringkat A yang memiliki rasio Guru dan siswa sesuai standar yaitu SMA Bintara, Madi Yuana, Sejahtera di kecamatan Pancoranmas, SMA Yapemri, Tugu Ibu di kecamatan Sukmajaya, SMA Negri 4 di kecamatan Cimanggis, dan SMANegri 6 di kecamatan Limo, tampak tersebar. Terdapat 4 sekolah dengan kualitas Ujian Nasional peringkat C memiliki kondisi rasio Guru dan siswa diatas standar yaitu SMA Bina Taqwa di kecamatan Sukmajaya, SMA Tubagus Pangeling di kecamatan Cimanggis, SMA Eka Prasetya di kecamatan Sawangan, SMA Cakra Nusantara di kecamatan Limo. Terdapat 1 sekolah dengan kualitas Ujian Nasional peringkat A memiliki rasio Guru dan siswa dibawah standar yaitu SMA Negri 5 di kecamatan Limo, Dan terdapat 1 sekolah dengan kualitas Ujian Nasional peringkat B memiliki kondisi rasio Guru dan siswa sesuai standar yaitu SMA YAPPAN di kecamatan Sawangan.

Tabel 5.5. Kualitas SMA dengan Rasio Guru dan Siswa

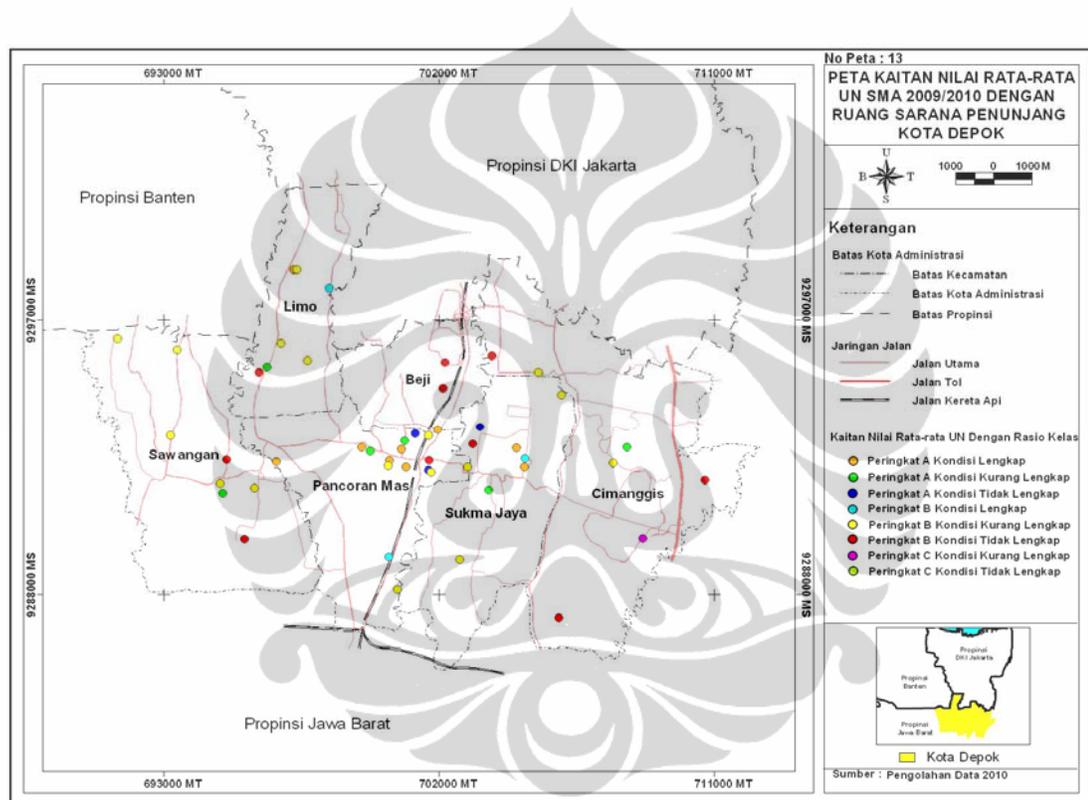
Kualitas (Peringkat UN)	Diatas Standar (2 – 14 Siswa)	Sesuai Standar (15 – 20 Siswa)	Dibawah Standar (> 20 Siswa)	Jumlah
A	10	7	1	18
B	26	1	-	27
C	4	-	-	4
Total	40	8	1	49

Sumber : Pengolahan Data

Untuk analisis statistik diperoleh Korelasi Pearson (Pearson Correlation) = 0,505. Nilai 0,505 merupakan nilai r hitung. Angka ini menunjukkan korelasi atau hubungan yang cukup kuat antara Rasio Guru dan Siswa dan Nilai Rata-Rata Ujian Nasional.

5.1.6 Kualitas SMA dengan Ruang Sarana Penunjang

Berdasarkan overlay peta Nilai Rata-rata Ujian Nasional (peta 4) dengan peta Jumlah Ruang Sarana Penunjang (peta 7) didapat peta Kaitan Nilai Rata-rata UN dengan Ruang Sarana Penunjang (Peta 13). Berdasarkan Peta 14 dapat ditunjukkan bahwa sebaran SMA dengan kualitas tinggi memiliki Ruang Sarana Penunjang dengan lengkap (lebih dari 8 ruang) tampak terkonsentrasi di bagian tengah .



Hasil analisis ini didukung oleh tabel matriks (Tabel 5.6) yang dapat dijelaskan sebagai berikut : Kualitas SMA dengan jumlah ruang sarana penunjang di kota Depok didominasi dengan karakteristik sekolah-sekolah dengan kualitas Ujian Nasional peringkat B memiliki jumlah ruang sarana penunjang kurang lengkap (5-8 ruang) ada 14 sekolah yaitu SMA Budi Bakti, Kasih, Mawadah, PSKD di kecamatan Pancoranmas, SMA Putra Bangsa di kecamatan Beji, SMA Anizomiyah di kecamatan Sukmajaya, SMA Raflesia di kecamatan Cimanggis, SMA Al-Hasra, Islamiyah,

Kharismawita, YAPPAN di kecamatan Sawangan, SMA Al-Manar, Tadika Pertiwi di kecamatan Limo, tampak tersebar di seluruh kota Depok. Terdapat 10 sekolah dengan kualitas Ujian Nasional peringkat B memiliki ruang sarana prasarana tidak lengkap yaitu SMA YPPD, Perintis di kecamatan Pancoranmas, SMA Muhamadyah 2, Tarbiyah di kecamatan Beji, SMA Pemuka di kecamatan Sukmajaya, SMA Darusalam, Nurul Fikri, Tritura di kecamatan Cimanggis, SMA Muhamadyah 7, Bina Sejahtera di kecamatan Sawangan, tampak tersebar. Terdapat 9 sekolah dengan kualitas Ujian Nasional peringkat A memiliki ruang sarana prasarana lengkap yaitu SMA Bintara, Cakra Buana, Mardi Yuana, Negri 1, Lazuardi Global Islamic di kecamatan Pancoranmas, SMA Pribadi di kecamatan Beji, SMANegri 2, Yapemri di kecamatan Sukmajaya, SMA Labschool Cinere di kecamatan Limo, tampak memusat. Terdapat 6 sekolah dengan kualitas Ujian Nasional peringkat A memiliki ruang sarana penunjang kurang lengkap yaitu SMA Muhamadyah 1, Sejahtera di kecamatan Pancoranmas, SMA Negri 3 di kecamatan Sukmajaya, SMA Negri 4 di kecamatan Cimanggis, SMA Negri 5 di kecamatan Sawangan, SMANegri 6 di kecamatan Limo, hampir semua SMA Negri berada pada karakteristik ini. Terdapat 3 sekolah dengan kualitas Ujian Nasional peringkat A memiliki ruang sarana prasarana tidak lengkap yaitu SMA Pelita di kecamatan Pancoranmas, SMA PGRI di kecamatan Beji, SMA Tugu Ibu di kecamatan Sukmajaya. Terdapat 3 sekolah dengan kualitas Ujian Nasional peringkat B memiliki ruang sarana prasarana lengkap yaitu SMA Arahman di kecamatan Pancoranmas, SMA Budi Utomo di kecamatan Sukmajaya, SMA Dian Didaktika di kecamatan Limo. Terdapat 1 sekolah dengan kualitas Ujian Nasional peringkat C memiliki ruang sarana prasarana kurang lengkap yaitu SMA Tubagus Pangeling di kecamatan Cimanggis. Terdapat 3 sekolah dengan kualitas Ujian Nasional peringkat C memiliki ruang sarana prasarana tidak lengkap yaitu SMA Bina Taqwa di kecamatan Sukmajaya, SMA Eka Prasetya di kecamatan Sawangan, dan SMA Cakra Nusantara di kecamatan Limo.

Tabel 5.6. Kualitas SMA dengan Ruang Sarana Penunjang di kota Depok

Kualitas (Peringkat UN)	Lengkap (> 9 ruang)	Kurang Lengkap (5-8 ruang)	Tidak Lengkap (1-4 ruang)	Jumlah
A	9	6	3	18
B	3	14	10	27
C	-	1	3	4
Total	12	21	16	49

Sumber : Pengolahan Data

Berdasarkan analisis statistik diperoleh Korelasi Pearson (Pearson Correlation) = 0,434. Nilai 0,434 merupakan nilai r hitung. Angka ini menunjukkan korelasi atau hubungan yang cukup kuat antara Ruang Sarana Penunjang dan Nilai Rata-Rata Ujian Nasional .

5.2. Uji Statistik Kualitas SMA dengan Faktor Internal

Uji statistik yang digunakan dalam penelitian ini adalah untuk mencari regresi antara Kualitas Sekolah yang dinilai dari Nilai rata-rata Ujian Nasional dengan variabel Rasio Kelas dan Siswa (X₁), Rasio Guru dan Siswa (X₂), Ruang Sarana Penunjang (X₃) dan Tingkat Kelulusan (X₄) (Tabel 5.8) Dan Menguji keterkaitan antara Kualitas Sekolah yang dinilai dari Nilai rata-rata Ujian Nasional dengan keempat variabel faktor internal.

Secara bersama – sama di uji statistik kaitan antara kualitas SMA dengan keempat faktor internal maka diperoleh R disebut juga dengan koefisien korelasi ganda. Dapat dibaca bahwa nilai koefisien korelasi antara variabel Rasio Kelas dan Siswa (X₁), Rasio Guru dan Siswa (X₂), dan Jumlah Ruang Sarana (X₃) terhadap *Nilai Rata-Rata Ujian Nasional* (Y) adalah 0,595, berarti hubungan antara Rasio Kelas dan Siswa, Rasio Guru dan Siswa, dan Jumlah Ruang Sarana dengan Nilai Rata-Rata Ujian Nasional adalah sebesar 59,50%. R Square disebut koefisien determinasi. Dari tabel dapat dibaca bahwa nilai R square (R²) adalah 0,354, artinya

35,40% variasi yang terjadi terhadap tinggi atau rendahnya Nilai Rata-Rata Ujian Nasional disebabkan variasi Rasio Kelas dan Siswa, Rasio Guru dan Siswa, dan Jumlah Ruang Sarana sedangkan sisanya (64,60 %) tidak dapat diterangkan. Didapat persamaan regresi

$$\hat{Y} = 6,502 + 0,003X_1 + 0,032X_2 + 0,066X_3$$

Dari persamaan dapat diuraikan sebagai berikut:

- Setiap kenaikan 1 skor variabel Rasio Kelas dan Siswa (X_1) dapat meningkatkan 0,003 skor variabel Nilai Rata-Rata Ujian Nasional dengan asumsi variabel bebas lainnya konstan.
- Setiap kenaikan 1 skor variabel Rasio Guru dan Siswa (X_2) dapat meningkatkan 0,032 skor variabel Nilai Rata-Rata Ujian Nasional dengan asumsi variabel bebas lainnya konstan.
- Setiap kenaikan 1 skor variabel Jumlah Ruang Sarana (X_3) dapat meningkatkan 0,066 skor variabel Nilai Rata-Rata Ujian Nasional dengan asumsi variabel bebas lainnya konstan

5.3. Wilayah Pengembangan Pendidikan SMA di Kota Depok

Wilayah pengembangan pendidikan adalah wilayah yang memiliki prioritas dalam pembangunan di bidang sektor pendidikan SMA sesuai dengan bobot dari variabel-variabel yang diteliti, makin tinggi bobot dari semua variabel makin utama tingkat prioritasnya untuk menentukan wilayah pengembangan pendidikan.

Dalam menentukan wilayah pengembangan pendidikan SMA di Kota Depok ditentukan dari beberapa variabel yaitu variabel eksternal berupa jumlah penduduk usia SMA (15-19 tahun), angka partisipasi sekolah, penggunaan tanah perumahan, dan juga ditentukan dari kondisi internal yang ada di tiap-tiap unit sekolah yang ada di kecamatan yaitu peringkat nilai rata-rata Ujian Nasional, Rasio Kelas dan Siswa, Rasio Guru Siswa, kelengkapan ruang sarana dan prasarana dan tingkat kelulusan siswa tiap SMA.

5.3.1. Jumlah Usia Sekolah (15-19 tahun)

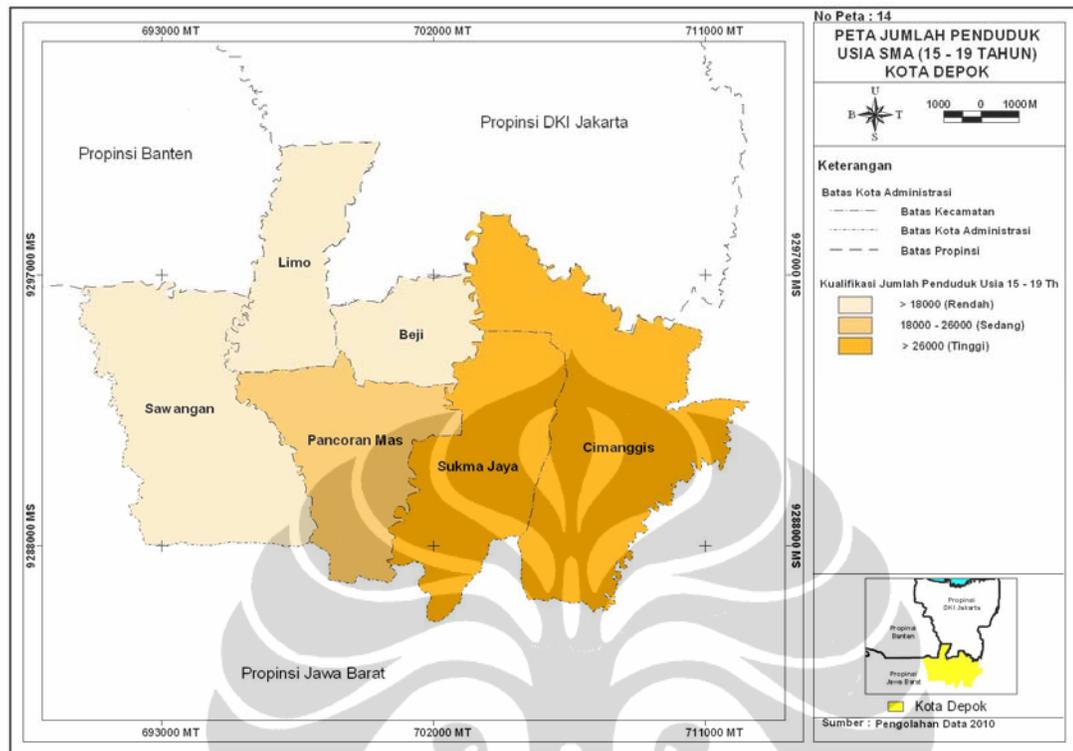
Dari data jumlah penduduk usia SMA (15-19 tahun) dapat diketahui terdapat variasi jumlah penduduk usia 15-19 tahun (Tabel 5.8), daerah yang menjadi prioritas utama pengembangan pendidikan adalah daerah yang memiliki jumlah penduduk usia tersebut tergolong tinggi (bobot 3) . Daerah yang menjadi prioritas kedua pengembangan pendidikan adalah daerah yang memiliki jumlah penduduk usia tersebut tergolong sedang (bobot 2). Daerah yang menjadi prioritas ketiga pengembangan pendidikan adalah daerah yang memiliki jumlah penduduk usia tersebut tergolong rendah (bobot 1). Berdasarkan peta jumlah penduduk usia SMA dapat diketahui kecamatan Cimanggis dan Sukmajaya memiliki prioritas utama, kecamatan Pancoranmas menjadi prioritas kedua, dan kecamatan Beji, Swangan, Limo menjadi prioritas ketiga dalam menentukan wilayah pengembangan pendidikan di Kota Depok (Peta 14).

Tabel 5.8 Jumlah Penduduk usia SMA (15-19 tahun) di Kota Depok
Tahun 2009

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk Usia 15-19 tahun	Keterangan	Bobot
1	Pancoranmas	23104	Sedang	2
2	Beji	9761	Rendah	1
3	Sukmajaya	28433	Tinggi	3
4	Cimanggis	34636	Tinggi	3
5	Sawangan	15928	Rendah	1
6	Limo	12274	Rendah	1

Sumber : Pengolahan Data

Keterangan: Kurang dari 18.000 = Rendah
 18.000 – 26.000 = Sedang
 Lebih dari 26.000 = Tinggi



5.3.2 Angka Partisipasi Sekolah

Dari data Angka Partisipasi Sekolah (APS) dapat diketahui terdapat variasi APS di tiap-tiap Kecamatan (Tabel 5.9), daerah yang menjadi prioritas utama pengembangan pendidikan adalah daerah yang memiliki Angka Partisipasi Sekolah tergolong rendah (bobot 3) . Daerah yang menjadi prioritas kedua pengembangan pendidikan adalah daerah yang memiliki Angka Partisipasi Sekolah tergolong sedang (bobot 2). Daerah yang menjadi prioritas ketiga pengembangan pendidikan adalah daerah yang memiliki Angka Partisipasi Sekolah tergolong tinggi (bobot 1). Berdasarkan data Angka Partisipasi Sekolah dapat diketahui kecamatan Cimanggis dan Limo memiliki prioritas utama, kecamatan Sawangan menjadi prioritas kedua, dan kecamatan Pancoranmas, Beji dan Sukmajaya menjadi prioritas ketiga dalam menentukan wilayah pengembangan pendidikan di Kota Depok (Peta 15)

Tabel 5.9. Angka Partisipasi Sekolah SMA di Kota Depok tahun 2009

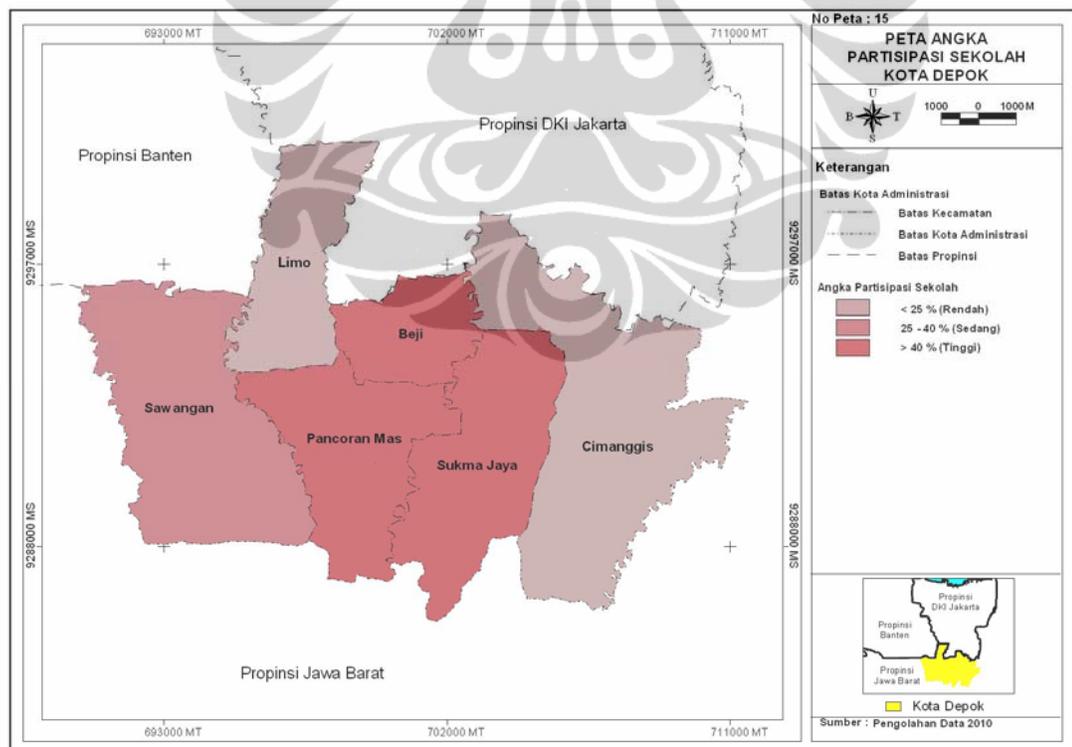
No	Kecamatan	Angka Partisipasi Sekolah (%)	Keterangan	Bobot
1	Pancoranmas	61,81	Tinggi	1
2	Beji	50,57	Tinggi	1
3	Sukmajaya	50,78	Tinggi	1
4	Cimanggis	7,74	Rendah	3
5	Sawangan	25,83	Sedang	2
6	Limo	15,84	Rendah	3

Sumber : Pengolahan Data

Keterangan : Kurang dari 25% = Rendah

25% - 43% = Sedang

Lebih dari 40% = Tinggi



5.3.3 Penggunaan Tanah Permukiman

Dari data Penggunaan Tanah Permukiman dapat diketahui terdapat variasi di tiap-tiap Kecamatan (Tabel 5.10), daerah yang menjadi prioritas utama pengembangan pendidikan adalah daerah yang memiliki Penggunaan Tanah Permukiman tergolong tinggi (bobot 3) . Daerah yang menjadi prioritas kedua pengembangan pendidikan adalah daerah yang memiliki Penggunaan Tanah Permukiman tergolong sedang (bobot 2). Daerah yang menjadi prioritas ketiga pengembangan pendidikan adalah daerah yang memiliki Penggunaan Tanah Permukiman tergolong rendah (bobot 1). Berdasarkan data Penggunaan Tanah Permukiman dapat diketahui kecamatan Pancoranmas, Sukmajaya dan Limo memiliki prioritas utama, kecamatan Beji dan Sawangan menjadi prioritas kedua, dan kecamatan Cimanggis menjadi prioritas ketiga dalam menentukan wilayah pengembangan pendidikan di Kota Depok (Peta 16)

Tabel 5.10. Penggunaan Tanah Permukiman Kota Depok tahun 2009

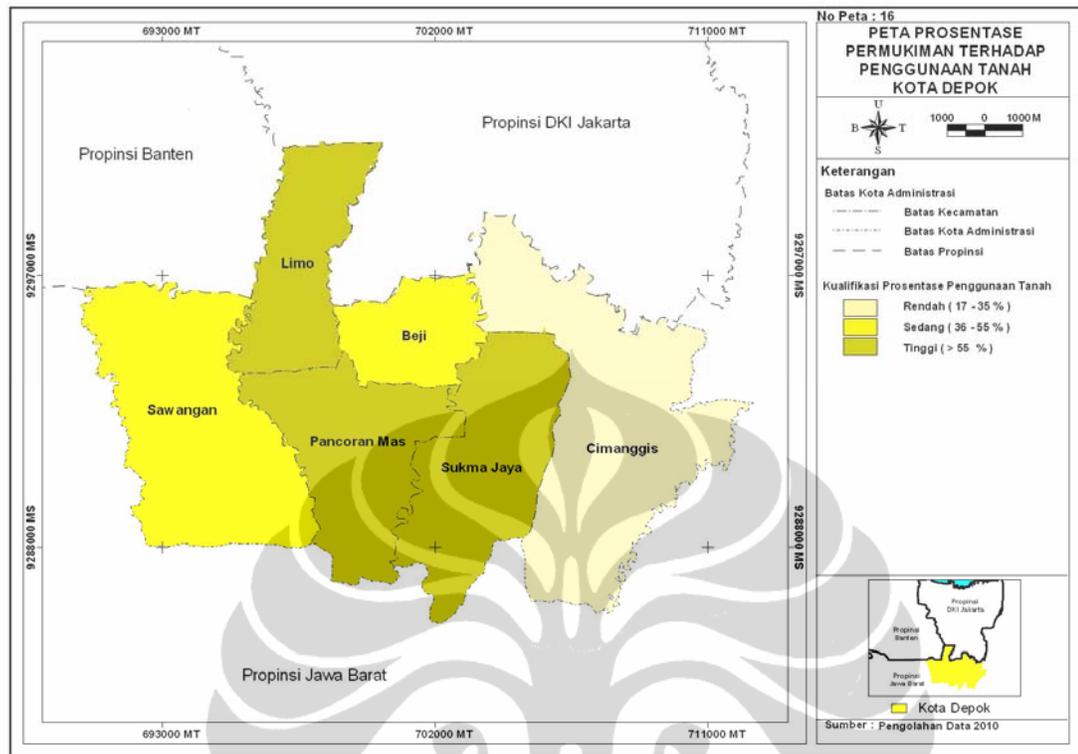
No	Kecamatan	Penggunaan Tanah Perumahan(%)	Keterangan	Bobot
1	Pancoranmas	61,14	Tinggi	3
2	Beji	49,54	Sedang	2
3	Sukmajaya	74,55	Tinggi	3
4	Cimanggis	17,74	Rendah	1
5	Sawangan	50,7	Sedang	2
6	Limo	74,72	Tinggi	3

Sumber : Pengolahan Data

Keterangan : 17% - 36% = Rendah

36% - 55% = Sedang

Lebih dari 55 % = Tinggi



5.3.4 Prosentase Nilai Rata-rata Ujian Nasional

Yang menjadi patokan dalam menentukan wilayah pengembangan pendidikan dilihat dari persentase sekolah yang memiliki nilai rata-rata Ujian Nasional peringkat A. Dari data Nilai Rata-rata Ujian Nasional dapat diketahui terdapat variasi di tiap-tiap Kecamatan (Tabel 5.11), daerah yang menjadi prioritas utama pengembangan pendidikan adalah daerah yang memiliki prosentase sekolah-sekolah dengan nilai rata-rata UN peringkat A tergolong rendah (bobot 3). Daerah yang menjadi prioritas kedua adalah daerah yang memiliki prosentase sekolah-sekolah dengan nilai rata-rata UN peringkat A tergolong sedang (bobot 2). Daerah yang menjadi prioritas ketiga pengembangan pendidikan adalah daerah yang memiliki prosentase sekolah-sekolah dengan nilai rata-rata UN peringkat A tergolong tinggi (bobot 1). Berdasarkan data persentase sekolah yang memiliki peringkat A pada setiap kecamatan dapat diketahui kecamatan Cimanggis dan Sawangan menjadi prioritas utama, kecamatan Beji dan Limo menjadi prioritas kedua, dan kecamatan Pancoranmas dan Sukmajaya

menjadi prioritas ketiga dalam menentukan wilayah pengembangan pendidikan di Kota Depok (Peta 17)

Tabel 5.11. Prosentase Nilai Rata-rata Ujian Nasional Peringkat A di Kota Depok tahun 2009

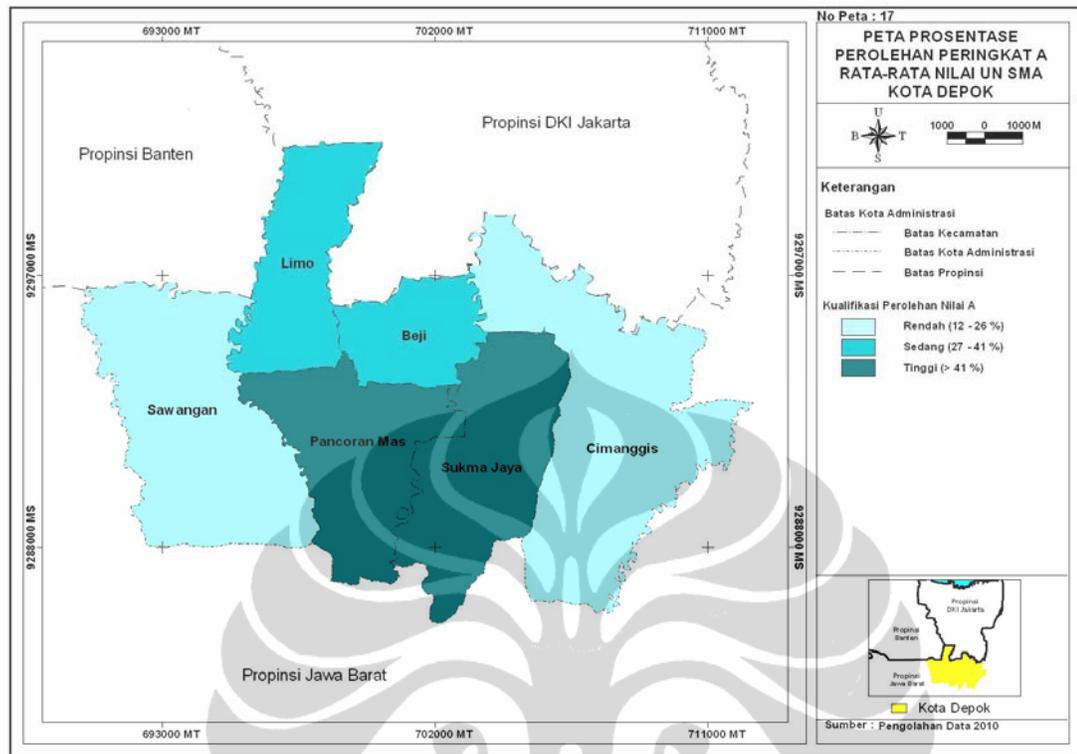
No	Kecamatan	Nilai Rata-rata UN Peringkat A (%)	Keterangan	Bobot
1	Pancoranmas	53,3	Tinggi	1
2	Beji	40	Sedang	2
3	Sukmajaya	50	Tinggi	1
4	Cimanggis	14,28	Rendah	3
5	Sawangan	12,50	Rendah	3
6	Limo	33,3	Sedang	2

Sumber : Pengolahan Data

Keterangan : 12% - 26% = Rendah

26% - 41% = Sedang

Lebih dari 41 % = Tinggi



5.3.5 Prosentase Rasio Kelas dan Siswa

Yang menjadi patokan dalam menentukan wilayah pengembangan pendidikan dilihat dari rasio Guru dan Siswa yang sudah sesuai Standar Nasional Pendidikan yaitu dalam satu kelas memiliki daya tampung lebih dari 35 siswa . Dari data Rasio kelas dan siswa dapat diketahui terdapat variasi rasio kelas dan siswa di tiap-tiap Kecamatan (Tabel 5.12), daerah yang menjadi prioritas utama pengembangan pendidikan adalah daerah yang memiliki prosentase sekolah-sekolah dengan rasio kelas dan siswa dibawah standar tergolong tinggi (bobot 3) . Daerah yang menjadi prioritas kedua adalah daerah yang memiliki prosentase sekolah-sekolah dengan rasio kelas dan siswa dibawah standar tergolong sedang (bobot 2). Daerah yang menjadi prioritas ketiga pengembangan pendidikan adalah daerah yang memiliki prosentase sekolah-sekolah dengan rasio kelas dan siswa dibawah standar tergolong rendah (bobot 1). Berdasarkan data persentase sekolah yang memiliki rasio kelas dan siswa dibawah standar pada setiap kecamatan dapat diketahui kecamatan Pancoranmas

dan Sukmajaya menjadi prioritas utama, kecamatan Beji, Cimanggis dan Sawangan menjadi prioritas kedua, dan kecamatan Limo menjadi prioritas ketiga dalam menentukan wilayah pengembangan pendidikan di Kota Depok (Peta 18).

Tabel 5.12. Prosentase Rasio Kelas dan Siswa Dibawah Standar di Kota Depok
Tahun 2009

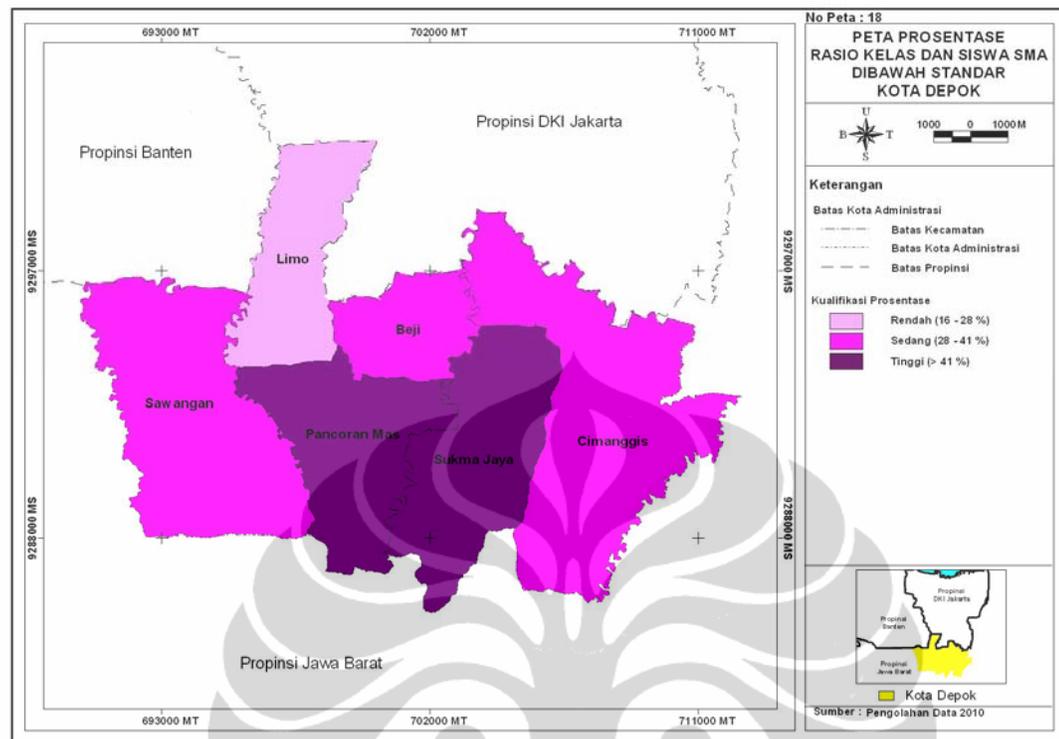
No	Kecamatan	Rasio Kelas dan Siswa Dibawah Standar (%)	Keterangan	Bobot
1	Pancoranmas	46,6	Tinggi	3
2	Beji	40	Sedang	2
3	Sukmajaya	50	Tinggi	3
4	Cimanggis	28,58	Sedang	2
5	Sawangan	35,50	Sedang	2
6	Limo	16,60	Rendah	1

Sumber : Pengolahan Data

Keterangan : 16% - 28% = Rendah

28% - 41% = Sedang

Lebih dari 41 % = Tinggi



5.3.6 Prosentase Rasio Guru dan Siswa

Yang menjadi patokan dalam menentukan wilayah pengembangan pendidikan dilihat dari rasio kelas dan siswa yang berada dibawah Standar Nasional Pendidikan yaitu jika satu orang guru melayani siswa lebih dari 20 siswa . Dari data Rasio Guru dan Siswa dapat diketahui terdapat variasi rasio guru dan siswa di tiap-tiap Kecamatan (Tabel 5.13), daerah yang menjadi prioritas utama pengembangan pendidikan adalah daerah yang memiliki prosentase sekolah-sekolah dengan rasio guru dan siswa dibawah standar tergolong tinggi (bobot 3) . Daerah yang menjadi prioritas kedua adalah daerah yang memiliki prosentase sekolah-sekolah dengan rasio guru dan siswa dibawah standar tergolong sedang (bobot 2). Daerah yang menjadi prioritas ketiga pengembangan wilayah pendidikan adalah daerah yang memiliki prosentase sekolah-sekolah dengan rasio guru dan siswa dibawah standar tergolong rendah (bobot 1). Berdasarkan data persentase sekolah yang memiliki rasio kelas dan siswa dibawah standar pada setiap kecamatan dapat diketahui kecamatan Sawangan

menjadi prioritas utama, sedangkan kecamatan lainnya termasuk dalam prioritas ketiga, artinya semua kecamatan di Kota Depok kecuali kecamatan Sawangan sudah dapat memenuhi kebutuhan guru (Peta 19)

Tabel 5.13. Prosentase Rasio Guru dan Siswa Dibawah Standar di Kota Depok
Tahun 2009

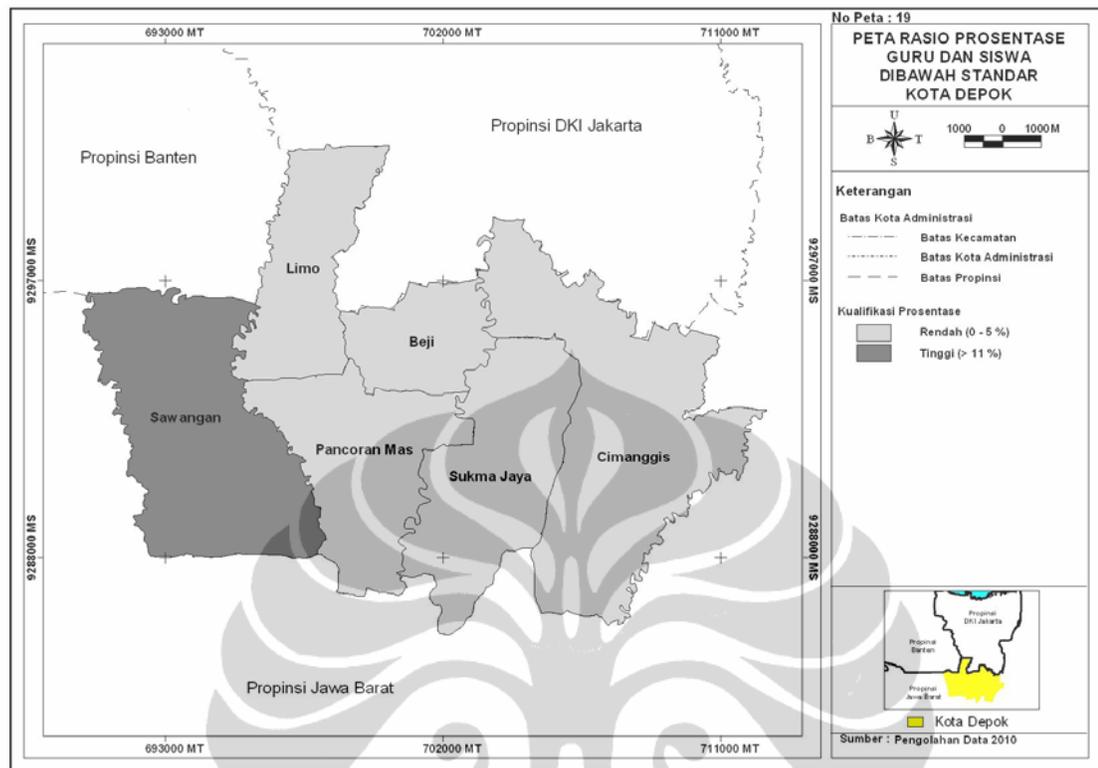
No	Kecamatan	Rasio Guru dan Siswa Dibawah Standar (%)	Keterangan	Bobot
1	Pancoranmas	0	Rendah	1
2	Beji	0	Rendah	1
3	Sukmajaya	0	Rendah	1
4	Cimanggis	0	Rendah	1
5	Sawangan	12,5	Tinggi	3
6	Limo	0	Rendah	1

Sumber : Pengolahan Data

Keterangan : 0% - 5% = Rendah

6% - 11% = Sedang

Lebih dari 11 % = Tinggi



5.3.7 Prosentase Tingkat Kelengkapan Ruang Sarana Penunjang

Yang menjadi patokan dalam menentukan wilayah pengembangan pendidikan dilihat dari persentase sekolah-sekolah yang memiliki tingkat kelengkapan ruang sarana penunjang setiap kecamatan yang ada di kota Depok . Dari data tingkat kelengkapan ruang sarana penunjang dapat diketahui terdapat variasi tingkat kelengkapan ruang sarana penunjang di tiap-tiap Kecamatan (Tabel 5.14), daerah yang menjadi prioritas utama pengembangan pendidikan adalah daerah yang memiliki prosentase sekolah-sekolah dengan tingkat kelengkapan ruang sarana penunjang tergolong rendah (bobot 3) daerah yang menjadi prioritas kedua pengembangan pendidikan adalah daerah yang memiliki prosentase sekolah-sekolah dengan tingkat kelengkapan ruang sarana penunjang tergolong sedang (bobot 2), dan daerah yang menjadi prioritas ketiga pengembangan pendidikan adalah daerah yang memiliki prosentase sekolah-sekolah dengan tingkat kelengkapan sarana penunjang

tergolong tinggi (bobot 3). Berdasarkan data persentase sekolah yang memiliki tingkat kelengkapan ruang sarana penunjang pada setiap kecamatan dapat diketahui kecamatan Sawangan menjadi prioritas utama karena tidak ada sekolah di kecamatan tersebut yang memiliki ruang sarana penunjang katagori lengkap yaitu memiliki ruang sarana penunjang lebih dari 9 ruang sarana, kecamatan Beji, Cimanggis dan Limo menjadi prioritas kedua dan kecamatan Pancoranmas dan Sukmajaya menjadi prioritas ketiga dalam menentukan wilayah pengembangan pendidikan di Kota Depok (Peta 20)

Tabel 5.14. Prosentase Tingkat Kelengkapan Sarana Penunjang Kota Depok Tahun Ajaran 2009/2010

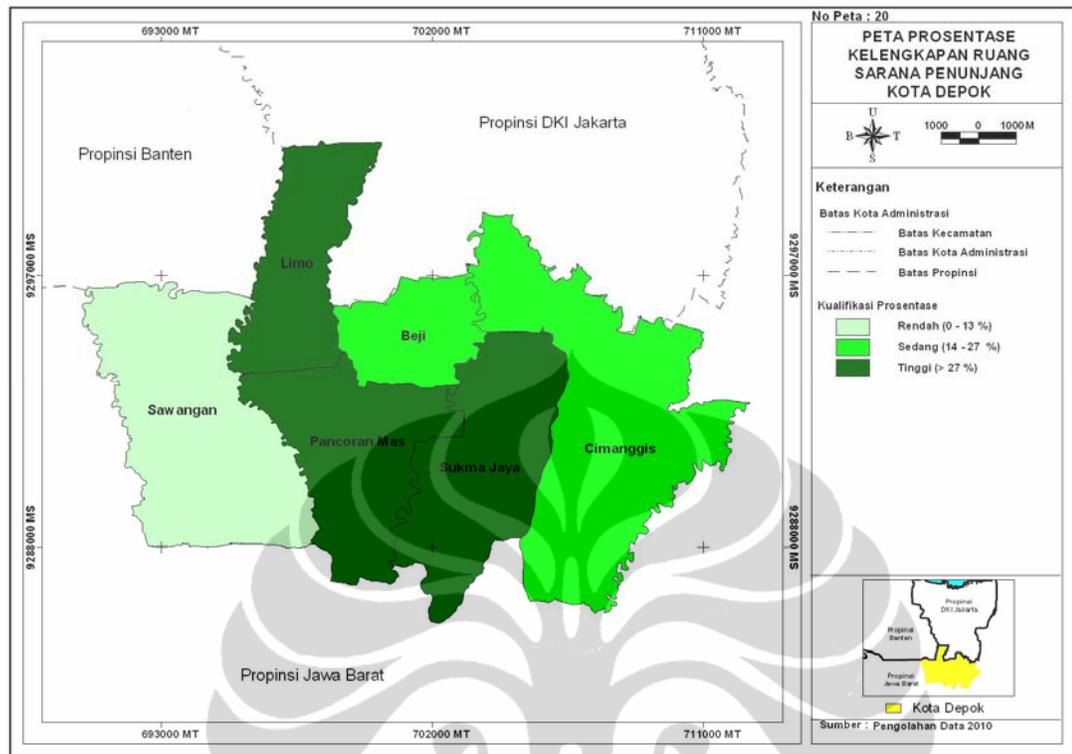
No	Kecamatan	Tingkat Kelengkapan Ruang Sarana Penunjang (%)	Keterangan	Bobot
1	Pancoranmas	40	Tinggi	1
2	Beji	20	Sedang	2
3	Sukmajaya	38	Tinggi	1
4	Cimanggis	14	Sedang	2
5	Sawangan	0	Rendah	3
6	Limo	33	Tinggi	1

Sumber : Pengolahan Data

Keterangan : 0% - 13% = Rendah

14% - 27% = Sedang

Lebih dari 27 % = Tinggi



5.4 Wilayah Pengembangan Pendidikan SMA di Kota Depok

Berdasarkan pengolahan data diatas didapat wilayah pengembangan pendidikan SMA di Kota Depok. Untuk menentukan Wilayah pengembangan pendidikan SMA ditentukan dari 8 variabel yang telah diolah dan ditentukan bobotnya. Dari semua bobot variabel yang ada di tiap kecamatan dijumlahkan sehingga diketahui jumlah total dari bobot variabel di setiap kecamatan. Semakin tinggi bobotnya menunjukkan daerah tersebut menjadi urutan utama dalam prioritas pengembangan pendidikan SMA (Tabel 5.16).

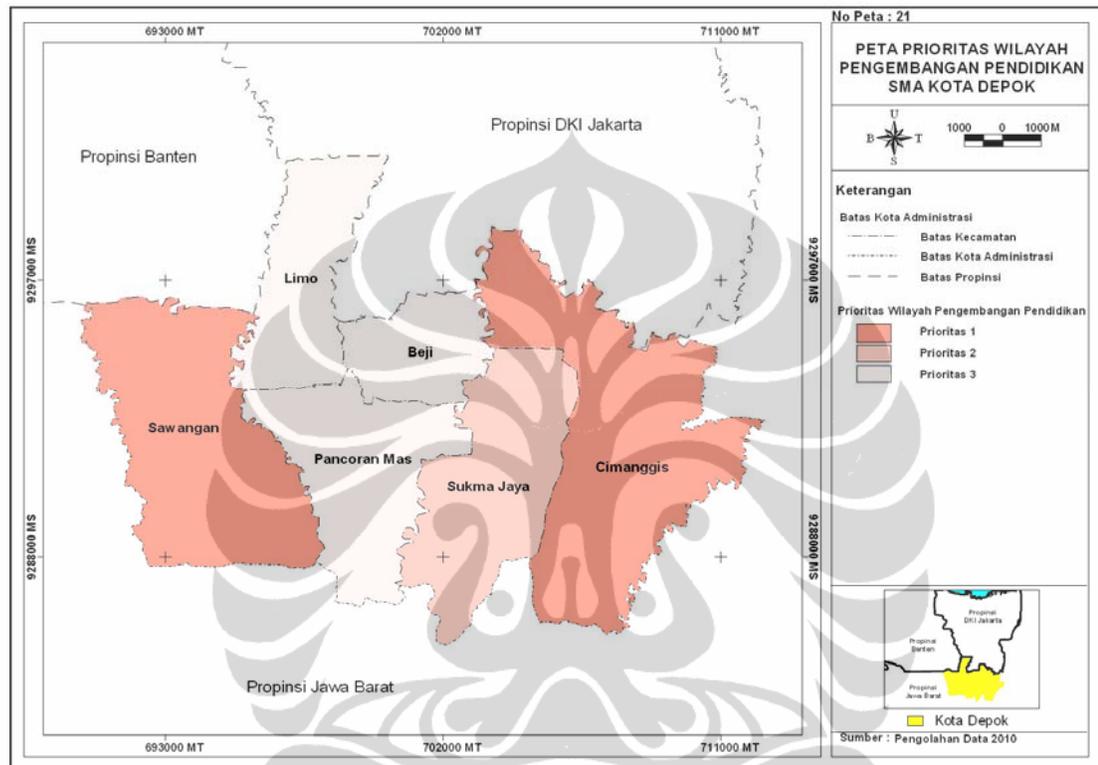
Tabel 5.16 Wilayah Pengembangan Pendidikan SMA di Kota Depok

Variabel	Panco- ranmas	Beji	Sukma jaya	Cimang- gis	Sawangan	Limo
Jumlah Penduduk Usia Sekolah	2	1	3	3	1	1
Angka Partisipasi Sekolah	1	1	1	3	2	1
Prosentase Penggunaan Tanah Permukiman	3	2	3	1	2	3
Prosentase SMA yang memiliki peringkat A	1	2	1	3	3	2
Prosentase SMA yang memiliki rasio kelas dan siswa dibawah standar	3	2	3	2	2	1
Prosentase SMA yang memiliki rasio guru dan siswa dibawah standar	1	1	1	1	3	1
Prosentase SMA yang memiliki kelengkapan ruang sarana Penunjang	1	2	1	2	3	1
Jumlah	12	11	13	15	16	12

Sumber : Pengolahan Data

Berdasarkan hasil pengolahan data diperoleh bobot dari variabel-variabel di tiap kecamatan berkisar 11- 16 . Dengan demikian diklasifikasikan menjadi 3 wilayah prioritas yaitu prioritas utama dengan bobot lebih dari 14, prioritas kedua dengan bobot 13 – 14, dan prioritas ketiga dengan bobot 11-12. Dengan demikian diketahui Kecamatan Cimanggis dan Sawangan menjadi wilayah prioritas utama, kecamatan Sukmajaya menjadi prioritas kedua dan kecamatan Pancoranmas, Beji dan Limo

menjadi prioritas ketiga dalam pengembangan wilayah pendidikan SMA di Kota Depok (Peta 21). Jika dilihat dari posisi dalam ruang maka wilayah prioritas utama terletak jauh dari pusat kota.



BAB 6

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan yang dilakukan sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Karakteristik wilayah sebaran kualitas SMA bervariasi. Sekolah-sekolah yang berkualitas tinggi persebarannya berada pada wilayah dengan karakteristik jumlah penduduk usia sekolah kategori sedang, angka partisipasi kategori tinggi, penggunaan tanah permukiman kategori tinggi dan memiliki rasio kelas dan siswa dibawah standar, memiliki rasio guru dan siswa diatas standar, memiliki ruang sarana penunjang lengkap .
2. Wilayah pengembangan pendidikan SMA prioritas utama adalah kecamatan Cimanggis dan kecamatan Sawangan, prioritas kedua kecamatan Sukmajaya dan prioritas ketiga kecamatan Pancoranmas, Beji dan Limo. Jika dilihat dari posisi dalam ruang maka wilayah prioritas utama terletak jauh dari pusat kota.

DAFTAR PUSTAKA

Alfandi, W., 2001. *Epistemologi Geografi*. Gajah Mada University Press, Yogyakarta.

AM, Masyhuri ,2004, *UN dan Politisasi Standar Mutu*, Sekretaris Majelis Pertimbangan dan Pemberdayaan Pendidikan Agama Islam, [http:// www.pendis.kemenag.go.id /index.php? a = artikel&id 2 = unpolitisasistandarmutu](http://www.pendis.kemenag.go.id/index.php?a=artikel&id2=unpolitisasistandarmutu)

Agustin, Tri , 2006 , *Arahan Penyediaan Fasilitas Pendidikan Dasar dan Menengah di WP Gedebage Tahun 2010*, Tugas Akhir Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Institut Teknologi Bandung.

Chapin Jr, F.Stuart, Edward J Kaiser, Davis R Godschalk 1995, *Urban Land UsebPlanning*, University of Illinois Press, Urbana and Chicago

Chiara, Joseph De, Lee E. Koppelman 1975, *Urban Planning and Design Criteria*, Second Edition, Van Nostrand Reinhold Company, New York

Danarto, Rudi (2003), *Pola Fasilitas Pendidikan oleh Penduduk Perumahan Formal di Wilayah Bandung Timur*, Tesis Program Magister Perencanaan Wilayah dan Kota , Institut Teknologi Bandung.

Dagun M Save, 2000, *Kamus Besar Ilmu Pengetahuan*. Lembaga Pengkajian Kebudayaan Nusantara (LPKN), Jakarta

Departemen Pendidikan Nasional, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia no.19 tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan*

Departemen Pendidikan Nasional, *Rencana Strategis Departemen Pendidikan Nasional tahun 2005-2009*

Departemen Pendidikan Nasional, *Undang-Undang Republik Indonesia No 20 tahun 2003 Tentang Sistim Pendidikan Nasional*

Departemen Pendidikan Nasional, *Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk SD, SMP, SMA atau sederajat*.

Departemen Pendidikan Nasional, *Peraturan Menteri Pendidikan No. 23 tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah*

Departemen Pendidikan Nasional, *Peraturan Menteri Pendidikan No. 7 tahun 2010 tentang Pemenuhan Kebutuhan, Peningkatan Profesionalisme, dan Peningkatan Kesejahteraan Guru, Kepala Sekolah/ Madrasah, dan Pengawas di Kawasan Perbatasan dan Pulau Kecil Terluar*

Departemen Pekerjaan Umum, *Keputusan Menteri PU no.20/KPTS/ 1986 tentang Pedoman Tehnik Pembangunan Perumahan Sederhana tidak Bersusun*

Departemen Pekerjaan Umum, *Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan Sederhana Tidak Bersusun di Daerah Perkotaan Penyempurnaan terhadap standar Perencanaan Kebutuhan Sarana Pendidikan Cipta Karya*

Direktorat Tata Guna Tanah Ditjen Agraria Depdagri , 1993, *Atlas DKI Jakarta Raya Tanah dan kegiatan Pembangunan PUBI No 214 tahun 1982 dalam LPPWK*

Dinas Tata Kota DKI Jakarta, *Buku Data dan Analisis RBWK Kecamatan-kecamatan DKI 1985-2005 dalam buku Penelitian / Penyempurnaan Standar Sarana Kota*

Dikmenum, 1999, *Peningkatan Mutu Pendidikan Berbasis Sekolah: Suatu Konsepsi Otonomi Sekolah (paper kerja)*, Depdikbud, Jakarta.

Effendi, Sofian dan Singaribuan, Masri. (1989), *Metode Penelitian Survei*, LP3ES, Jakarta

Final Report, *Pemetaan SD,SLTP Dan SLA REPELITA VI DKI JAKARTA*, Proyek Pengembangan Administrasi Perencanaan dan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 1993/1994, Kerjasama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah DKI Jakarta dengan Jurusan Geografi FMIPA-UI Depok, 1994

Fellmann, Getis Getis, 2006 , *Introduction to Geography*, Mc Ghaw-Hill International Edition.

Golany, Gedeon, 1976 , *New Town Planning, Principles and Practice*, New York : John Welley and Son.

Hagget Peter, 1968, *Locational Analysis in Human Geography*, London : Edward Arnold LTD

Hagget Peter, 2001, *Geography A Global Synthesis*, University of Bristol, Prentice Hall, USA

Harahap, Bilang Nauli (1999), *Arahan Lokasi Fasilitas Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama di Wilayah Bandung Timur*, Tugas Akhir Jurusan Teknik Planologi Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, Institut Teknologi Bandung.

Hanushek, Eric A, 2005, *Economic Outcomes and School Quality, Education Policy Series*, Volume 4, IEA, Paris.

Hardi, Ode Sofyan (2006), *Pola Sebaran siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) Negri Plus Standar Nasional/ Internasional di Propinsi DKI Jakarta*, Tesis Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Geografi, Universitas Indonesia

Harmantyo, Djoko, 2007, *Pendekatan Geografi dalam Pengembangan Wilayah*, Departemen Geografi Universitas Indonesia, <http://slamet-triyono.blogspot.com/2010/09/21/archive.html>

Hotimah, Oot, *Sebaran Tempat Kegiatan Belajar (TKB) SMP Terbuka di Kabupaten Bogor Bagian Barat*, Tesis Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Geografi, Universitas Indonesia

Iskandar, Maman,(2009) *Evaluasi Sebaran Lokasi Fasilitas Pendidikan Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas di Kota Bogor* , Tesis Program Magister Perencanaan Wilayah dan Kota, Institut Teknologi Bandung

Isjoni Msi. Phd, 2007, *UN dan Mutu Pendidikan*, Majelis Pendidikan Riau, <http://www.mprgubri.org/detail.php?id=51>

Kartono, Harry. (1989). *Esensi Pembangunan Wilayah dan Penggunaan Tanah Berencana*. Jakarta: Geografi FMIPA Universitas Indonesia.

Koestoer, R. H. (1996), *Penduduk dan Aksesibilitas Kota : Perspektif Tata ruang Lingkungan Ujung Pandang*, UI Press, Jakarta

Kota Depok Dalam Angka , 2009 Badan Pusat Statistik

Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Kehidupan Bernegara, 2009, *Meningkatkan Kualitas Pendidikan*, <http://lppkb.wordpress.com/2009/08/04/Pendidikan/2>

Mustika, Made Dewi Setyadhi, 2009, *Pendapatan Domestiki Regional Bruto Perkapita dan Angka Partisipasi Sekolah (APS) di propinsi Bali*, Piramida Jurnal Kependudukan dan Pengembangan Sumber Daya manusia vol V no.1 , Fakultas Ekonomi Universitas Udayana, Bali

Mustikohendro, L.Manik (2007), *Pola Wilayah Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah (Studi Kasus Kabupaten Bogor, Kota Bogor, dan Kota Depok)*, Tesis Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Geografi , Universitas Indonesia.

Purba, Samuel, 2010, *Malapetaka Ujian Nasional (UN)*, <http://edukasi.kompasiana.com/2010/05/10/malapetaka-ujian-nasional-un/>

Rahardjo Sugeng, 2006. *Analisis Spasial* , Program Pascasarjana Departemen Geografi FMIPA UI. Depok

Rahardjo, Mudjia, 2010, *Pengantar Analisis Kebijakan Pendidikan*, <http://mudjiarahardjo.com/materi-kuliah/111-pengantar-analisis-kebijakan-pendidikan.html>

Sandy I. Made. (1995). *Tanah, Muka Bumi*. Indograph Bakti. FMIPA Universitas Indonesia.

Suryana (1997), *Hubungan Faktor Jarak Dengan Kelengkapan Fasilitas Sekolah Dasar di Kabupaten Tasikmalaya*, Skripsi Jurusan Geografi FMIPA UI.

Sumaadmadja, Nursid, 1988, *Studi Geografi, Suatu Pendekatan dan Analisa Keruangan*, Bandung, Alumni

Sujanto, Bedjo, 2004, *Mensiasati Manajemen Berbasis Sekolah di Era Krisis yang Berkepanjangan*, ICW

Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negri, Menteri Pekerjaan Umum, dan Menteri Negara Perumahan Rakyat No 648-384 thn 1992, NO 739/KPTS/1992, No 09/KPTS/1992, *Tentang Pedoman Perumahan dan Permukiman Berimbang*

Tilaar, H.A.R, 1999, *Manajemen Pendidikan Nasional*, Remaja Rosda Karya, Bandung.

Umaedi, Drs, M.Ed, 1999, *Mamajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah*, Direktorat Pendidikan Dasar dan Menengah, <http://www.ssep.net/director.html>

Yeates, Maurice, dan Garner, Barry. 1980. *The North American Cities*, Third Edition. New York: Harper & Row Publishers.

Yunial Laili Mutiari, *Penegakan Hukum Lingkungan : Sanksi Administrasi Menurut UU No. 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup di Sumatra Selatan*



TESIS

**NAMA : MARGARETHA SRI HASTUTI
NPM : 0806420493**

Universitas Indonesia

**PROGRAM PASCA SARJANA ILMU
GEOGRAFI
UNIVERSITAS INDONESIA
2010**



LAMPIRAN